Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized

INDONESIA ECONOMIC QUARTERLY

Desember 2019

Membangun Manusia

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Membangun Manusia

Desember 2019

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ)* mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, *Country Director* dan Rolande Simone Pryce, *Acting Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomics, Trade and Investment (MTI) Global Practice,* dibawah bimbingan Ndiame Diop (*Practice Manager*) dan Frederico Gil Sander (*Lead Economist*). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim inti terdiri dari Dwi Endah Abriningrum, Magda Adriani, Arsianti, Yus Medina, Juul Pinxten, Ratih Dwi Rahmadanti, Alief Aulia Rezza, dan Virgi Agita Sari. Dukungan administrasi yang sangat baik diberikan oleh Deviana Djalil. Acara peluncuran laporan dan diseminasi dilakukan oleh Keshia Eneki Chloe Pieters, Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara dibawah bimbingan Lestari Boediono Qureshi dan Derek H. C. Chen.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Alief Aulia Rezza (Bagian A1); Magda Adriani, Gita Febriyanti, Iwan Gunawan, Muhammad Farman Izhar, Rubi Mangunsong, Rahmadi, Andhyta Firselly Utami (Kotak A.1), dengan kontribusi dari Pandu Harimurti, Azrin Rasuwin dan Dinesh Aryal, Agus Wibowo dan Suprapto (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB), Agustan, Roby Arifandri dan Mega Novetrihska (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT), dan Supriyanto (Universitas Indonesia, UI) dengan dukungan kompilasi data geospasial; Magda Adriani, Dwi Endah Abriningrum dan Ratih Dwi Rahmadanti (Bagian A2); Dwi Endah Abriningrum (Kotak A.2, Kotak B.2); Yus Medina (Bagian A3, A4, Kotak A.3); Juul Pinxten, Wendy Cunningham, Maria M. Wihardja dan Abror T. Perdana (Bagian A.5); Virgi Agita Sari (Bagian A.6); Derek H.C. Chen (Bagian A7); Alief Aulia Rezza dan Mochamad Pasha (Kotak A.4), and Camilla Holmemo, Pablo A. Acosta, Robert J. Palacios, Philip O'Keefe, Juul Pinxten, Shonali Sen, dengan masukan dari Margaret Grosh, Tina George, Ilsa Meidina, Tanya Adi Putri, Imam Setiawan, Anissa Rahmawati dan Nurzanty Khadijah (Bagian B), Kathleen Victoria Tedi dan Magda Adriani (Lampiran). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Jaffar Al Rikabi, Indira Maulani Hapsari, Assyifa Szami Ilman, Ergys Islamaj, Janani Kandhadai, Angella Faith Lapukeni, Andrew D. Mason, Muhammad Fajar Nugraha, Kathleen Victoria Tedi dan Ekaterina T. Vashakmadze. Edisi Bahasa Indonesia diperiksa oleh Alief Aulia Rezza, Dwi Endah Abriningrum, Magda Adriani, Yus Medina, Ratih Dwi Rahmadanti, Maria M. Wihardja, Bambang Suharnoko Sjahrir, Kathleen Victoria Tedi, Assyifa Szami Ilman, Muhammad Fajar Nugraha, dan Ilsa Meidina.

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Data terakhir tertanggal 03 Desember 2019. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo di sampul depan dan Bagian B merupakan Hak Cipta Dokumentasi Humas Linjamsos Kementerian Sosial dan Bagian A Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Laporan tersedia untuk diunduh dalam bahasa Inggris dan Indonesia melalui: worldbank.org/ieq.

Laporan edisi sebelumnya:

- June 2019: Lautan peluang
- Desember 2018: Memperkuat daya saing
- September 2018: Urbanisasi untuk semua

Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan hubungi ddjalil@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen@worldbank.org.

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke:

www.worldbank.org/id

@BankDunia #IEQBankDunia

BankDunia

instagram.com/worldbank

www.linkedin.com/company/the-world-bank

Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan & Belanja Negara
APRINDO	Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
ASLUT	Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
ATM	Automated Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
BI	Bank Indonesia
BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
BLT-PBI	Bantuan Langsung Tunai-Penerima Bantuan Iuran
BLU-LMAN	Badan Layanan Umum-Lembaga Manajemen Aset Negara
BOP	Balance of Payment
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CAD	Current Account Deficit
CAR	Capital Adequacy Ratio
CAMS	Copernicus Atmosphere Monitoring Service
CKM	Calon Kelas Menengah
CPI	Consumer Price Index
CPO	Crude Palm Oil
DAU	Dana Alokasi Umum
DD	Difference-in-Difference
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTPPFM/BDT	Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin/Basis Data Terpadu
EAP	East Asia Pacific
ECB	European Central Bank
ECLAC	Economic Commission for Latin America and the Caribbean
EU/UE	European Union/Uni Eropa
FDI	Foreign Direct Investment
FOMC	Federal Open Market Committee
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GDP	Gross Domestic Product
HIMBARA	Himpunan Bank milik Negara
ID	Identitas Diri
IOD	Indian Ocean Dipole
IEQ	Indonesia Economic Quarterly/Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia
IHK	Indek Harga Konsumer
ITRC	International Tripartite Rubber Council
JHT	Jaminan Hari Tua
JK/JKM	Jaminan Kematian
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JP	Jaminan Pensiun
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
KK	Kartu Keluarga
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KM	Kelas Menengah
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LNG	Liquefied natural gas
LPG	Liquefied Petroleum Gas
MTP	Major Trading Partners
NCPA	National Center for Policy Analysis
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
NTI	Net-weighted Trade Index
PBI	Peneriman Bantuan Iuran
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
PIP	Program Indonesia Pintar
PKH	Program Keluarga Harapan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPN/PPNBM	Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah
PPP	Purchasing Power Parity
PPID	Pejabat Pengelola Informasi Daerah
PS	Perlindungan Sosial
PTKP	Penghasilan Tida Kena Pajak
Raskin	Beras Miskin
Rastra	Beras Sejahtera
SA	Sosial Assistance
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SI	Sosial Insurance/Asuransi Sosial
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SITC	Standard International Trade Classification
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKM	Sigaret Kretek Mesin
SKT	Sigaret Kretek Tangan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SP	Social Protection/Perlindungan Sosial
STRANAS	Strategi untuk Percepatan Pemberantasan Stunting
SUN	Surat Utang Negara
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TORA	Tanah Obyek Reforma Agraria
ToT	Terms of Trade
UDB	Unified Data Base
UI	Universitas Indonesia
UNEP	United Nations Environment Programme
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organization
WRI	World Resource Institute
YoY	Year-on-year

Daftar Isi

KATA PENGANTAR I

SINGKATAN II

DAFTAR ISI III

RINGKASAN EKSEKUTIF: MEMBANGUN MANUSIA 1

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI 5

1. Pertumbuhan ekonomi menurun di Triwulan ke-3 karena permintaan dalam negeri melemah 5
2. Defisit neraca transaksi berjalan menyempit sementara surplus neraca transaksi modal dan finansial melebar 12
3. Inflasi makanan naik sementara di Triwulan ke-3 18
4. Harga komoditas dan impor yang turun mengakibatkan penurunan pertumbuhan realisasi penerimaan dan belanja 19
5. Kondisi pasar tenaga kerja terus membaik 22
6. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun 25
7. Prospek dan risiko pertumbuhan ekonomi 27

B. MEMBANGUN MANUSIA: PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK VISI INDONESIA TAHUN 2045 38

1. Sistem perlindungan sosial modern adalah kunci untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dan tanpa kemiskinan 38
2. Selama dua dekade terakhir ini, Indonesia telah meletakkan dasar yang kuat untuk sistem perlindungan sosialnya di masa depan 41
3. Perlindungan Sosial untuk Masa Depan Indonesia: Sistem PS yang koheren, terkonsolidasi, dan terkoordinasi untuk melayani negara yang berubah di dunia yang terus berubah 50
4. Bergerak menuju sistem Perlindungan Sosial untuk masa depan 52
5. Melaksanakan dan Membiayai Sistem Perlindungan Sosial Indonesia 59
6. Penutup 63

BIBLIOGRAFI 67

LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA 73

GAMBAR

Gambar ES.1: Pertumbuhan PDB tetap sangat stabil 3
Gambar ES.2: Pertumbuhan investasi melambat di tengah ketidakpastian yang masih ada 3
Gambar ES.3: Surplus perdagangan barang yang lebar menyebabkan penurunan kecil pada defisit transaksi berjalan 4
Gambar ES.4: Nilai Rupiah terhadap Dolar AS terus menguat 4
Gambar ES.5: Harga makanan melonjak di Triwulan ke-2, tetapi harga dari barang-barang yang harganya diatur pemerintah (*administered goods*) yang lebih rendah menjaga inflasi tetap stabil 4
Gambar ES.6: Realisasi penerimaan melambat di tengah menurunnya harga komoditas dan menyusutnya nilai impor 4
Gambar A.1: Pertumbuhan PDB menurun di Triwulan ke-3 sejalan dengan hambatan eksternal yang berkelanjutan 5
Gambar A.2: Pertumbuhan yang lebih cepat di sektor manufaktur mengimbangi pelambatan di sektor pertanian 6
Gambar A.3: Pertumbuhan konsumsi sektor swasta menurun 7
Gambar A.4: Indikator yang kerap muncul untuk konsumsi sektor swasta menunjukkan gambaran yang beragam 7
Gambar A.5: Pertumbuhan investasi melambat karena masih adanya ketidakpastian politik 7
Gambar A.6: Setelah menyusut selama dua triwulan berturut-turut, ekspor berhenti berkontraksi … 8
Gambar A.7: … sementara impor terus mengalami kontraksi 8
Gambar A.8: Kebakaran hutan dan lahan tahun ini mencapai rekor baru sejak tahun 2015, sebagian karena musim kemarau 9
Gambar A.9: Sektor pertanian, transportasi, perdagangan, dan industri mencatat kerugian ekonomi tertinggi dari kebakaran hutan 10
Gambar A.10: Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah provinsi yang paling terkena dampak relatif terhadap besaran perekonomiannya 10
Gambar A.11: Ekspor barang terus memburuk… 12
Gambar A.12: Volume ekspor batubara dan logam naik sementara ekspor komoditas utama lainnya turun 13
Gambar A.13: Harga komoditas utama melemah dibandingkan tahun lalu, kecuali karet 13
Gambar A.14: Impor barang mengalami kontraksi lebih lanjut di semua kategori. 14
Gambar A.15: Defisit transaksi berjalan menyempit dengan surplus perdagangan barang yang lebih besar 14
Gambar A.16: Surplus neraca transaksi modal dan finansial melebar, sebagian didorong oleh investasi portofolio yang besar 15
Gambar A.17: ...yang didorong oleh pembelian obligasi Perintah oleh investor asing… 15
Gambar A.18: ...dengan FDI yang tetap moderat 16
Gambar A.19: Indeks energi dan non-energi global turun di Triwulan ke-3, melanjutkan tren yang dimulai pada tahun 2018 18
Gambar A.20: Harga LNG, CPO, dan logam dasar tetap stabil sementara harga komoditas utama lainnya turun 18
Gambar A.21: Inflasi IHK naik sedikit di Triwulan ke-3 tahun 2019 karena inflasi yang lebih tinggi dari harga bahan makanan dan emas 19
Gambar A.22: Biaya pendidikan tinggi berkontribusi pada peningkatan inflasi inti di Triwulan ke-3 tahun 2019 19
Gambar A.23: Pertumbuhan penerimaan kumulatif menurun karena kontraksi penerimaan Migas dan PPN 20
Gambar A.24: Peningkatan belanja pemerintah terutama didorong oleh peningkatan belanja pegawai dan belanja sosial 21
Gambar A.25: Pelaksanaan belanja subsidi yang lebih rendah diimbangi oleh belanja pegawai dan belanja sosial yang lebih tinggi 21
Gambar A.26: Tingkat pekerjaan menunjukkan peningkatan lebih lanjut sementara tingkat pengangguran turun ke rekor terendah di bulan Agustus 2019 24
Gambar A.27: Kategori setengah menganggur sedikit meningkat, didorong oleh peningkatan pengangguran sukarela 24
Gambar A.28: Sementara peningkatan penghasilan dan peningkatan upah minimum berkorelasi 24
Gambar A.29: ... semakin banyak pekerja yang mendapatkan upah lebih rendah dari yang diamanatkan oleh provinsi 24
Gambar A.30: Kemiskinan terus tercatat dalam satu digit, meskipun laju penurunannya melambat 25
Gambar A.31: Kelas menengah terus meningkat, namun kerentanan masih tetap tinggi 25
Gambar A.32: Meskipun secara nasional tingkat kemiskinan menurun, penurunannya tidak seragam di semua provinsi 26
Gambar A.33: Indeks harga tertimbang bersih (NTI) Indonesia diproyeksikan akan terus melemah di tahun ini dan tahun depan… 28
Gambar A.34: Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan secara bertahap menyempit. 29
Gambar A.35: Inflasi IHK diproyeksikan turun sebesar 3,1 persen pada 2019 29
Gambar A.36: Harga komoditas yang lebih rendah diproyeksikan akan menyebabkan defisit anggaran yang lebih lebar pada tahun 2019 30
Gambar A.37: Total penerimaan dalam APBN 2020 ditargetkan untuk meningkat dua digit, lebih tinggi dari rata-rata historis 33
Gambar A.38: Lebih banyak prioritas pada belanja modal dan belanja sosial sementara lebih sedikit pengeluaran untuk belanja subsidi pada tahun 2020 34
Gambar A.39: Di negara-negara di mana data tersedia, pengurangan konsumsi plastik berkorelasi positif dengan tingkat retribusi / pajak 35
Gambar B.1: Struktur Usia Penduduk dari waktu ke waktu 39
Gambar B.2: Jumlah, Jenis, dan Kerusakan akibat Bencana (1996–2017) 40
Gambar B.3: Nilai "de jure" dari manfaat bantuan sosial untuk rumah tangga yang memiliki anak, 2019 44
Gambar B.4: Nilai "de jure" dari manfaat bantuan sosial untuk 40% rumah tangga termiskin tanpa anak yang menerima dua program utama, 2019 44
Gambar B.5: Nilai manfaat dan cakupan program Bantuan Sosial utama tahun 2019 45
Gambar B.6: Total cakupan pensiun di antara penduduk berusia 65+ menurut desil, 2018 46
Gambar B.7: Belanja bantuan sosial sebagai bagian dari PDB (%) - negara terpilih 46
Gambar B.8: Penarikan meningkat tajam sejak Peraturan Pemerintah No. 60 diterbitkan pada tahun 2015 49
Gambar B.9: Tingkat cakupan dana pensiun antar negara dan tingkat penghasilan 49

Gambar B.10: Visi 2025 51
Gambar B.11: Visi 2045 52
Gambar B.12: Perkiraan total biaya perluasan dan perubahan jaminan pensiun 58
Gambar B.13: Belanja untuk subsidi energi sebagian diarahkan untuk bantuan sosial. 62
Gambar B.14: ...tetapi tetap cukup besar, sebesar 1,0 persen dari PDB 62
Gambar B.15: Pengeluaran pajak pemerintah melalui pembebasan PPN lebih dinikmati oleh kelas menengah dan atas 62

TABEL

Tabel ES.1: Pertumbuhan riil PDB diproyeksikan pulih menjadi 5,1 persen pada tahun 2020 dengan pulihnya pertumbuhan investasi, sementara sektor eksternal tetap lemah 2
Tabel A.1: Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*, BOP) Indonesia 16
Tabel A.2: Perdagangan grosir dan eceran, akomodasi dan makanan dan minuman, dan industri manufaktur menyumbang 96 persen dari penciptaan lapangan kerja pada tahun ini hingga Agustus 2019 23
Tabel A.3: Pangsa konsumsi dari 40 persen masyarakat kelas bawah dan menengah meningkat 26
Tabel A.4: Indikator-indikator ekonomi yang utama 27
Tabel A.5: ... karena harga untuk semua komoditas utama, kecuali karet, diperkirakan akan terus menurun 28
Tabel A.6: Proyeksi Anggaran Fiskal Bank Dunia 32
Tabel A.7: Hasil dari analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang dapat terdeteksi dalam tingkat pekerjaan akibat dari biaya kantong plastik yang dipungut di 27 kota di Indonesia pada tahun 2016 36
Tabel B.1: Program Bantuan Sosial yang Utama di Indonesia 43
Tabel B.2: Program Jaminan Sosial yang Utama 48
Tabel B.3: Perkiraan dampak kumulatif dari reformasi bantuan sosial 55
Tabel B.4: Biaya untuk memperluas cakupan Perlindungan Sosial sebagai persen dari PDB berdasarkan berbagai opsi 59
Tabel B.5: Proyeksi dampak tahunan dari perubahan 63
Tabel B.6: Perubahan rata-rata dalam harga eceran minimum yang diatur dan besaran tarif cukai hasil tembakau 64
Tabel B.7: Rata-rata harga eceran minimum yang diatur, tarif cukai, dan beban cukai tembakau 65

TABEL LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1: Realisasi anggaran belanja Pemerintah 73
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran 73
Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia 74
Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia (USD miliar) 75

KOTAK

Kotak A.1: Analisis ekonomi kebakaran hutan dan kabut asap tahun 2019[1] 9
Kotak A.2: Harga komoditas terus menurun di Triwulan ke-3 17
Kotak A.3: APBN 2020 - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan yang optimis terhadap penerimaan dan belanja di tengah perlambatan global 33
Kotak A.4: Mengurangi polusi sampah kantong plastik di Indonesia 35
Kotak B.1: Rekomendasi untuk keberlanjutan JKN 57
Kotak B.2: Cukai tembakau yang lebih tinggi di Indonesia 64

Ringkasan Eksekutif: Membangun Manusia

Di tengah kondisi perekonomian global yang menantang dan memburuknya nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*, ToT), pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,0 persen pada triwulan ketiga tahun 2019, dari 5,1 persen di Triwulan ke-2 (Gambar ES.1). Penggerak pertumbuhan domestik melambat. Pertumbuhan investasi melemah di Triwulan ke-3 dikarenakan, antara lain, penurunan signifikan harga komoditas, dan karena masih adanya ketidakpastian politik sebelum pengumuman kabinet yang baru (Gambar ES.2). Total konsumsi juga melambat, termasuk di dalamnya perlambatan signifikan dari konsumsi Pemerintah. Lemahnya permintaan domestik melalui kontraksi volume impor yang besar, yang bersama dengan nilai ekspor yang tidak mengalami perubahan, mengakibatkan nilai ekspor bersih memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi produksi, pertumbuhan di sektor pertambangan, manufaktur dan keuangan mengalami percepatan. Sebaliknya, pertumbuhan di sektor pertanian melambat, sebagian dikarenakan kondisi cuaca buruk dan kekeringan yang diakibatkan oleh El Nino.

Memburuknya *ToT* menyebabkan peningkatan yang lebih kecil pada neraca transaksi berjalan dibandingkan dengan kontribusi ekspor bersih bagi pertumbuhan PDB. Neraca transaksi berjalan menyempit menjadi 2,9 persen dari PDB untuk empat triwulan hingga Triwulan ke-3 tahun 2019 dari 3,1 persen di Triwulan ke-1 dan Triwulan ke-2 (Gambar ES.3). Surplus perdagangan barang membaik, didorong oleh penurunan impor minyak yang tajam, yang sebagian disebabkan oleh harga minyak yang lebih rendah dan kebijakan Pemerintah meningkatkan kapasitas domestik untuk memproduksi *biofuel*. Defisit neraca penerimaan yang lebih sempit disebabkan oleh pola musiman pembayaran dividen dan pembayaran bunga jasa atas utang luar negeri yang lebih rendah.

Dengan kebijakan moneter global yang lebih longgar yang mendorong aliran modal ke negara-negara berkembang (*emerging markets*) yang memiliki fundamental yang baik, termasuk Indonesia, arus masuk portofolio meningkat di Triwulan ke-3, dan berkontribusi terhadap meningkatnya surplus akun keuangan (*financial account*). Meskipun neraca transaksi berjalan (*current account deficit*, CAD) lebih sempit dan surplus akun keuangan lebih besar, neraca pembayaran tetap defisit di Triwulan ke-3. Namun demikian, cadangan internasional naik menjadi 124,3 miliar dolar AS pada akhir bulan September, cukup untuk membiayai impor dan layanan utang luar negeri pemerintah selama 6,9 bulan. Arus modal masuk juga mendukung nilai Rupiah, sementara imbal hasil obligasi mengalami penurunan (Gambar ES.4).

Inflasi tetap stabil. Kondisi El Nino menyebabkan harga makanan yang lebih tinggi, meningkat menjadi 5,4 persen yoy (*year-on-year*/tahun-ke-tahun) pada Triwulan ke-3 2019 dari 3,8 persen pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, inflasi yang lebih lambat dalam harga energi domestik berarti bahwa nilai inflasi indeks harga konsumen relatif tetap dapat ditahan dan mendekati titik tengah kisaran target inflasi Bank Indonesia (BI) (Gambar ES.5).

Pelonggaran moneter global dan arus masuk modal yang kuat meningkatkan perbedaan suku bunga antara Indonesia dan negara-negara maju. Ini, di samping inflasi yang teredam, menciptakan ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 100 bps dari Juli hingga Oktober.

Harga komoditas yang lebih rendah dan impor yang berkontraksi telah menurunkan total realisasi penerimaan. Akibatnya, Pemerintah kemungkinan akan melampaui target defisit anggarannya sebesar 1,8 persen dari PDB untuk tahun 2019. Setelah mencapai level yang tertinggi selama sebelas tahun yaitu sebesar 23,0 persen yoy tahun lalu, pertumbuhan total realisasi penerimaan Pemerintah membukukan kenaikan yang moderat sebesar 1,7 persen (sejak awal tahun hingga Oktober) tahun ini (Gambar ES.6). Kontraksi belanja modal dan subsidi berkontribusi pada pertumbuhan belanja yang lebih lambat hingga bulan Oktober, tetapi Pemerintah mengharapkan untuk memacu tingkat belanja dalam dua bulan terakhir tahun ini. Defisit fiskal diperkirakan mencapai 2,1 persen dari PDB pada tahun 2019, masih jauh di bawah batas konservatif Indonesia yang sebesar 3,0 persen.

Indikator pasar tenaga kerja memberi sinyal yang beragam. Di satu sisi, ekonomi Indonesia menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru, menjadikan tingkat

ketenagakerjaan menjadi 63,9 persen pada bulan Agustus 2019, naik dari 63,6 persen di bulan Agustus 2018. Partisipasi angkatan kerja juga naik ke level tertinggi selama empat tahun terakhir, yaitu 67,4 persen. Di sisi lain, pertumbuhan upah nominal tertahan, sebesar 3,0 persen yoy, yang menyiratkan adanya penurunan upah riil.

Konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja yang kuat, inflasi yang lemah dan perluasan program bantuan sosial baru-baru ini, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai rekor terendah sebesar 9,4 persen pada bulan Maret 2019 dari 9,8 persen pada bulan Maret 2018.

Diperkirakan dengan penurunan ketegangan perdagangan internasional secara bertahap dan berkurangnya ketidakpastian politik dalam negeri, pertumbuhan PDB riil diproyeksikan akan meningkat secara bertahap mulai tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,0 persen pada tahun 2019, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun sebesar 5,2 persen pada tahun 2018, naik menjadi 5,1 persen pada tahun 2020 (Tabel ES.1).

Tabel ES.1: Pertumbuhan riil PDB diproyeksikan pulih menjadi 5,1 persen pada tahun 2020 dengan pulihnya pertumbuhan investasi, sementara sektor eksternal tetap lemah

		2018	2019p	2020p
PDB riil	(Persen perubahan tahunan)	5,2	5,0	5,1
Indeks Harga Konsumen	(Persen perubahan tahunan)	3,2	3,1	3,5
Neraca transaksi berjalan	(Persen dari PDB)	-2,9	-2,7	-2,6
Neraca anggaran pemerintah	(Persen dari PDB)	-1,8	-2,1	-2,1

Sumber: Bank Indonesia; Badan Pusat Statistik; Menteri Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Tahun 2018 adalah hasil aktual; p adalah singkatan dari perkiraan Bank Dunia

Dengan menurunnya ketegangan perdagangan internasional secara bertahap, menurunnya ketidakpastian politik mengenai pembentukan kabinet baru, menurunnya biaya pinjaman, dan meningkatnya sentimen bisnis karena reformasi ekonomi yang diusulkan, pertumbuhan investasi tetap diperkirakan akan meningkat tahun depan, meskipun tetap lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu yang merupakan pertumbuhan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dengan pulihnya nilai investasi dan upah pekerja, pertumbuhan konsumsi swasta diproyeksikan secara umum akan stabil, meskipun sedikit menurun pada tahun 2020 karena inflasi yang lebih tinggi karena adanya penghapusan subsidi tarif listrik untuk sejumlah rumah tangga dan karena dampak yang semakin berkurang dari efek dasar (*base effect*, pengaruh perubahan harga konsumen dari bulan yang sama tahun sebelumnya pada perubahan dalam inflasi tahunan pada bulan yang sama tahun ini – pent.) yang tinggi terkait dengan pemilihan umum pada tahun 2019. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga diperkirakan relatif konservatif mengingat penerimaan yang rendah karena harga komoditas yang melemah dan nilai impor yang kurang bagus, meskipun reformasi pajak sedang berlangsung.

Di tengah ketidakpastian kebijakan global dan pemulihan yang tidak signifikan dalam perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan akan terpengaruh. Impor diproyeksikan akan melemah, dengan kontraksi yang ada diperkirakan akan berkurang secara bertahap, mengikuti pola pemulihan yang terjadi dalam pertumbuhan investasi. Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan menyempit dalam waktu dekat dari 2,7 persen dari PDB pada tahun 2019 menjadi 2,6 persen dari PDB pada tahun 2020.

Risiko terhadap menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, dengan adanya ketegangan perdagangan yang berkepanjangan yang menimbulkan risiko tambahan terhadap harga barang-barang komoditas, arus perdagangan internasional, sentimen bisnis global dan pertumbuhan investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Peningkatan ketegangan perdagangan lebih lanjut mungkin akan semakin membebani pertumbuhan regional dan harga barang-barang komoditas, dan oleh karena itu berdampak pula terhadap penerimaan Pemerintah, terhadap neraca transaksi berjalan melalui penerimaan ekspor yang lebih rendah, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Membangun manusia

Visi Pemerintah untuk Indonesia adalah untuk mencapai status pendapatan tinggi dan menurunkan kemiskinan mendekati angka nol. Untuk mewujudkan visi ini, Indonesia membutuhkan sistem perlindungan sosial (PS) yang modern, inklusif dan efisien. Dalam

konteks yang ditandai oleh perubahan demografis dan penuaan, kemajuan teknologi, pergeseran pola kerja (utamanya terkait di mana dan bagaimana orang bekerja), dan kerentanan yang terus-menerus ada terhadap bencana alam, sistem-sistem PS perlu berkembang. Sistem tersebut juga memainkan peran penting dalam membangun, memberi pekerjaan, dan memberi perlindungan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Edisi laporan triwulanan ini membahas elemen sistem perlindungan sosial yang "siap untuk masa depan" yang harus dimasukkan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata.

Program perlindungan sosial saat ini membentuk dasar yang kuat di mana Indonesia dapat membangun sistem yang mampu mengatasi risiko dan tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Tren demografis, teknologi, dan lingkungan yang muncul akan membutuhkan pemikiran ulang terhadap kontrak sosial untuk memastikan bahwa kontrak sosial tersebut dapat mendorong kesejahteraan bagi semua orang dan memungkinkan Indonesia untuk mencapai target penurunan kemiskinan, modal manusia, dan pertumbuhan inklusif yang telah ditetapkan untuk tahun 2045. Sistem perlindungan sosial di masa depan harus dapat diakses oleh semua orang Indonesia tanpa memandang di mana dan bagaimana mereka mencari nafkah, dan harus memperluas perlindungan kepada para lansia miskin dan penyandang cacat sebagai bagian yang besar dari masyarakat yang akan terus bertambah.

Untuk mencapai hal ini, Pemerintah dapat mempertimbangkan sistem yang memberikan tingkat perlindungan minimum melalui semua tahap kehidupan alamiah seseorang. Jaminan minimum ini dapat dicapai dengan kombinasi program-program bantuan sosial, yang sebagian besar sudah ada. Jaminan minimum ini kemudian dapat dilengkapi dengan satu set program jaminan sosial yang koheren yang melindungi pendapatan keluarga ketika para penerima jaminan mencapai usia lanjut, ketika mereka sakit atau tidak memiliki pekerjaan.

Gambar ES.1: Pertumbuhan PDB tetap sangat stabil
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

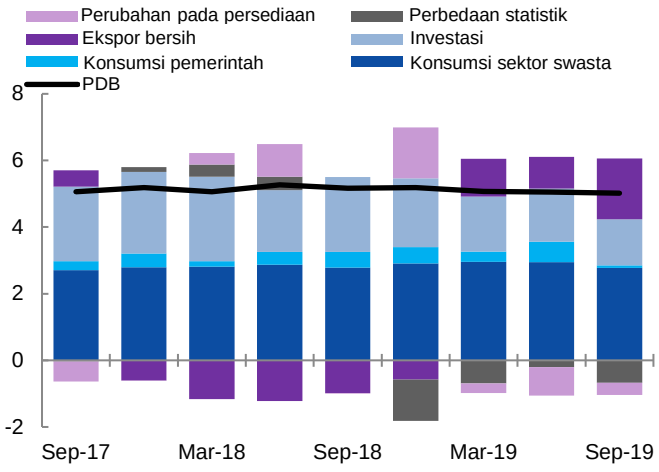

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.2: Pertumbuhan investasi melambat di tengah ketidakpastian yang masih ada
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

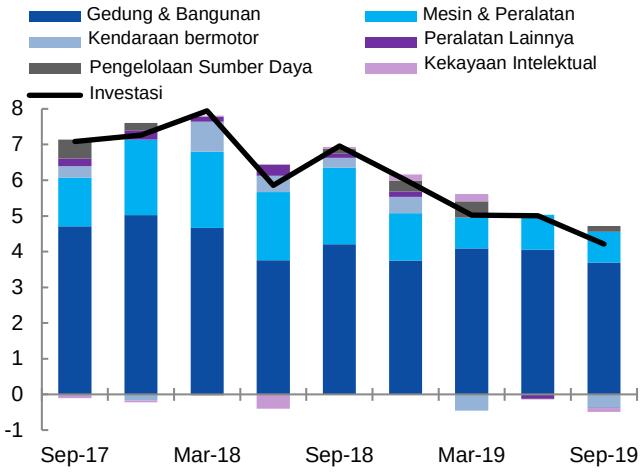

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.3: Surplus perdagangan barang yang lebar menyebabkan penurunan kecil pada defisit transaksi berjalan
(USD miliar)

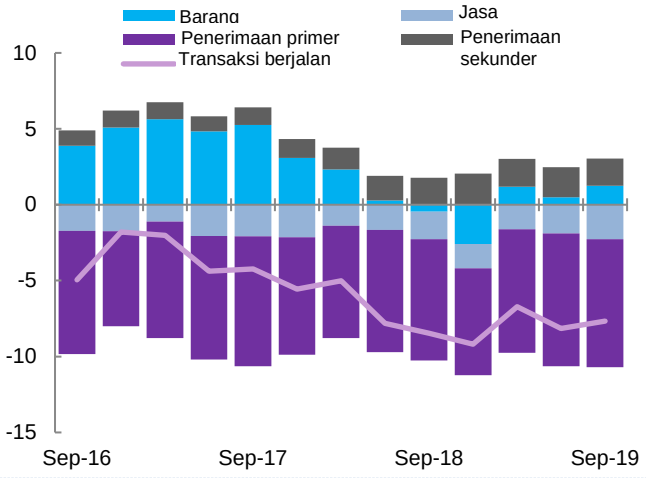

Sumber: Bank Indonesia (BI), perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.4: Nilai Rupiah terhadap Dolar AS terus menguat
(indeks, 1 Jan 2018 = 100)

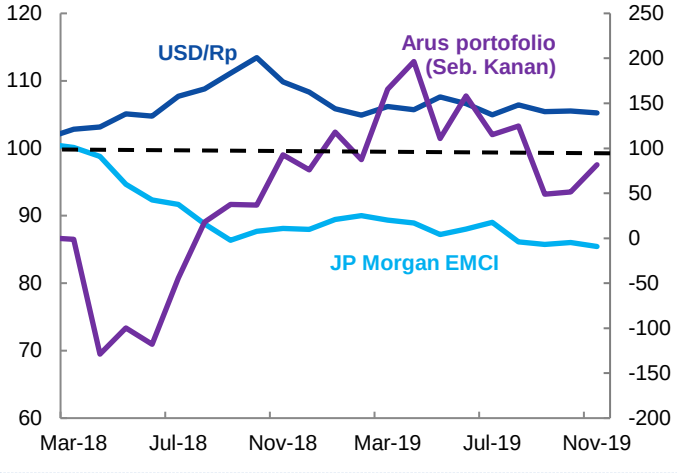

Sumber: Bank Indonesia, JP Morgan, Institute of International Finance, dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.5: Harga makanan melonjak di Triwulan ke-2, tetapi harga dari barang-barang yang harganya diatur pemerintah (*administered goods*) yang lebih rendah menjaga inflasi tetap stabil
(perubahan yoy, persen)

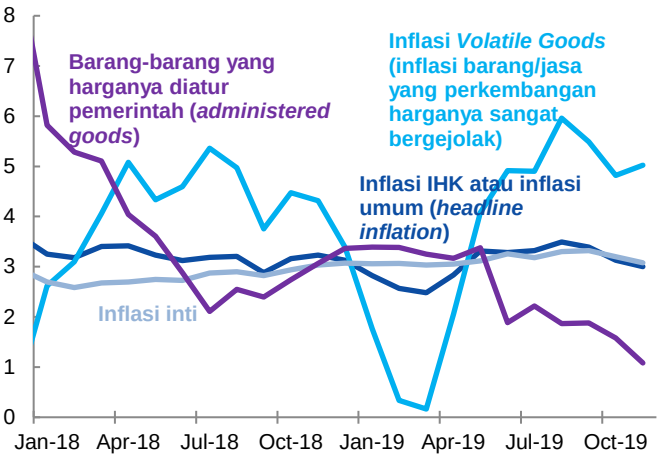

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.6: Realisasi penerimaan melambat di tengah menurunnya harga komoditas dan menyusutnya nilai impor
(kontribusi penerimaan Januari – Oktober terhadap pertumbuhan, yoy, poin persentase)

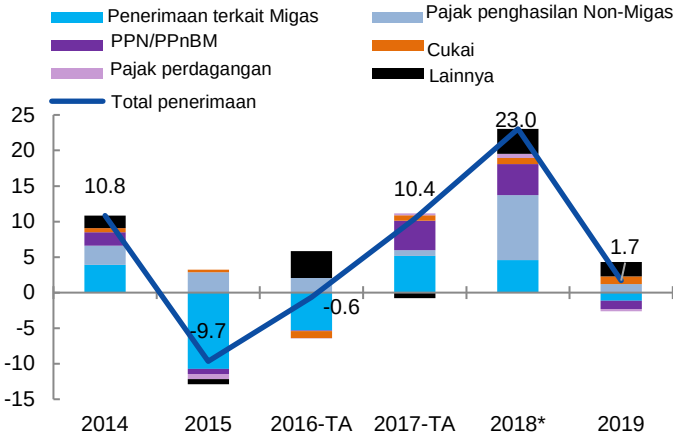

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini

1. Pertumbuhan ekonomi menurun di Triwulan ke-3 karena permintaan dalam negeri melemah

PDB riil Indonesia tumbuh 5,0 persen dengan permintaan dalam negeri yang melambat, namun kinerja ekspor pulih dan mendukung pertumbuhan

Pertumbuhan PDB riil Indonesia sedikit menurun menjadi 5,0 persen yoy pada Triwulan ke-3 tahun 2019, sejalan dengan perkiraan dari banyak Lembaga ekonomi yang dikumpukan oleh Consensus (*Consensus Economics*, suatu perusahaan survei ekonomi makro global yang berpusat di London, Inggris – pent.), dari 5,1 persen pada Triwulan ke-2 (Gambar A.1). Kontribusi permintaan dalam negeri terhadap PDB menurun dengan konsumsi yang lebih lambat, terutama oleh Pemerintah. Pertumbuhan investasi juga melambat di Triwulan ke-3. Lemahnya permintaan dalam negeri tercermin oleh kontraksi volume impor yang besar, yang bersama-sama dengan nilai ekspor yang tidak mengalami perubahan yang signifikan mengakibatkan ekspor bersih memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan. Di sisi produksi, sektor pertambangan,

Gambar A.1: Pertumbuhan PDB menurun di Triwulan ke-3 sejalan dengan hambatan eksternal yang berkelanjutan

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

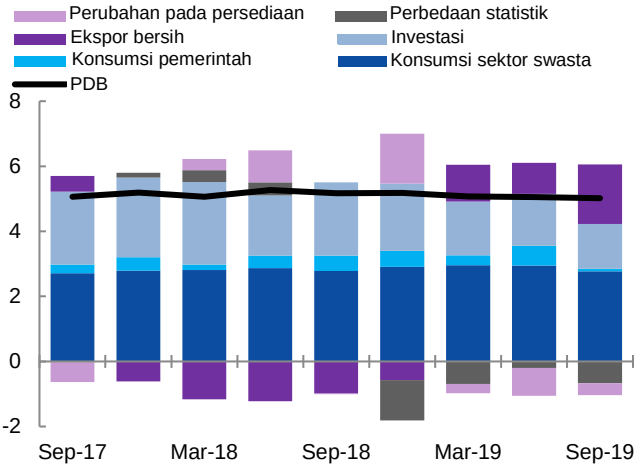

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

manufaktur, dan keuangan[1] membukukan pertumbuhan yang lebih cepat, sementara sektor pertanian dan sektor jasa lainnya[2] tumbuh melambat.

Di sisi produksi, pertumbuhan terutama didorong oleh sektor manufaktur

Dalam hal nilai tambah bruto, pertumbuhan juga turun dari 5,0 persen di Triwulan ke-2 menjadi 4,9 persen di Triwulan ke-3 (Gambar A.2). Sebagian besar sektor jasa mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan ke-2.[3] Setelah mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam 9 triwulan terakhir ini di Triwulan ke-2, sektor pertambangan mengalami pemulihan dan membukukan pertumbuhan positif, yang sebagian didorong oleh antisipasi produsen terkait pelarangan ekspor nikel yang mulai berlaku pada Januari 2020. Sektor manufaktur, yang sebagian didorong oleh permintaan dari luar negeri yang lebih tinggi untuk produk-produk furnitur Indonesia,[4] juga mencatat peningkatan dalam aktivitas[5]. Sebaliknya, pertumbuhan di sektor pertanian menurun tajam menjadi 3,1 persen, sebagian karena dampak buruk dari kekeringan yang dipicu oleh El Nino[6]. Demikian pula, sejalan dengan perlambatan kegiatan investasi, khususnya gedung dan bangunan, pertumbuhan sektor konstruksi sedikit melambat.

Gambar A.2: Pertumbuhan yang lebih cepat di sektor manufaktur mengimbangi pelambatan di sektor pertanian

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

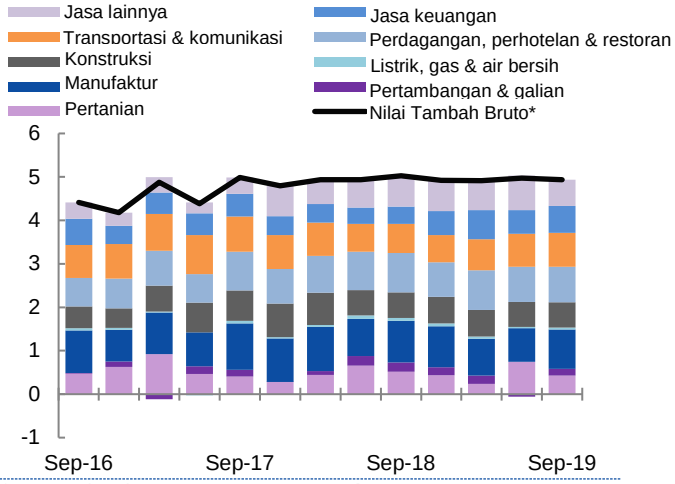

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Nilai Tambah Bruto diperoleh dari jumlah dari nilai tambah di sektor-sektor pertanian, industri, dan jasa. Jika nilai tambah sektor-sektor tersebut dihitung pada nilai pembeli, nilai tambah bruto diperoleh dengan mengurangi pajak tidak langsung bersih dari PDB.

Total pertumbuhan konsumsi menurun ketika stimulus yang ada di Triwulan ke-2 yang meriah dan belanja yang terkait dengan pemilu sudah tidak ada lagi

Total konsumsi menurun secara substansial dari peningkatan sebesar 5,7 persen di Triwulan ke-2 menjadi 4,6 persen karena konsumsi sektor swasta maupun pemerintah menurun. Setelah mencapai level tertinggi selama 5 tahun terakhir di Triwulan ke-2, pertumbuhan konsumsi swasta menurun menjadi 5,1 persen, setara dengan rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga turun kembali menjadi 5,0 persen dari 5,2 persen di Triwulan ke-2 (Gambar A.3), oleh karena tidak ada lagi dorongan dari masa Lebaran dan siklus pemilihan umum dan kegiatan konsumsi menurun oleh adanya kebakaran hutan (Kotak A.1). Meskipun kurang dari setengah dari peningkatan sebesar 15,3 persen di Triwulan ke-2, belanja yang dilakukan oleh partai-partai politik masih meningkat menjadi 7,4 persen di Triwulan ke-3, karena partai-partai politik besar menyelenggarakan konvensi. Pertumbuhan konsumsi riil pemerintah melambat menjadi 1,0 persen dari level tertinggi selama 5 tahun terakhir sebesar 8,3 persen di Triwulan ke-2. Setelah pengeluaran yang signifikan untuk gaji pegawai dan pengamanan selama liburan Idul Fitri dan pemilihan umum[7] di Triwulan ke-2, belanja gaji

[1] Antara lain layanan perbankan, asuransi, investasi, pajak dan akuntansi.
[2] Antara lain layanan untuk administrasi publik, pertahanan, administrasi jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan.
[3] Sektor jasa meliputi sektor utilitas, perdagangan dan perhotelan, transportasi dan komunikasi serta keuangan.
[4] Bisnis (30 September 2019).
[5] RR.com (5 November 2019).
Menurut data Neraca Pembayaran (BOP), nilai ekspor furnitur naik 5,1 persen di Triwulan ke-3, lebih tinggi dari kenaikan sebesar 2,9 persen di Triwulan ke-2.
[6] Swarna news (6 November 2019).
[7] Ini termasuk pencairan sebesar Rp 40 triliun untuk tunjangan Idul Fitri bagi para pegawai pemerintah dan bonus dalam bentuk gaji bulan ke-13.

pegawai secara nominal hanya meningkat sebesar 0,6 persen yoy di Triwulan ke-3 setelah melonjak sebesar 21,7 persen di Triwulan ke-2.

Pada saat yang sama, indikator-indikator bulanan yang terkait dengan konsumsi sektor swasta menunjukkan gambaran yang beragam. Pertumbuhan penjualan sepeda motor dan penjualan eceran meningkat dengan sedikit perlambatan dalam konsumsi swasta selama Triwulan ke-3, namun memberi sinyal adanya pemulihan setelah mencapai titik terendah di awal tahun (Gambar A.4). Sementara itu, kepercayaan konsumen menurun.

Gambar A.3: Pertumbuhan konsumsi sektor swasta menurun
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

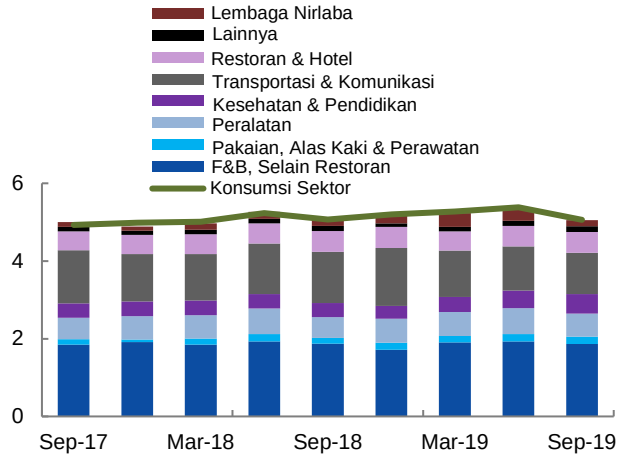

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.4: Indikator yang kerap muncul untuk konsumsi sektor swasta menunjukkan gambaran yang beragam
(penjualan eceran: yoy, persen; penjualan Sepeda Motor: 3mma yoy, persen, Seb. Kiri; indeks kepercayaan konsumen; Seb. Kanan)

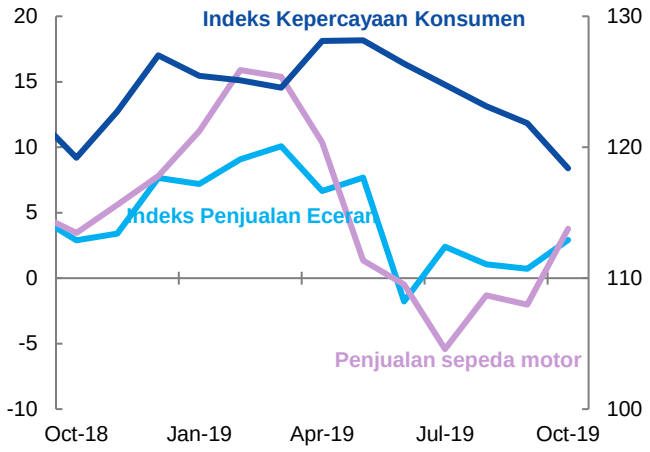

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Investasi tetap mencatatkan pertumbuhan yang lamban di Triwulan ke-3

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menurun menjadi 4,2 persen yoy di Triwulan ke-3 dari 5,0 persen di Triwulan ke-2 (Gambar A.5). Hasil capaian terbaru ini sejalan dengan pertumbuhan investasi yang lebih rendah, harga barang-barang komoditas yang lebih rendah, siklus investasi pertambangan yang jatuh tempo, ketidakpastian eksternal dan dalam negeri yang ada sebelum pengumuman kabinet yang baru, dan investasi publik yang rendah[8]. Pertumbuhan investasi pada gedung dan bangunan (75 persen dari total PMTB) tetap tinggi sebesar 5,0 persen, tetapi lebih rendah dari 5,5 persen di Triwulan ke-2. Sebagian karena berakhirnya siklus belanja modal di sektor pertambangan dan infrastruktur serta berlanjutnya penurunan harga ekspor

Gambar A.5: Pertumbuhan investasi melambat karena masih adanya ketidakpastian politik
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

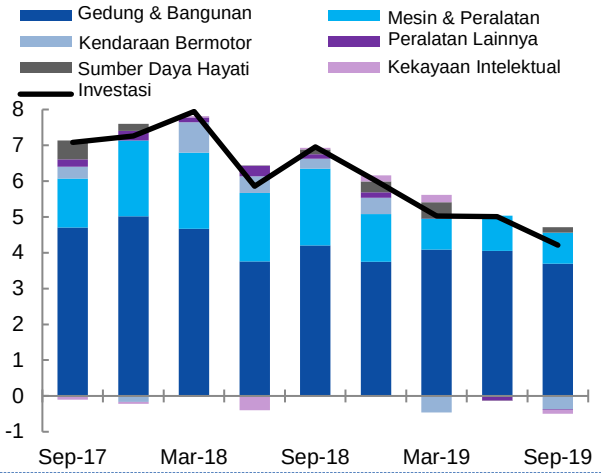

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

[8] Nominal belanja modal pemerintah mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen tahun-ke-Oktober, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 1,3 persen yang ada pada tahun 2018 selama periode yang sama. Lihat Bagian A6.

barang-barang komoditas utama negara, pertumbuhan investasi dalam mesin, peralatan, dan kendaraan bermotor menurun.

Ekspor pulih kembali sementara impor terus mengalami kontraksi di Triwulan ke-3, mendukung pertumbuhan secara keseluruhan

Meskipun perdagangan global melambat, volume ekspor tetap datar setelah menyusut sebesar 2,0 persen di Triwulan ke-2, karena volume ekspor minyak dan gas (Migas) turun lebih kecil dari Triwulan ke-2, sementara ekspor non-migas terus membukukan pertumbuhan yang moderat (Gambar A.6). Sementara itu, volume impor mengalami kontraksi untuk tiga triwulan secara berturut-turut, turun 8,6 persen setelah turun 6,8 persen di Triwulan ke-2, sejalan dengan perlambatan investasi (Gambar A.7). Impor Migas turun karena Pemerintah melanjutkan serangkaian kebijakan untuk mengelola impor[9]. Konsumsi barang impor juga telah menurun sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor barang-barang konsumsi tertentu. Sejalan dengan melambatnya investasi di sektor permesinan, peralatan dan kendaraan bermotor, impor barang modal secara nominal turun 1,9 persen di Triwulan ke-3. Dengan demikian ekspor bersih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk tiga triwulan secara berturut-turut.

Gambar A.6: Setelah menyusut selama dua triwulan berturut-turut, ekspor berhenti berkontraksi …
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

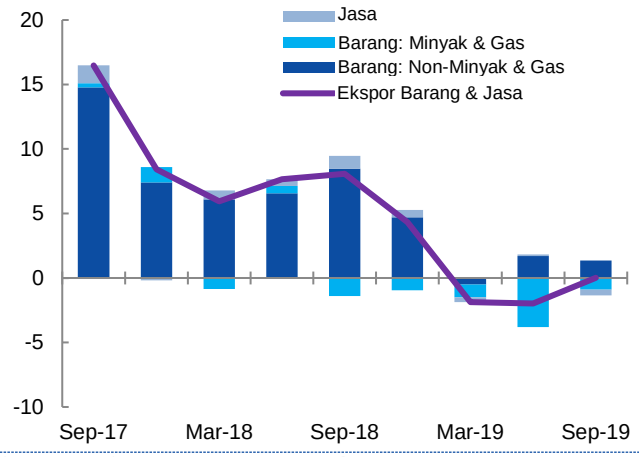

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.7: … sementara impor terus mengalami kontraksi
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

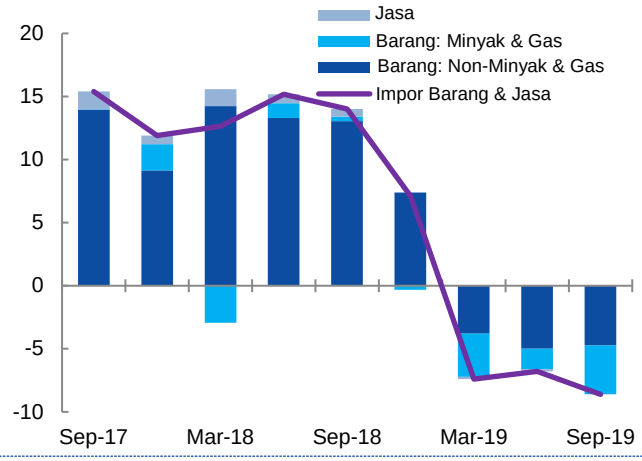

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

[9] Setelah mengamanatkan penggunaan bahan bakar B20 pada bulan September 2018, Pemerintah telah memprakarsai kebijakan untuk mendorong penggunaan bahan bakar B30, konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi energi berbasis minyak kelapa sawit, serta memasok kilang bbm dengan minyak kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar solar. Selain itu, Pemerintah mengeluarkan amanat bagi para kontraktor minyak dan gas untuk menawarkan bagian mereka dari produksi minyak mentah untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk ekspor. Lihat Kotak A2 di Bank Dunia (2019b).

Kotak A.1: Analisis ekonomi kebakaran hutan dan kabut asap tahun 2019[1]

Tahun 2019 mencatat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia paling luas di Indonesia sejak krisis kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 (Gambar A.8), yang mengeluarkan kabut tebal dan menyelimuti setidaknya delapan provinsi[2] dan menghambat kegiatan ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada bulan September 2019, lebih dari 900.000 orang telah melaporkan penyakit kesehatan pernapasan,[3] 12 bandara nasional telah menghentikan operasinya, dan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus ditutup untuk sementara. Secara keseluruhan, total kerusakan dan kerugian ekonomi di delapan provinsi yang terkena dampak sepanjang Juni-Oktober 2019[4] diperkirakan mencapai 5,2 miliar dolar AS, setara dengan 0,5 persen dari PDB,[5] terutama melalui sektor pertanian, transportasi, perdagangan, industri, dan lingkungan hidup.

Gambar A.8: Kebakaran hutan dan lahan tahun ini mencapai rekor baru sejak tahun 2015, sebagian karena musim kemarau

(total area terbakar tahunan, juta hektar & Oceanic Nino Index, yang mengindikasikan kemungkinan keparahan musim kemarau tahun itu)

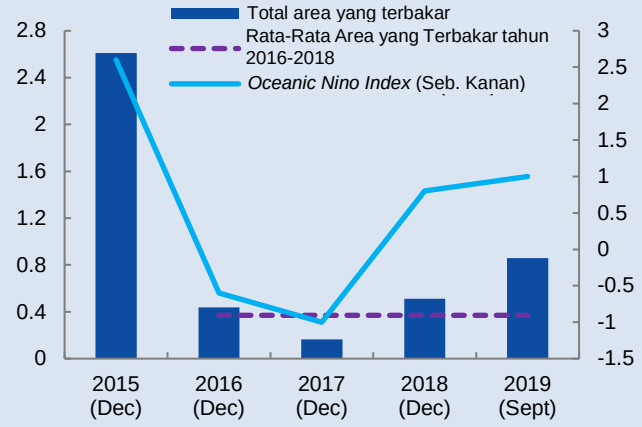

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019 & NOAA Climate.gov, 2019

Tidak seperti kebakaran hutan di hutan-hutan boreal Amerika Utara, kebakaran hutan hujan tropis dan lahan di Indonesia disebabkan oleh manusia dan telah menjadi masalah kronis setiap tahun sejak tahun 1997. Pembakaran dianggap sebagai opsi termurah di antara semua metode untuk mempersiapkan lahan penanaman, atau untuk mengklaim lahan di daerah-daerah sengketa, di mana kepemilikan lahan tidak pasti dan di mana penegakan hukumnya lemah.[6] Tanpa adanya langkah-langkah untuk mengendalikan pembakaran, api dapat menyebar tanpa terkendali dan diperburuk oleh cuaca yang kering. Secara total, 44 persen dari wilayah yang terbakar tahun ini berlokasi di lahan gambut, di mana, tidak seperti lahan mineral, kebakaran lebih sulit untuk dipadamkan begitu mulai terbakar dan melepaskan kabut tebal serta emisi karbon ke atmosfer. Komposisi lahan gambut berkontribusi terhadap fakta bahwa emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Indonesia diperkirakan sebesar hampir dua kali lipat emisi dari kebakaran hutan di Amazon Brasil tahun ini.[7]

Perkiraan resmi menunjukkan bahwa 620.201 hektar[8] hutan dan lahan terbakar di delapan provinsi yang terkena dampak antara Januari-September 2019, lebih dari 9 kali luas wilayah DKI Jakarta. Angka ini lebih dari dua kali lipat rata-rata wilayah yang terbakar sepanjang tahun 2016-2018 (Gambar A.8) dan kemungkinan akan meningkat sepanjang Oktober dan November. Lonjakan kebakaran hutan dan lahan tahun ini dapat dikaitkan dengan musim kemarau yang berkepanjangan karena fenomena iklim seperti El Niño, yang menyebabkan berkurangnya curah hujan setiap empat tahun[9], serta suatu tahapan dalam *Indian Ocean Dipole* (IOD adalah fenomena lautan-atmosfer di daerah ekuator Samudera Hindia yang mempengaruhi iklim di Indonesia dan negara-negara lain yang berada di sekitar cekungan/basin Samudera Hindia – pent.) yang menyebabkan suhu permukaan laut lebih tinggi, yang juga terjadi selama krisis kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Bagian terbesar dari wilayah yang terbakar berada di provinsi Kalimantan Tengah, Selatan, dan Barat, di mana hampir 390.000 ha wilayah yang terbakar.

Kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang ditimbulkannya, menyebabkan dampak ekonomi negatif yang signifikan,[10] yang diperkirakan mencapai USD 157 juta dalam kerusakan langsung terhadap aset dan kerugian sebesar USD 5,0 miliar dari kegiatan ekonomi yang terkena dampaknya (Gambar A.9).[11] Angka ini diperkirakan dari, antara lain, sektor infrastruktur, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi, dan lingkungan hidup. Secara gabungan, sektor pertanian dan lingkungan hidup menyumbang lebih dari setengah perkiraan kerugian, karena kebakaran merusak tanaman perkebunan yang berharga dan melepaskan emisi gas rumah kaca yang signifikan ke atmosfer. Lebih lanjut, akibat dari dampak negatif kebakaran hutan dan lahan diprediksi akan muncul setelah triwulan ini, karena produksi komoditas yang terkena dampak seperti tanaman menahun (perennial) dan kayu yang membutuhkan setidaknya 2-5 tahun untuk dapat dipanen. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan akan lebih rendah, masing-masing sebesar 0,09 dan 0,05 poin persentase.

Namun demikian, perkiraan kerugian di atas tidak termasuk dampak jangka panjang dari paparan berulang akibat kabut asap terhadap sumber daya manusia, seperti penyakit pernapasan akut dan penurunan kualitas pendidikan karena kesehatan guru dan siswa terdampak, dan hubungan perdagangan khususnya untuk sektor minyak kelapa sawit, yang menyediakan pekerjaan langsung dan tidak langsung bagi setidaknya 16,2 juta warga Indonesia[12]. Kebakaran dan kabut asap yang berulang juga semakin memperburuk persepsi global negatif terhadap produksi minyak kelapa sawit Indonesia[13] yang telah menyebabkan menurunnya permintaan dari negara-negara Eropa, serta rencana Uni Eropa (UE) untuk menghentikan biofuel berbasis minyak

kelapa sawit pada tahun 2030. Lonjakan aktivitas kebakaran tahun ini tidak mungkin membantu negosiasi bilateral antara Indonesia dan UE melalui Organisasi Perdagangan Dunia.

Gambar A.9: Sektor pertanian, transportasi, perdagangan, dan industri mencatat kerugian ekonomi tertinggi dari kebakaran hutan

(USD juta, tidak termasuk kerugian dari emisi karbon)

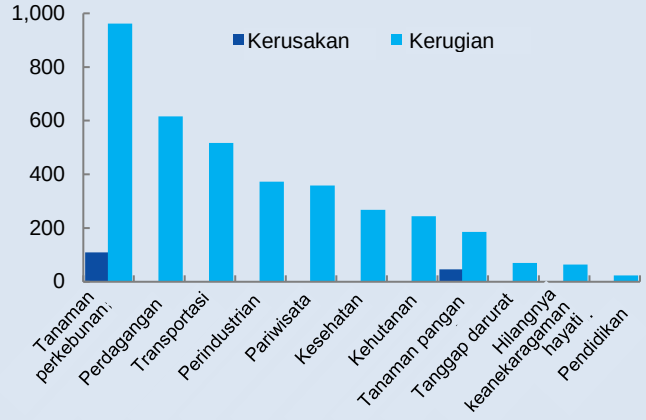

Sumber: Analisis staf Bank Dunia, 2019

Gambar A.10: Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah provinsi yang paling terkena dampak relatif terhadap besaran perekonomiannya

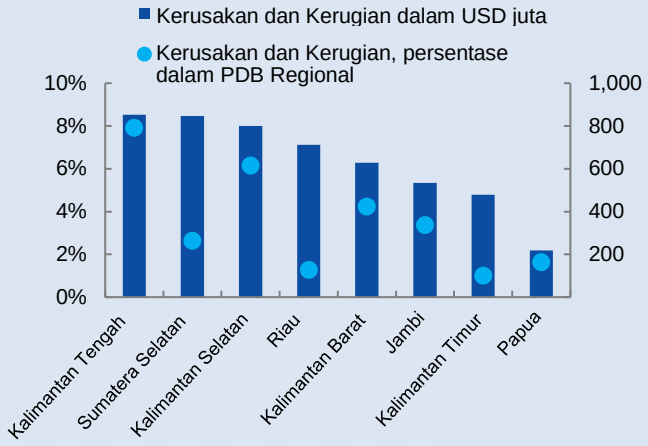

Sumber: Analisis staf Bank Dunia, 2019

Dampak negatif terhadap ekonomi dari kebakaran dan kabut asap bahkan lebih parah di tingkat provinsi.[14] Berdasarkan penilaian awal, pertumbuhan PDB regional di provinsi-provinsi yang terkena dampak dapat menurun dalam kisaran 0,3 hingga 1,5 poin persentase pada tahun 2019, tergantung pada besaran ekonomi dan tingkat besarnya kebakaran setempat. Di luar tahun ini, beberapa efek jangka panjang cenderung bertahan dalam bentuk penurunan konsumsi dan penurunan tingkat investasi. Di antara provinsi-provinsi yang terkena dampak, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang paling menderita, dengan kerugian diperkirakan sebesar 7,9 persen dan 6,1 persen dari PDB regional masing-masing (Gambar A.10). Karena PDB regional delapan provinsi yang terkena dampak membentuk sekitar 18 persen dari PDB nasional, penurunan pertumbuhan PDB regional akibat kebakaran hutan tahun ini kemungkinan akan membebani pertumbuhan PDB nasional.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, seperti kebijakan moratorium untuk menghentikan konversi hutan primer dan lahan gambut, reformasi tenurial untuk mengatasi konflik lahan dan ketidakpastian batas yang mendasarinya, dan target restorasi 2,5 juta hektar lahan gambut yang rusak. Sejak itu, terdapat penurunan sebesar 40-60 persen dalam laju deforestasi pada tahun 2017-2018, serta penurunan wilayah yang terbakar dari tahun 2016 hingga 2017.[15] Namun demikian, hasil positif tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia karena dinamika iklim juga mempengaruhi penyebaran kebakaran.

Sementara itu, analisis spasial pada pola kebakaran telah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditingkatkan lebih lanjut, bahkan setelah memperhitungkan perubahan kondisi iklim. Sebagai contoh, lebih dari 270.000 ha yang terbakar berada di dalam wilayah yang ada di bawah kebijakan moratorium. Demikian pula, lebih dari 320.000 ha yang terbakar berada di dalam dan sekitar wilayah prioritas restorasi lahan gambut, meskipun studi lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami fakta kontrafaktual ini. Kebakaran juga terus terjadi di desa-desa yang sudah teridentifikasi rawan kebakaran lahan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015, serta 400 desa baru. Akhirnya, kurang dari 3 persen dari peta indikatif untuk program redistribusi tanah Pemerintah Indonesia (Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA) mencakup area yang terkena dampak kebakaran lahan tahun ini, menandakan adanya potensi ketidakcocokan dalam menangani masalah kepemilikan lahan yang mendasarinya terkait dengan kebakaran lahan.

Selain itu, penilaian awal oleh pihak berwenang di tingkat lokal menyoroti kombinasi penegakan hukum yang intensif dan kurangnya metode pembukaan lahan alternatif sebagai penyebab meningkatnya kebakaran lahan. Para pelaku pembakaran yang takut melakukan pembakaran di siang hari mulai menyalakan api di malam hari demi menghindari deteksi dan meninggalkan lokasi tanpa melakukan upaya apa pun untuk menahan api, sehingga mengakibatkan kebakaran menyebar. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang tidak terintegrasi dapat mendatangkan hasil yang lebih buruk.

Tantangan yang berkelanjutan dari kebakaran lahan dan bencana kabut asap oleh ulah manusia selama dua dekade terakhir ini tidak hanya membahayakan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga mengikis reputasi dan nilai minyak kelapa sawit, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Oleh karena itu, berinvestasi dalam mentransformasikan ekonomi menuju ke rezim rendah kabut asap harus menjadi prioritas Pemerintah Indonesia selama lima tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan yang harus dipertimbangkan antara lain:

(1) Kebijakan dan program pencegahan kebakaran lahan yang kuat melalui pendalaman implementasi kebijakan moratorium, restorasi, dan penyelesaian kepemilikan lahan saat ini;
(2) Memfokuskan program penyelesaian dan pemulihan tenurial ke 700-1.200 desa rawan kebakaran lahan, dengan intervensi spesifik yang ditetapkan berdasarkan pemetaan perilaku dan risiko kebakaran lahan;
(3) Memberikan status tenurial yang sesuai kepada masyarakat yang bergantung pada lahan untuk memungkinkan dilakukannya layanan penyuluhan publik yang relevan untuk membantu mereka dalam mempraktikkan pembakaran terkendali dan alternatif rendah kabut lainnya;
(4) Penegakan hukum yang ketat dan pemberian disinsentif pasar untuk pengguna lahan komersial yang sengaja menggunakan api untuk merampok tanah negara atau untuk membersihkan lahan perkebunan konsesi mereka;
(5) Revitalisasi lahan gambut yang terlalu kering melalui perbaikan sistem drainase yang dapat berfungsi sebagai penyimpanan air;
(6) Transisi mata pencaharian di masyarakat yang terkena dampak, terutama di lahan gambut, menuju ekonomi lokal berbasis air seperti akuakultur dan layanan berbasis aset sumber daya alam seperti ekowisata;
(7) Meningkatkan skema sertifikasi komoditas berkelanjutan sebagai instrumen untuk memberi sinyal kepada pasar mengenai reformasi yang sedang berlangsung ini menuju arah usaha yang rendah kabut dan rendah karbon.

[1] Analisis dampak kebakaran hutan Riau 2014 dan Indonesia 2015 juga tersedia di Bank Dunia (2014) dan Bank Dunia (2015).
[2] Provinsi yang rawan kebakaran meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat
[3] BNPB (2019) melalui CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190923160933-20-433052/penderita-ispa-akibat-karhutla-tembus-919-ribu-orang. Lebih dari 60 persen berada di Riau dan Sumatera Selatan.
[4] Perkiraan Penilaian Kerusakan dan Kerugian mencakup wilayah-wilayah yang terbakar hingga 3 November 2019 untuk Sumatera Selatan dan hingga akhir September untuk tujuh provinsi lainnya, dihitung berdasarkan data penginderaan jauh. PDB tahun 2019 diperkirakan berdasarkan data historis.
[5] Berdasarkan perkiraan PDB tahun 2019.
[6] Bank Dunia (2015).
[7] *The Copernicus Atmosphere Monitoring Service* (CAMS) memperkirakan bahwa emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan Indonesia setidaknya 708 mtCO2e, hampir dua kali lipat perkiraan emisi dari kebakaran Amazon Brasil sebesar 366 mtCO2e. Nicholas, Hans, "*Indonesia fires emitted double the carbon of Amazon fires, research shows*", Mongabay, 25 November 2019
[8] Data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019).
[9] Meskipun El Niño tahun ini lebih moderat dibandingkan dengan tahun 2015.
[10] Analisis ini menggunakan metodologi penilaian bencana yang dikembangkan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (*UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean*, ECLAC). Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi adalah merupakan proksi dari kerusakan, sedangkan kerugiannya mewakili penurunan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang timbul pada bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya sebagai akibat dari bencana. Silakan lihat ECLAC (2014) untuk rincian lebih lanjut.
[11] Kerusakan didefinisikan sebagai rusaknya aset fisik selama terjadinya peristiwa bencana (diukur dalam satuan fisik dan dinilai berdasarkan biaya penggantian). Kerugian didefinisikan sebagai perubahan arus ekonomi yang terjadi setelah peristiwa alam, dan selama periode waktu yang relatif lebih lama (dinilai berdasarkan harga saat ini).
[12] GAPKI (2019).
[13] Ekspor minyak kelapa sawit sejumlah 16,5 miliar dolar AS dan berkontribusi sebesar 10,3 persen dari total ekspor non-migas pada tahun 2018.
[14] Mencakup wilayah yang terbakar di provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
[15] WRI, 2018 (*dataset Global Forest Watch*, https://www.wri.org/blog/2018/08/indonesias-deforestation-dropped-60-percent-2017-theres-more-do)

2. Defisit neraca transaksi berjalan menyempit sementara surplus neraca transaksi modal dan finansial melebar

Ekspor barang terus menyusut, sebagian karena harga komoditas yang lebih rendah dan faktor dalam negeri

Surplus perdagangan barang meningkat secara signifikan menjadi USD 1,3 miliar dari USD 0,5 miliar di Triwulan ke-2. Sejalan dengan menurunnya perdagangan global,[10] harga komoditas yang lebih rendah, dan faktor domestik, nilai ekspor barang Indonesia menyusut lebih lanjut sebesar 8,5 persen yoy di Triwulan ke-3 setelah turun 8,1 persen di Triwulan ke-2 (Gambar A.11)[11]. Kontraksi ekspor barang terjadi secara umum, terutama karena harga komoditas ekspor utama Indonesia yang lemah,[12] yang turun 22,5 persen di Triwulan ke-3[13] (Kotak A.2). Nilai ekspor migas, batubara, komoditas olahan[14], serta tekstil, pakaian dan alas kaki yang lebih rendah sebagian diimbangi oleh nilai ekspor yang lebih tinggi dari kendaraan bermotor, komputer, furnitur, dan barang-barang yang terbuat dari emas[15].

Gambar A.11: Ekspor barang terus memburuk…

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

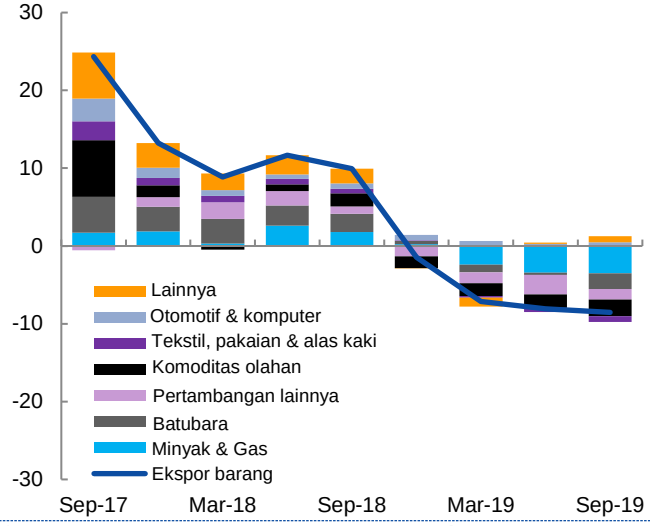

Sumber: Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

Produk minyak dan ekspor minyak sawit mendapat tekanan sebagian karena faktor dalam negeri

Volume ekspor hampir semua komoditas utama Indonesia mengalami kontraksi di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan Triwulan ke-2, karena kombinasi dari permintaan global yang lebih lemah dan faktor dalam negeri. Di antara komoditas energi, volume ekspor migas mengalami kontraksi sebesar 39,5 persen pada Triwulan ke-3 sedikit lebih rendah dari kontraksi sebesar 44,6 persen pada Triwulan ke-2, sebagai hasil gabungan dari beberapa faktor: menipisnya lading-ladang gas dan kurangnya proyek-proyek hulu yang baru, transisi dari operator kunci blok ke Pertamina, memprioritaskan penggunaan minyak mentah untuk permintaan dalam negeri[16], dan permintaan global yang lebih lemah. Meskipun standar emisi lebih ketat di Eropa dan Tiongkok, ekspor batubara meningkat 4,0 persen di Triwulan ke-3, lebih lambat dari kenaikan sebesar 10,9 persen di Triwulan ke-2, sebagian didukung oleh permintaan dari India untuk program elektrifikasi yang cepat.[17]

[10] Aktivitas perdagangan global tetap lemah di Triwulan ke-3 termasuk di negara-negara Asia Timur dan Pasifik (*East Asia Pacific Economic Update*, Oktober 2019) dengan pertumbuhan ekspor dan impor yang menurun di sebagian besar negara-negara besar.
[11] Hal ini mempertegas total ekspor dalam neraca nasional yang mengalami kontraksi sebesar 9,1 persen di Triwulan ke-3 setelah turun sebesar 5,4 persen di Triwulan ke-2.
[12] Harga ekspor komoditas utama Indonesia, yang meliputi batubara, minyak mentah, minyak kelapa sawit, karet, dan logam dasar. Lihat Kotak A.2.
[13] Dihitung dengan menggunakan data nilai dan volume ekspor dari BPS.
[14] Kategori komoditas olahan antara lain kayu, minyak sawit, logam tidak mulia, dan karet. Kategori 'barang manufaktur lainnya' antara lain kertas, bahan kertas, furnitur, plastik, makanan olahan, bahan kimia, dan barang-barang lainnya.
[15] Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Q3 2019
[16] Lihat Kotak A.2 dari Bank Dunia (2019b).
[17] Quartz India (September 2019).

Ekspor karet dan minyak sawit mengalami kontraksi sementara ekspor logam sebagian cerah karena ekspor nikel yang tinggi

Untuk komoditas non-energi, volume ekspor karet tetap berada di wilayah kontraksi, sebagian karena kebijakan pemotongan ekspor yang dideklarasikan oleh produsen karet alam utama dunia pada akhir triwulan pertama, dalam upaya untuk menjaga harga komoditas ini.[18] Demikian pula, volume minyak sawit yang diekspor mengalami kontraksi sebesar 3,0 persen, yang disebabkan oleh adanya hambatan dari Uni Eropa yang membatasi penggunaan minyak sawit dalam *biofuel*[19] dan kebijakan Pemerintah untuk menahan sebagian produksi minyak sawit untuk digunakan di pasar dalam negeri sebagai masukan untuk industri biodiesel (B20)[20]. Ekspor logam meningkat pesat sebesar 43,6 persen yoy di Triwulan ke-3, dibandingkan dengan kenaikan sebesar 35,9 persen pada triwulan sebelumnya, sebagian disebabkan oleh kegiatan ekspor nikel yang dilakukan di awal-awal tahun sehubungan dengan pengenaan awal larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah[21] (Gambar A.12).

Mengingat data harga dan volume ekspor yang ada dari sebagian besar komoditas utama lebih lemah, nilai ekspor semua komoditas mengalami kontraksi di Triwulan ke-3 (Gambar A.13). Meskipun demikian, volume ekspor logam dan batubara yang lebih tinggi membantu menahan penurunan nilai ekspor kedua komoditas ini, menurunkan kontraksi rata-rata nilai ekspor dari 30,1 persen yoy di Triwulan ke-2 menjadi 18,9 persen di Triwulan ke-3.

Gambar A.12: Volume ekspor batubara dan logam naik sementara ekspor komoditas utama lainnya turun
(indeks volume ekspor, 3 mma, January 2018 = 100)

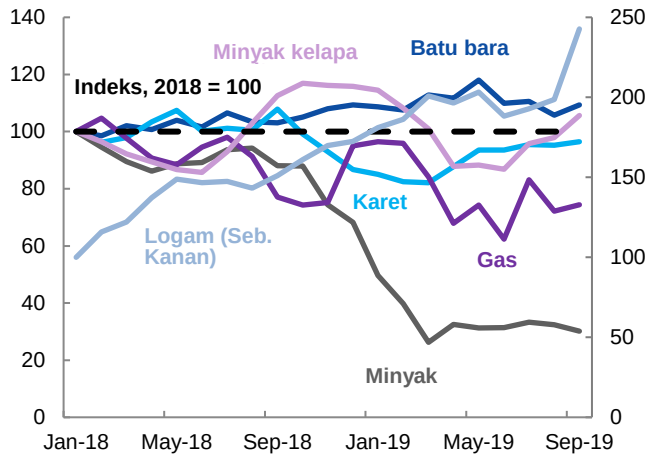

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: Semua data kecuali data untuk minyak sawit adalah data ekspor BPS oleh SITC 2. Batubara mengacu pada batubara, kokas, dan briket; karet mengacu pada karet mentah; minyak mengacu pada minyak mentah; gas mengacu pada gas alam (dicairkan dan tidak); logam mengacu pada bijih logam dan besi bekas. Minyak kelapa sawit menggunakan klasifikasi HS8.

Gambar A.13: Harga komoditas utama melemah dibandingkan tahun lalu, kecuali karet
(pertumbuhan yoy, perubahan persentase di Triwulan ke-3 2019)

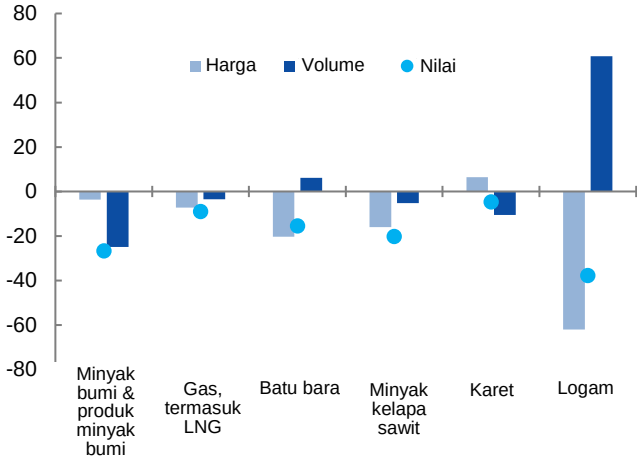

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: Harga adalah harga yang diperoleh dari nilai dan volume ekspor oleh SITC 2 digit dari BPS. Harga tersebut adalah proksi dari harga yang diterima oleh eksportir (biasanya telah disepakati sebelum pengambilan data — yang tipikal dalam ekspor komoditas dan transaksi impor). Logam mengacu pada bijih logam dan besi bekas.

[18] Dewan Karet Tripartit Internasional (*International Tripartite Rubber Council*, ITRC), yang terdiri dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia, sepakat pada bulan Maret untuk menerapkan pembatasan ekspor karet sejumlah sekitar 240.000 ton selama empat bulan dalam upaya untuk menjaga harga karet, lihat Reuters (19 Agustus 2019). Kebijakan ini tampaknya telah mencapai tujuan yang diharapkan karena harga karet alam meningkat 8,5 persen pada Triwulan ke-2 2019.
[19] Nikkei Asian Review (27 Agustus, 2019).
[20] Data dari GAPKI menunjukkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri antara Januari-Agustus 2019 meningkat sebesar 41,7 persen yoy, dibandingkan dengan 14,7 persen pada periode yang sama tahun lalu
[21] Bisnis (8 Oktober 2019).

…dan impor barang semakin menurun, karena permintaan investasi melemah

Nilai impor barang merosot 12,0 persen yoy di Triwulan ke-3 dari penurunan sebesar 8,6 persen di Triwulan ke-2[22], dengan kontraksi meluas di antara berbagai kategori ekonomi. Impor bahan baku mengalami kontraksi lebih cepat sementara impor barang konsumsi dan barang modal mengalami kontraksi yang lebih lambat (Gambar A.14)[23]. Selain kebijakan B20 yang membebani impor minyak mentah dan produk-produk minyak, pertumbuhan investasi yang lebih lemah (Bagian A1) berkontribusi pada menurunnya impor bahan baku dan barang modal. Nilai impor barang konsumsi dipengaruhi secara negatif oleh kenaikan tarif impor untuk barang-barang konsumsi tertentu[24].

Gambar A.14: Impor barang mengalami kontraksi lebih lanjut di semua kategori
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)

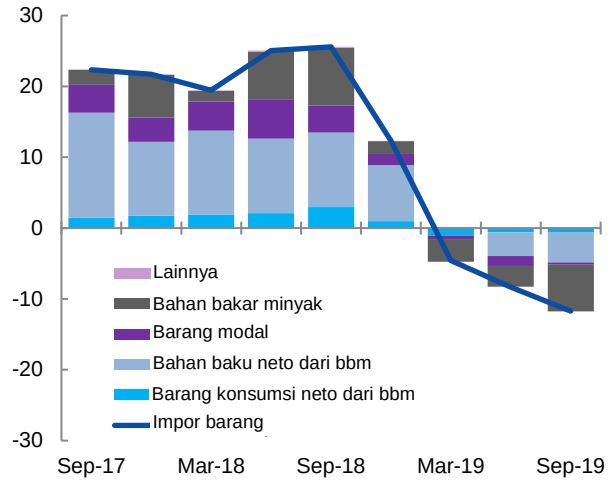

Sumber: Bank Indonesia; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.15: Defisit transaksi berjalan menyempit dengan surplus perdagangan barang yang lebih besar
(USD miliar)

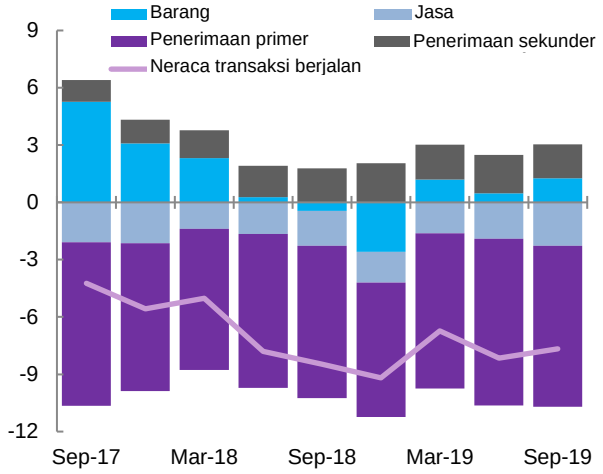

Sumber: Bank Indonesia; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

Defisit transaksi berjalan menyempit karena surplus perdagangan barang yang lebih tinggi dan defisit penerimaan yang lebih rendah

Defisit transaksi berjalan menyusut menjadi USD 7,7 miliar di Triwulan ke-3 dari USD 8,2 miliar di Triwulan ke-2. Hal ini disebabkan oleh surplus perdagangan barang yang secara signifikan lebih luas dan defisit penerimaan yang lebih kecil yang secara bersama-sama melebihi defisit perdagangan jasa yang lebih besar (Gambar A.15). Menggunakan penjumlahan empat triwulan bergulir (*four-quarter rolling sum*), defisit transaksi berjalan menyempit menjadi 2,9 persen dari PDB di Triwulan ke-3 dari 3,1 persen dari PDB selama dua triwulan pertama tahun ini. Surplus perdagangan barang melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 1,3 miliar dolar AS pada Triwulan ke-3, sebagian didorong oleh penurunan tajam dalam impor minyak, terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk memperluas kapasitas kilang minyak untuk menghasilkan biofuel dalam negeri dan membatasi impor bahan bakar minyak olahan[25,26]. Defisit penerimaan yang lebih sempit didorong oleh pola musiman pembayaran dividen yang lebih rendah dan pembayaran bunga layanan pada utang luar negeri. Sebaliknya, defisit perdagangan jasa melebar di Triwulan

[22] Hal ini mempertegas total ekspor dalam neraca nasional yang mengalami kontraksi sebesar 12,5 persen di Triwulan ke-3 setelah jatuh 4,6 persen di Triwulan ke-2.
[23] Bahan baku mengalami kontraksi sebesar 7,6 persen di Triwulan ke-3 (Triwulan ke-2: -5,8 persen di Triwulan ke-2), barang konsumsi mengalami kontraksi sebesar 6,3 persen di Triwulan ke-3 (Triwulan ke-2: 6,5 persen), barang modal mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (Triwulan ke-2: -8,7 persen).
[24] Sejak September 2018, pemerintah telah mengenakan tarif impor sebesar 2,5–7,5 persen untuk 1.147 barang konsumsi. Lihat Kotak A.2, Bank Dunia (2019b).
[25] Langkah-langkah pemerintah untuk mengendalikan impor dengan mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan barang-barang impor, kebijakan Biodiesel 20, dan amanat bagi kontraktor bagi hasil untuk menjual minyak mentah ke Pertamina. Lihat Kotak A.2, Bank Dunia (2019b).
[26] Lihat Kotak A.2, Bank Dunia (2019b).

ke-3 menjadi USD 2,3 miliar dari USD 1,9 miliar di Triwulan ke-2, yang disebabkan oleh defisit yang lebih besar dalam jasa transportasi karena meningkatnya biaya layanan pengiriman barang impor dan semakin banyak orang Indonesia yang pergi ke luar negeri[27].

Surplus neraca finansial melebar oleh karena adanya arus masuk portofolio yang lebih besar dan arus keluar investasi lainnya yang lebih kecil

Surplus neraca transaksi finansial naik menjadi USD 7,6 miliar di Triwulan ke-3 dari USD 6,5 miliar di Triwulan ke-2, didorong oleh meningkatnya investasi portofolio dan arus keluar yang lebih kecil dari investasi lain-lain, yang sebagian diimbangi oleh investasi langsung bersih yang lebih lemah (Gambar A.16). Investasi langsung bersih turun dari USD 5,4 miliar di Triwulan ke-2 menjadi USD 4,8 miliar sebagian didorong oleh arus masuk untuk pembangunan jalan tol dari investor asing. Investasi langsung bersih sebesar 1,7 persen dari PDB masih tidak cukup untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan. Sementara itu, arus keluar yang lebih kecil sebesar USD1,1 miliar terjadi di investasi lain-lain di Triwulan ke-3 dari USD3,5 miliar di Triwulan ke-2, yang didorong oleh arus masuk bersih dalam kewajiban sektor swasta, khususnya dari penarikan pinjaman perusahaan.

Arus portofolio meningkat sebagian didorong oleh penerbitan *global bonds* (obligasi global) perusahaan energi

Sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang mendorong arus modal global ke negara-negara pasar berkembang dengan fundamental yang baik, termasuk Indonesia, karena investor mencari imbal hasil (*yield*), arus portofolio meningkat menjadi USD 4,8 miliar di Triwulan ke-3 dari USD 4,6 miliar di triwulan sebelumnya, yang sebagian besar didukung oleh penerbitan obligasi global perusahaan di sektor energi[28]. Namun demikian, arus masuk utang yang lebih tinggi tersebut sebagian diimbangi oleh arus keluar ekuitas di pasar modal (Gambar A.17).[29] Sementara arus keluar ekuitas terus berlanjut di bulan Oktober dan November, arus masuk portofolio dari obligasi Pemerintah melonjak di bulan Oktober sebagian karena adanya sentimen positif setelah Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet yang baru.

Gambar A.16: Surplus neraca transaksi modal dan finansial melebar, sebagian didorong oleh investasi portofolio yang besar
(*USD miliar*)

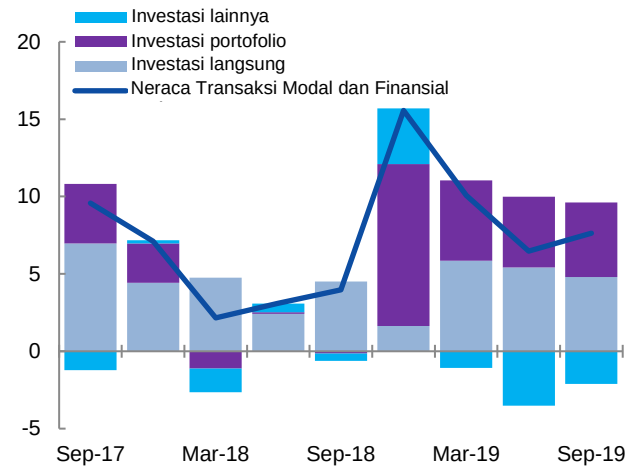

Sumber: Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.17: ...yang didorong oleh pembelian obligasi Perintah oleh investor asing…
(*USD miliar*)

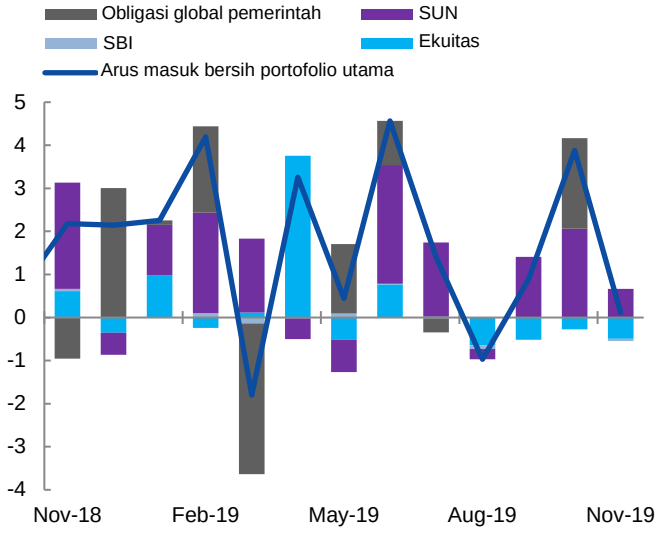

Sumber: Bank Indonesia; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

[27] Biaya pengiriman meningkat di Triwulan ke-3 menjadi USD 1,9 miliar, naik dari USD 1,8 miliar di Triwulan ke-2, karena impor barang meningkat. Selain itu, musim ibadah haji ke Mekah jatuh pada bulan Agustus 2019, di mana sekitar 220.000 orang Indonesia ikut serta.
[28] Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan ke-3 2019, lihat Bank Indonesia (8 November 2019).
[29] Sejalan dengan turunnya indeks komposit Indonesia yang ditutup pada 6.168 di akhir September, turun dari 6.359 di akhir Juni 2019.

Investasi langsung luar negeri (*Foreign Direct Investment*, FDI) secara umum stabil sebesar 2,0 persen dari PDB di Triwulan ke-3

FDI secara umum stabil sebesar USD 5,7 miliar di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan USD 5,8 miliar di Triwulan ke-2 (Gambar A.18). Aliran FDI yang sedikit lebih kecil ini dihasilkan dari investasi yang lebih kecil ke sektor pertambangan, galian, dan intermediasi keuangan. Sektor manufaktur tetap menjadi tujuan utama aliran FDI[30], diikuti oleh sektor perdagangan grosir dan eceran serta sektor pertanian, dengan tiga sektor tersebut menyumbang 82,2 persen dari total arus FDI.

Gambar A.18: ...dengan FDI yang tetap moderat
(USD miliar)

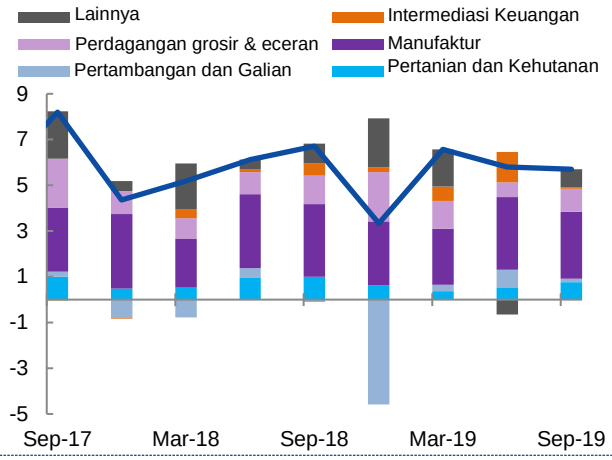

Sumber: Bank Indonesia; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

Neraca pembayaran (*Balance of Payments*, BOP) Indonesia membaik di Triwulan ke-3 2019 karena defisit neraca transaksi berjalan menyempit dan surplus neraca transaksi finansial meningkat

Dengan defisit neraca transaksi berjalan yang lebih sempit dan surplus neraca transaksi finansial yang lebih lebar, defisit Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*, BOP) menyusut menjadi USD 46 juta di Triwulan ke-3 dari USD 2,0 miliar (Tabel A.1). Namun demikian, cadangan internasional Indonesia meningkat dari USD 123,8 miliar di akhir bulan Juni 2019 menjadi USD 124,3 miliar di akhir bulan September 2019, cukup untuk membiayai pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan impor selama 6,9 bulan.

Tabel A.1: Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*, BOP) Indonesia
(USD miliar kecuali dinyatakan lain)

	2018	T3-2018	T4-2018	T1-2019	T2-2019	T3-2019
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	(7,1)	(4,4)	5,4	2,4	(2,0)	(0,05)
Sebagai persen dari PDB	(0,7)	*(1,7)*	*2,1*	*0,9*	*(0,7)*	*(0,0)*
Sebagai persen dari PDB, jumlah bergulir selama empat triwulan	(0,7)	*(1,1)*	*(0,7)*	*(0,1)*	*0,1*	*0,5*
Neraca Transaksi Berjalan	(30,5)	(8,5)	(9,2)	(6,7)	(8,2)	(7,7)
Sebagai persen dari PDB	(2,9)	*(3,2)*	*(3,6)*	*(2,5)*	*(2,9)*	*(2,7)*
Sebagai persen dari PDB, jumlah bergulir selama empat triwulan	(2,9)	*(2,6)*	*(2,9)*	*(3,1)*	*(3,1)*	*(2,9)*
Neraca perdagangan barang	(0,4)	(0,5)	(2,6)	1,2	0,5	1,3
Neraca perdagangan jasa	(6,5)	(1,8)	(1,6)	(1,6)	(1,9)	(2,3)
Penerimaan	(23,6)	(6,2)	(5,0)	(6,3)	(6,7)	(6,6)
Neraca Transaksi Modal dan Finansial	24,9	4,0	15,6	10,1	6,5	7,6
Sebagai persen dari PDB	*2,4*	*1,5*	*6,1*	*3,8*	*2,3*	*2,7*
Sebagai persen dari PDB, jumlah bergulir selama empat triwulan	2,4	*1,6*	*2,4*	*3,1*	*3,4*	*3,6*
Investasi Langsung	13,3	4,5	1,6	5,8	5,4	4,8
Investasi Portofolio	9,3	(0,1)	10,5	5,2	4,6	4,8
Investasi Lainnya	2,2	(0,5)	3,6	(1,1)	(3,5)	(2,1)

Sumber: Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

[30] Investasi langsung ke sektor manufaktur didorong oleh kegiatan di sektor otomotif dan elektronik.

Dengan arus masuk modal yang stabil, Rupiah menguat dan imbal hasil obligasi menurun

Dengan arus masuk modal yang lebih kuat, Rupiah terapresiasi secara nominal terhadap Dolar AS dengan rata-rata sebesar 0,9 persen di Triwulan ke-3, dibandingkan dengan penurunan sebesar 0,9 persen di Triwulan ke-2. Performa Rupiah juga lebih baik dibandingkan mata uang negara-negara berkembang lainnya, dengan EMCI JP Morgan yang terdepresiasi sebesar 1,1 persen di Triwulan ke-3. Secara efektif riil[31], Rupiah juga telah menguat paling besar di antara negara-negara sebanding di Asia Timur dan Pasifik, naik 3,1 persen pada Triwulan ke-3, dan 5,7 persen jika dihitung dari awal tahun (*year-to-date*). Sehubungan dengan meningkatnya minat investor, imbal hasil obligasi pemerintah (Surat Utang Negara, SUN) untuk seluruh tenor juga terus menurun di Triwulan ke-3, setelah sempat naik sesaat di bulan Mei karena meningkatnya ketidakpastian seputar ketegangan perdagangan AS-Tiongkok.

Bank Indonesia memulai siklus pelonggaran kebijakan monter untuk mendukung investasi dan pertumbuhan

Arus masuk modal yang stabil dan inflasi yang jinak (Bagian A.3) telah memberikan ruang yang diperlukan bagi BI untuk memulai siklus pelonggaran kebijakan moneter. BI menurunkan *7-Day Reverse Repo Rate* sebesar 100 basis poin secara kumulatif dalam empat kali Rapat Dewan Gubernur berturut-turut, dari 6,00 persen pada bulan Juni menjadi 5,00 persen pada bulan Oktober, untuk mendukung pertumbuhan.[32] Penurunan suku bunga ini dimaksudkan untuk memacu aktivitas ekonomi dalam negeri mengingat adanya perlambatan ekonomi global.[33]

Kotak A.2: Harga komoditas terus menurun di Triwulan ke-3

Harga komoditas global terus menurun di Triwulan ke-3. Harga komoditas internasional terus turun di Triwulan ke-3 tahun 2019, dengan indeks harga Energi dan indeks Non-energi Bank Dunia yang menurun (Gambar A.19). Harga energi global mengalami kontraksi lebih lanjut di Triwulan ke-3 yakni sebesar 21,2 persen yoy, hampir dua kali lipat dari kontraksi di Triwulan ke-2, sebagian besar didorong oleh harga gas dan batubara yang lebih rendah karena permintaan global menyusut di tengah pasokan yang cukup. Harga rata-rata batubara dan gas alam internasional di Triwulan ke-3 masing-masing 15,7 dan 37,7 persen lebih rendah dibanding pada Triwulan ke-2. Sementara itu, harga rata-rata minyak mentah tercatat sebesar USD 59,8/barel di Triwulan ke-3, 8,2 persen lebih rendah daripada di Triwulan ke-2. Pada saat yang sama, harga komoditas non-energi juga menurun, terutama untuk logam dasar dan bijih besi, karena meningkatnya kekhawatiran mengenai ketegangan perdagangan dan pulihnya hambatan pasokan.[1] Sebagian besar harga komoditas pertanian juga turun di Triwulan ke-3, karena stok global yang melimpah dan revisi ke atas dari ekspektasi produksi.[2]

Perlambatan ekonomi global dan penjualan kendaraan bermotor yang memburuk membebani harga komoditas ekspor utama Indonesia. Kontraksi harga komoditas ekspor utama Indonesia di Triwulan ke-3 terutama lebih parah untuk batubara dan minyak mentah, yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 42,0 dan 18,2 persen yoy, dibandingkan dengan 22,9 dan 8,9 persen di Triwulan ke-2. Hal ini didorong oleh perlambatan aktivitas ekonomi global, standar emisi yang lebih ketat di Eropa dan Tiongkok, dan penjualan kendaraan bermotor global yang memburuk.[3] Sebaliknya, harga LNG tetap relatif stabil didorong oleh berlanjutnya permintaan yang tinggi dari Jepang, di mana cuaca sangat panas berlangsung lebih lama sehingga mendorong permintaan gas (Gambar A.20).[4]

Di antara komoditas non-energi, harga minyak kelapa sawit mengalami kontraksi lebih rendah di Triwulan ke-3 dibandingkan triwulan sebelumnya karena permintaan berkelanjutan dari Tiongkok dan India, serta permintaan untuk biodiesel di Indonesia, sementara pertumbuhan produksi global melambat.[5] Harga untuk logam dasar tetap lemah di Triwulan ke-3 karena kombinasi permintaan industri global yang lemah, ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan pulihnya kendala pasokan di Brasil dan Tiongkok. Meskipun demikian, kontraksi di Triwulan ke-3 ditopang oleh lonjakan harga nikel, karena pengenaan larangan ekspor bijih nikel oleh otoritas Indonesia yang tidak diantisipasi sebelumnya.[6] Sebaliknya, harga karet meningkat hanya 6,5 persen di Triwulan ke-3 dari pertumbuhan sebesar 8,5 persen di Triwulan ke-2, karena permintaan berkurang akibat penurunan produksi kendaraan bermotor di Uni Eropa.[7]

[31] Nilai tukar efektif riil (*real effective exchange rate*) didasarkan pada rata-rata tertimbang perdagangan nilai tukar bilateral dan disesuaikan dengan harga konsumen.
[32] BI menurunkan suku bunga kebijakan pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober masing-masing sebesar 25 bps, sampai mencapai 5,00 persen di bulan Oktober, kemudian ditahan di bulan November.
[33] Terlepas dari penurunan satu poin persentase secara kumulatif ini, tingkat pinjaman rata-rata secara umum tetap stabil. Suku bunga pinjaman yang diperhitungkan adalah untuk pinjaman konsumsi, modal kerja, dan pinjaman investasi. Pinjaman modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur, misal, pinjaman properti atau agribisnis; pinjaman investasi adalah kredit jangka menengah dan panjang untuk membeli barang modal dan jasa yang diperlukan untuk bisnis atau proyek baru. Selain itu, pertumbuhan kredit menurun tajam ke rata-rata 8,8 persen yoy di Triwulan ke-3 dari 10,7 persen di Triwulan ke-2.

Gambar A.19: Indeks energi dan non-energi global turun di Triwulan ke-3, melanjutkan tren yang dimulai pada tahun 2018

(indeks harga, berdasarkan nominal USD, Januari 2018 =100)

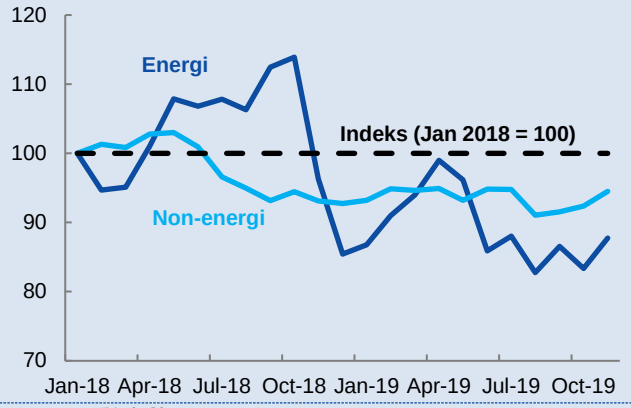

Sumber: *Pink Sheet* Bank Dunia, perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: Harga energi global mencakup indeks harga untuk: batubara Australia; Gas alam cair Eropa, AS, dan Jepang; dan rata-rata minyak mentah. Harga non-energi global termasuk indeks harga untuk: pertanian, pupuk, logam dan mineral, dan logam mulia.

Gambar A.20: Harga LNG, CPO, dan logam dasar tetap stabil sementara harga komoditas utama lainnya turun

(indeks harga, Januari 2018 = 100)

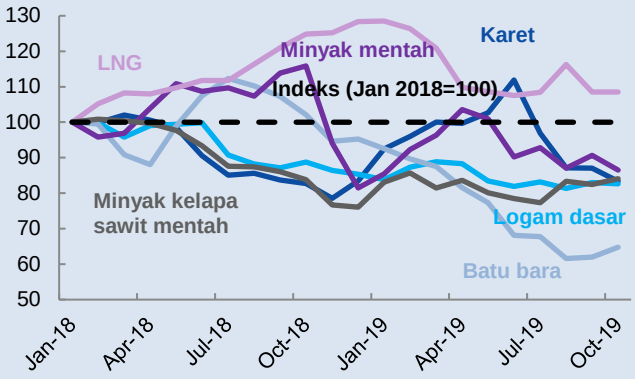

Sumber: *Pink Sheet* Bank Dunia, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: LNG adalah singkatan dari Liquefied Natural Gas; CPO adalah singkatan dari Crude Palm Oil; Logam tidak termasuk bijih besi.

[1] Pasokan alumina dengan cepat pulih kembali di Triwulan ke-3 tahun 2019 ketika pabrik pengilangan alumina di Brasil kembali beroperasi, dan karena hilangnya dampak dari tumpahan lumpur di distrik penghasil utama Tiongkok. Sementara itu, sebagai dampak dari kecelakaan bendungan Vale di Brasil mereda, pasokan bijih besi juga pulih kembali (Bank Dunia, 2019a).
[2] Bank Dunia (2019a).
[3] Penjualan kendaraan bermotor global mengalami kontraksi sebesar 7,6 persen di Triwulan ke-2, dibandingkan dengan kontraksi sebesar 5,2 persen di Triwulan ke-1 tahun 2019. Sementara itu, penjualan bermotor di Tiongkok masing-masing turun sebesar 8,7 dan 4,5 persen di Triwulan ke-3 dan Triwulan ke-2 (Bloomberg, 28 Oktober 2019).
[4] CNBC (23 Agustus 2019).
[5] Mongabay (23 Agustus 2019).
[6] Bloomberg (28 Oktober 2019).
[7] Prospek Pasar Komoditas (*Commodity Markets Outlook*). Bank Dunia (Oktober 2019).

3. Inflasi makanan naik sementara di Triwulan ke-3

Inflasi IHK meningkat di Triwulan ke-3 karena inflasi yang lebih tinggi terjadi pada harga bahan makanan dan emas

Inflasi IHK mencapai rata-rata sebesar 3,4 persen yoy di Triwulan ke-3 tahun 2019 (Triwulan ke-2: 3,1 persen; Gambar A.21) terutama karena kenaikan harga bahan makanan dan emas. Harga bahan makanan yang lebih tinggi muncul karena musim kemarau yang lebih panjang terkait El Nino tahun ini. Selain itu, setelah pengalami periode kenaikan harga yang rendah belakangan ini, kenaikan yang lebih tinggi terjadi pada harga emas[34] dan biaya pendidikan, dimana inflasi inti, tidak termasuk kelompok barang yang perkembangan harganya bergejolak dan barang yang harganya diatur oleh Pemerintah, naik sedikit dari 3,1 persen yoy di Triwulan ke-2 ke rata-rata 3,3 persen di Triwulan ke-3, yang tertinggi sejak Triwulan ke-1 tahun 2017 (Gambar A.22).

Inflasi harga barang-barang yang harganya diatur Pemerintah turun di

Sementara itu, inflasi harga barang-barang yang harganya diatur Pemerintah terus menurun dari rata-rata 2,8 persen yoy di Triwulan ke-2 menjadi 2,0 persen di Triwulan ke-3, mengikuti deflasi harga energi dalam negeri dengan rata-rata 0,1 persen di Triwulan ke-3 dari 0,6 persen di Triwulan ke-2. Selain itu, terjadi penurunan inflasi biaya transportasi, yang sebagian disebabkan

[34] Harga emas memiliki bobot yang relatif besar dalam kelompok inflasi inti atau sekitar 1,4 persen dari total kelompok inflasi IHK. Harga emas telah meningkat dengan cepat sejak bulan Juni 2019, melonjak rata-rata 19,1 persen yoy hingga mencapai rata-rata USD 1.475/ons di Triwulan ke-3 tahun 2019, setelah menurun rata-rata 0,8 persen di Triwulan ke-2.

Triwulan ke-3 mengikuti deflasi harga energi

oleh pengumuman Pemerintah baru-baru ini yang mendorong maskapai penerbangan menyediakan potongan harga selama musim liburan.[35]

Gambar A.21: Inflasi IHK naik sedikit di Triwulan ke-3 tahun 2019 karena inflasi yang lebih tinggi dari harga bahan makanan dan emas
(perubahan yoy, persen; pengamatan terakhir November 2019)

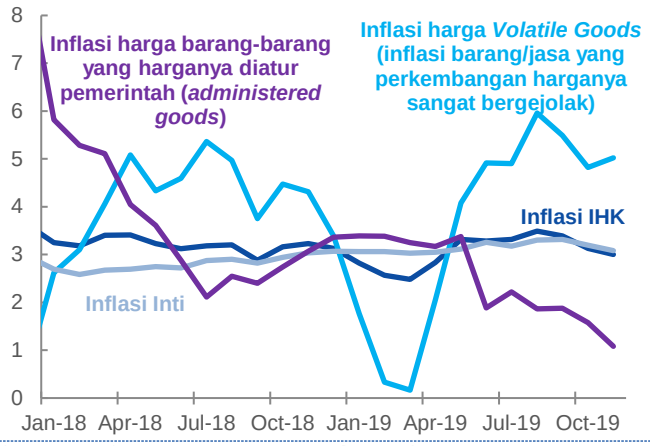

Gambar A.22: Biaya pendidikan tinggi berkontribusi pada peningkatan inflasi inti di Triwulan ke-3 tahun 2019
(perubahan yoy, persen; pengamatan terakhir November 2019)

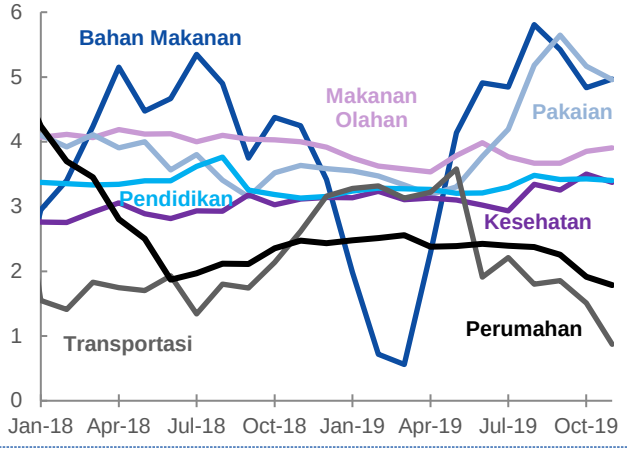

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia. Catatan: Emas masuk dalam kelompok barang-barang sandang

Inflasi di bulan November 2019 terus menurun karena inflasi inti dan inflasi harga barang-barang yang harganya diatur Pemerintah menurun

Inflasi IHK terus menurun dari 3,1 persen di bulan Oktober menjadi 3,0 persen di bulan November, karena inflasi inti dan inflasi harga barang-barang yang harganya diatur Pemerintah menurun. Inflasi inti turun menjadi 3,1 persen di bulan November dari 3,2 persen di bulan Oktober didorong oleh inflasi yang lebih rendah di perumahan dan pakaian. Inflasi harga barang-barang yang harganya diatur Pemerintah juga turun dari 1,6 persen di bulan Oktober menjadi 1,1 persen di bulan November, karena deflasi harga energi dalam negeri bertahan dan inflasi biaya transportasi turun, sebagian karena turunnya harga tiket pesawat.

4. Harga komoditas dan impor yang turun mengakibatkan penurunan pertumbuhan realisasi penerimaan dan belanja

Pertumbuhan penerimaan dan belanja Pemerintah yang menurun sebagian disebabkan oleh efek tahun dasar yaitu pertumbuhan yang tinggi dari realisasi penerimaan dan belanja di tahun lalu

Setelah mencapai level tertinggi selama sebelas tahun sebesar 23,0 persen yoy tahun lalu, yang didukung oleh kenaikan siklus harga komoditas dan dampak reformasi pajak, peertumbuhan total realisasi penerimaan Pemerintah adalah sebesar 1,7 persen tahun-ke-Oktober tahun ini, didorong oleh efek tahun dasar yang tinggi (pada bulan yang sama), dan penurunan siklus dengan harga komoditas yang lebih rendah dan impor yang berkontraksi, yang membebani pendapatan pajak dan bukan pajak. Sebagian karena efek tahun dasar yang tinggi di tahun 2018, pertumbuhan total belanja Pemerintah juga lebih lemah, mencapai kurang dari setengah dari kenaikan yang tertinggi selama lima tahun terakhir di tahun 2018. Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai yang diimbangi dengan adanya kontraksi di belanja modal dan belanja subsidi. Secara keseluruhan, defisit fiskal diperkirakan akan mencapai 2,2 persen dari PDB pada 2019, masih jauh di bawah ambang defisit 3,0 persen dari PDB.

[35] CNN Indonesia (23 September 2019).

Pada bulan Oktober 2019, peningkatan penerimaan melambat tajam, terutama karena penurunan pemungutan PPn/PPnBM dan penerimaan terkait Migas

Total peningkatan penerimaan anjlok menjadi 1,7 persen yoy selama 10 bulan pertama tahun 2019, setelah mencapai 23,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (Gambar A.23).[36] Hasil penerimaan yang lemah ini sebagian disebabkan oleh efek tahun dasar yang tinggi (untuk bulan yang sama), harga komoditas yang menurun h (Bagian A2), impor yang mengalani kontraksi (Bagian A1), dan juga perubahan kebijakan.[37] Sebagai akibat dari harga komoditas yang menurun ini, penerimaan terkait Migas, termasuk penerimaan pajak penghasilan Migas dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam, mengalami kontraksi sebesar 10,0 persen. Selain itu, penurunan volume impor menyebabkan menurunnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN/PPnBM), yang turun sebesar 4,3 persen dan berkontribusi pada menurunnya pertumbuhan pajak penghasilan.[38] Secara umum, total penerimaan pajak dari sektor manufaktur dan pertambangan masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen dan 22,1 persen yoy. Terakhir, adanya peningkatan pengembalian PPN/PPnBM dan pajak penghasilan dalam negeri karena adanya perubahan kebijakan untuk penyederhanaan proses pengembalian PPN dan pajak penghasilan menyebabkan penurunan sebanyak satu kali dalam pemungutan pajak bersih.[39]

Gambar A.23: Pertumbuhan penerimaan kumulatif menurun karena kontraksi penerimaan Migas dan PPN

(kontribusi penerimaan Januari-Oktober terhadap peningkatan, yoy, poin persentase)

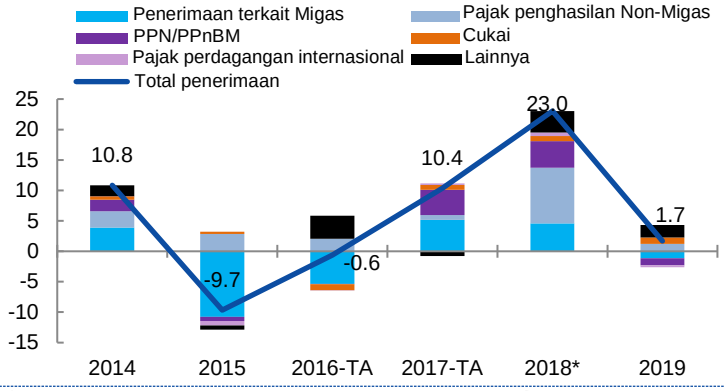

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Penerimaan terkait Migas mengacu pada pajak penghasilan minyak dan gas, dividen dan royalti (penerimaan negara bukan pajak), Non-Migas adalah singkatan dari pajak penghasilan non-migas; PPN/PPnBM adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai / pajak penjualan barang mewah; "Lainnya" antara lain: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya; penerimaan negara bukan pajak atas migas; penerimaan negara bukan pajak lainnya (laba perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum [BLU], dan penerimaan negara bukan pajak [PNBP] lainnya); dan hibah. 2017-TA berarti bahwa total penerimaan tidak termasuk uang tebusan yang dipungut berdasarkan Program Amnesti Pajak. 2018* adalah perbandingan *yoy* dengan 2017-TA.

Sebaliknya, penerimaan kumulatif dari cukai naik 15,2 persen yoy selama 10 bulan pertama tahun ini, yang tertinggi sejak tahun 2012, karena adanya penundaan pembayaran tahun 2018 yang diizinkan,[40] tetapi tarif cukai tembakau tidak berubah. Penerimaan negara bukan pajak lainnya, yang sebagian besar terdiri dari laba dari entitas Pemerintah, seperti BUMN dan BLU, juga

[36] Sampai bulan Oktober 2019, total penerimaan Pemerintah mencapai 69,7 persen dari target penerimaan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 78,3 persen pada 2018 untuk periode yang sama.
[37] Harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) pada tahun 2019 adalah USD 61,3 per barel, turun dari rata-rata USD 70,4 pada tahun 2018 untuk periode yang sama dan lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2019 sebesar USD 70 per barel. Harga rata-rata batubara Australia ytd tahun 2019 adalah USD 80,1 per metrik ton, turun dari rata-rata USD 108,2 pada tahun 2018 untuk periode yang sama. Harga rata-rata gas alam Amerika Serikat ytd 2019 adalah USD 2,5 per juta British thermal unit (mmbtu), turun dari rata-rata USD 3,0 pada 2018 untuk periode yang sama. (Lihat Bagian A.2)
[38] Bagian dari pajak penghasilan non-migas dikaitkan dengan impor melalui undang-undang Pajak Penghasilan pasal 22.
[39] PPN dalam negeri, termasuk pengembalian PPN, turun sebesar 2,4 persen yoy antara bulan Januari dan Oktober 2019. Tidak termasuk pengembalian PPN, penerimaan PPN dalam negeri diperkirakan telah meningkat 5,3 persen selama periode ini, menurut laporan pelaksanaan anggaran bulanan Kementerian Keuangan (APBN KITA, November 2019). Perampingan pengembalian dana untuk wajib pajak terpercaya diberlakukan melalui peraturan Menteri Keuangan No. 38/2018 dan diperluas ke lebih banyak sektor melalui peraturan Menteri Keuangan No. 117/2019.
[40] Sebagaimana diizinkan oleh PP No. 57/2017, yang menetapkan bahwa industri tembakau tertentu dapat melakukan penundaan pembayaran cukai hingga 90 hari. Kumparan (17 Juli 2019).

meningkat 18,5 persen yoy. Hal ini terutama didorong oleh pembayaran satu kali yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari sisa surplus tahun lalu.[41]

Gambar A.24: Peningkatan belanja pemerintah terutama didorong oleh peningkatan belanja pegawai dan belanja sosial

(kontribusi belanja Januari-Oktober terhadap peningkatan, yoy, poin persentase)

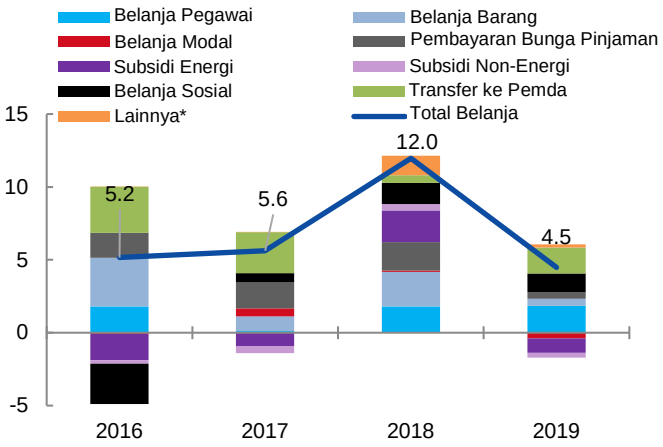

Gambar A.25: Pelaksanaan belanja subsidi yang lebih rendah diimbangi oleh belanja pegawai dan belanja sosial yang lebih tinggi

(belanja Jan-Oktober sebagai persen dari alokasi anggaran, persen)

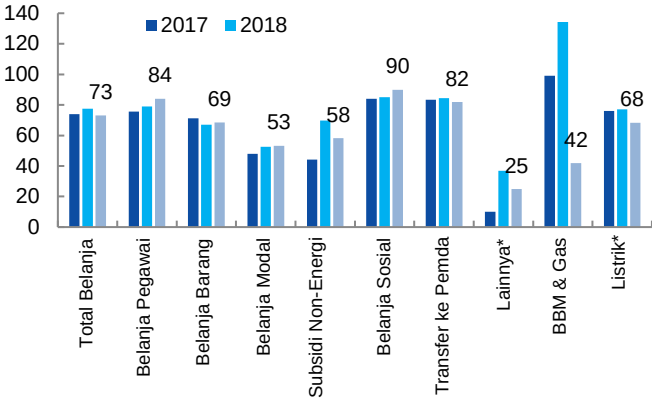

Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Subsidi energi tidak termasuk pembayaran tunggakan subsidi bahan bakar minyak dan gas untuk tahun 2018 dan 2019, yang ditambahkan kembali ke kategori belanja "Lainnya" sesuai dengan klasifikasi anggaran. * Lainnya sejak 2017 dan seterusnya termasuk pembayaran tunggakan dari subsidi energi sebelumnya.

Belanja pemerintah melambat sebagian karena kontraksi dari belanja modal dan belanja subsidi

Sebagian karena adanya efek tahun dasar yang tinggi, peningkatan total pengeluaran Pemerintah mencapai 4,5 persen yoy untuk tahun-ke-Oktober, kurang dari setengah dari 12,0 persen yang tercatat pada periode yang sama di tahun 2018, yang merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Belanja modal mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen, dibandingkan dengan kenaikan sebesar 1,3 persen yang ada di tahun 2018 (Gambar A.24), sebagian karena alokasi anggarannya lebih rendah. Pada saat yang sama, total subsidi, tidak termasuk pembayaran tunggakan, menyusut 15,9 persen di tahun 2019 dibandingkan dengan peningkatan sebesar 39,0 persen tahun lalu, sebagian karena harga komoditas yang lebih rendah dan apresiasi nilai Rupiah.

Selain transfer ke pemerintah daerah (Pemda) dan dana desa[42], belanja pegawai dan belanja bantuan sosial masih merupakan kontributor utama terhadap total peningkatan belanja. Terutama didorong oleh kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil[43], belanja pegawai naik 11,0 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 10,7 persen pada tahun 2018. Belanja bantuan sosial kumulatif masih melonjak sebesar 32,7 persen dipengaruhi oleh besar manfaat yang lebih tinggi pada program PKH (Program Keluarga Harapan) serta pembayaran di muka dan jumlah penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN-Kesehatan yang lebih banyak.

Realisasi anggaran belanja yang lebih

Dari Januari hingga Oktober, total belanja yang dicairkan adalah sekitar 73 persen dari anggaran yang disetujui, lebih rendah dari 77 persen yang disalurkan selama periode yang sama pada tahun

[41] Dalam kondisi di mana rasio cadangan modal dan cadangan umum (selain 30 persen dari surplus BI) terhadap kewajiban lebih dari 10 persen, surplus BI (setelah dikurangkan) harus disetor ke rekening Pemerintah sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak Pemerintah. Bisnis (31 September 2019).

[42] Anggaran yang dialokasikan untuk transfer ke Pemda dan dana desa pada tahun 2019 ditetapkan meningkat 10,0 persen lebih tinggi dari peningkatan sebesar 2,1 pada tahun 2018 sebagian karena tambahan DAU untuk Dana Kelurahan sekitar Rp3 triliun. Apalagi, pencairan DAU tahun ini menjadi angka final, berbeda dengan tahun lalu yang tergantung pada realisasi penerimaan. Kontan (10 Desember 2018).

[43] Tempo (20 Maret 2019).

rendah sebagian didorong oleh realisasi yang jauh lebih rendah dari belanja subsidi energi saat ini

2018. Tingkat pelaksanaan yang lebih rendah ini sebagian dijelaskan oleh pencairan yang lebih lambat dari subsidi energi saat ini, sebagian besar disebabkan oleh harga komoditas yang lebih rendah dan nilai Rupiah yang lebih kuat (Gambar A.25). Sebaliknya, pelaksanaan anggaran untuk bantuan sosial naik secara signifikan menjadi 89,9 persen tahun ini, dari 85,1 persen pada tahun 2018, karena pencairan program PKH dan JKN-Kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional) yang lebih cepat.[44] Pelaksanaan belanja modal masih setengah dari jumlah yang dianggarkan, mirip dengan tingkat pencairan rata-rata selama enam tahun terakhir, didorong oleh keterlambatan penyelesaian lahan dan keterlambatan pengajuan permintaan pembayaran dari perusahaan.

Pemungutan penerimaan yang lebih lambat menyebabkan defisit anggaran yang lebih tinggi pada bulan Oktober 2019 dan diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun

Sebagian karena pertumbuhan penerimaan yang lebih lemah dari perkiraan, defisit anggaran dari awal tahun sampai Oktober mencapai Rp 289,1 triliun atau 97,7 persen dari kekurangan anggaran yang ditargetkan. Selain itu, total pembiayaan bersih meningkat menjadi Rp 373,4 triliun atau 126,1 persen dari target anggaran. Total stok utang pemerintah mencapai Rp 4.756,13 triliun pada bulan Oktober atau 29,9 persen dari PDB,[45] yang masih separuh dari ambang batas legal 60 persen. Sementara itu, stok utang dalam mata uang dalam negeri dominan sebesar 61,5 persen, dibandingkan 59,9 persen pada akhir tahun 2018.

Sebagaimana disampaikan di Bagian A9, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal tahun 2019 sebesar 2,1 persen dari PDB, lebih lebar daripada proyeksi Prospek Perekonomi tahun 2019 dari Pemerintah sebesar 1,9 persen. Total penerimaan diproyeksikan sebesar 12,3 persen dari PDB, lebih rendah dari proyeksi Pemerintah sebesar 12,6 persen, sebagian karena harga komoditas yang lebih rendah dan impor yang lebih lambat. Sementara itu, pengeluaran diperkirakan akan mencapai 14,5 persen dari PDB, sesuai dengan proyeksi Pemerintah.

5. Kondisi pasar tenaga kerja terus membaik

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil, indikator pasar tenaga kerja terus membaik

Pada tahun 2019 hingga bulan Agustus, Indonesia menciptakan 2,5 juta lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja mencapai 2,0 persen yoy, lebih tinggi dari ekspansi angkatan kerja sebesar 1,9 persen. Akibatnya, tingkat pekerjaan naik 0,3 poin persentase, hingga mencapai 63,9 persen. Tingkat pengangguran turun 0,1 poin pada periode tersebut menjadi 5,3 persen (Gambar A.26).[46,47] Sebagaimana yang diharapkan dengan perkembangan ekonomi pada umumnya, kemajuan melambat selama beberapa tahun terakhir, dengan perubahan dalam pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja menyempit dari 3,1 menjadi 2,0 poin persentase dan dari 2,5 menjadi 1,9 poin persentase antara 2016 dan 2019, masing-masing[48]. Setengah menganggur, didefinisikan sebagai pekerja yang bekerja kurang dari penuh waktu, sedikit meningkat, didorong oleh peningkatan setengah menganggur secara sukarela (Gambar A.27). Tren ini kemungkinan didorong oleh sifat pekerjaan yang berubah, dengan lebih banyak pekerja memilih pekerjaan yang independen dan berjangka pendek dengan pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Transformasi struktural ekonomi[49] berlanjut dengan pangsa lapangan kerja di sektor pertanian yang menurun 1,5 poin persentase antara Agustus 2018 dan Agustus 2019.

[44] Sebagai dua komponen terbesar belanja bantuan sosial, program PKH & JKN telah menyalurkan masing-masing 100 dan 99,7 persen dari anggaran yang dialokasikan. Tingkat pelaksanaan yang lebih tinggi ini didorong oleh perubahan dalam periode pencairan untuk program PKH yang telah dipindahkan satu bulan sebelumnya, sementara pencairan yang lebih cepat dari program PBI-JKN sebagian untuk mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi oleh BPJS-Kesehatan. APBN Kita, November (2019).
[45] Menggunakan proyeksi PDB Kementerian Keuangan untuk tahun 2019.
[46] Statistik pasar tenaga kerja Indonesia diterbitkan dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus. Namun demikian, perbandingan antara data Februari dan Agustus dihindari karena ada perbedaan musiman, seperti perbedaan musim panen, yang akan mempengaruhi lapangan kerja bagi tenaga kerja dan statistik pasar tenaga kerja lainnya.
[47] Tingkat pekerjaan adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Nilai yang tercatat cenderung lebih tinggi di Sakernas bulan Februari dibandingkan dengan Sakernas bulan Agustus.
[48] Untuk mempertahankan tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, pertumbuhan lapangan kerja harus melebihi pertumbuhan angkatan kerja; sementara hal inilah yang terjadi selama dekade terakhir ini, perbedaan antara pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja telah menyempit.
[49] Didefinisikan sebagai perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian.

Kontributor terbesar dalam penciptaan lapangan kerja adalah perdagangan grosir dan eceran serta industri jasa akomodasi / makanan yang menyediakan 730.000 dan 800.000 pekerjaan baru masing-masing. (Tabel A.2).

Tabel A.2: Perdagangan grosir dan eceran, akomodasi dan makanan dan minuman, dan industri manufaktur menyumbang 96 persen dari penciptaan lapangan kerja pada tahun ini hingga Agustus 2019

Industri	Pangsa Ketenagakerjaan Agustus 2018	Tingkat Pertumbuhan Pekerjaan Agustus 2018	Penciptaan Lapangan Kerja Agustus 2018 (juta)	Pangsa Ketenagakerjaan Agustus 2019	Tingkat Pertumbuhan Pekerjaan Agustus 2019	Penciptaan Lapangan Kerja Agustus 2019 (juta)
Jumlah Pekerjaan	100	2,5%	2,9	100	2,0%	2,5
Perdagangan Grosir / Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor	19	2,5%	0,57	18,8	3,2%	0,7
Kegiatan Jasa Akomodasi / Makanan	6,2	11%	0,76	6,7	10%	0,8
Konstruksi	6,7	2,0%	0,16	6,7	2,5%	0,2
Manufaktur	15	3,9%	0,69	15	3,7%	0,7
Pendidikan	4,9	1,5%	0,09	5,0	4,0%	0,2
Kegiatan Usaha	1,3	0,6%	0,01	1,5	1,5%	0,3
Transportasi dan Penyimpanan	4,5	6,7%	0,3	4,4	3,0%	0,2
Kegiatan Keuangan / Asuransi	1,5	4,7%	0,08	1,4	-2,8%	-0,05
Kegiatan Real Estat	0,3	30%	0,09	0,3	2,6%	0,01
Pertambangan dan Galian	1,2	4,3%	0,06	1,1	-2,1%	-0,03
Pasokan Air / Pembuangan Limbah / Pengelolaan Limbah / Remediasi	0,4	15%	0,06	0,4	4,3%	0,02
Kegiatan Kesehatan Manusia / Pekerjaan Sosial	1,5	3,9%	0,07	1,5	5,4%	0,10
Listrik dan Gas	0,3	13%	0,04	0,3	5,9%	0,02
Informasi dan Komunikasi	0,7	9,8%	0,08	0,7	1,1%	0,01
Administrasi Publik / Pertahanan / Jaminan Sosial Wajib	3,8	2,2%	0,10	3,9	4,1%	0,19
Pertanian, Kehutanan, Perburuan / Perikanan	29	-0,6%	-0,2	27	-3,1%	-1,12
Kegiatan Jasa Lainnya	4,9	0,2%	0,01	5,0	4,7%	0,28

Sumber: Siaran Pers Tenaga Kerja BPS bulan Agustus 2019 dan perhitungan Staf Bank Dunia

Pengangguran berusia muda masih tetap tinggi

Pengangguran di perkotaan telah menurun sebesar 0,14 poin persentase menjadi 6,3 persen tetapi tetap di atas rata-rata nasional. Pengangguran berusia muda juga tetap tinggi, meskipun telah turun dari 19,7 menjadi 18,6 persen sejak bulan Agustus tahun lalu. Meskipun 1,2 poin persentase lebih rendah dari tahun-ke-Agustus 2018, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menunjukkan tingkat pengangguran yang tertinggi dari semua pekerja, yaitu 10,4 persen berbanding 2,4, 4,7, 7,9, dan 5,6 persen masing-masing untuk lulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Ini menunjukkan adanya diskoneksi berkelanjutan antara pasokan tenaga kerja yang terlatih di SMK dan permintaan dari para pemberi kerja.[50]

[50] Data pasar tenaga kerja bulan Agustus 2019 berasal dari Siaran Pers Tenaga Kerja BPS bulan Agustus 2019.

Gambar A.26: Tingkat pekerjaan menunjukkan peningkatan lebih lanjut sementara tingkat pengangguran turun ke rekor terendah di bulan Agustus 2019

(persen)

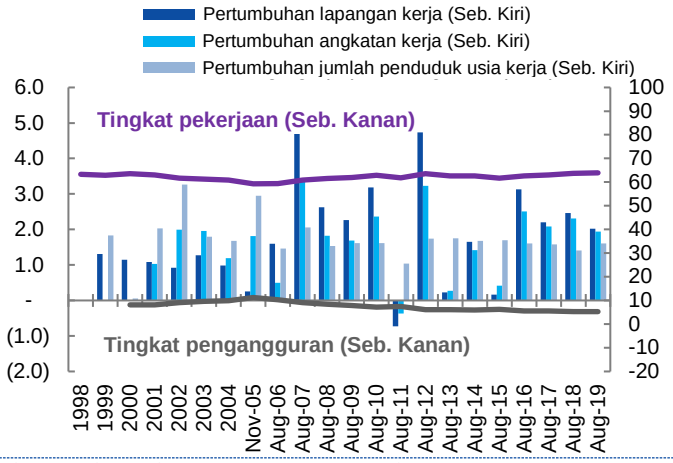

Gambar A.27: Kategori setengah menganggur sedikit meningkat, didorong oleh peningkatan pengangguran sukarela

(persen)

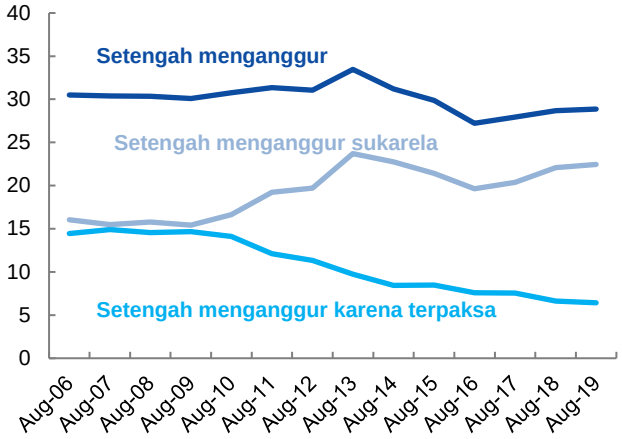

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Termasuk hanya data yang ada di bulan Agustus. Data bulan Agustus 2019 diperbarui dari Siaran Pers Tenaga Kerja BPS bulan Agustus 2019.

Disparitas gender dalam partisipasi pasar tenaga kerja masih tetap ada

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berada pada level tertinggi dalam 4 tahun terakhir sebesar 67,4 persen di bulan Agustus 2019. Namun demikian, peningkatan itu berasal hampir semata-mata melalui laki-laki yang memasuki angkatan kerja. TPAK untuk laki-laki adalah sebesar 83 persen, peningkatan 0,5 poin persentase yoy; TPAK perempuan meningkat hanya 0,01 poin persentase pada periode yang sama, dengan hanya 51 persen perempuan dari jumlah penduduk usia kerja yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja.

Gambar A.28: Sementara peningkatan penghasilan dan peningkatan upah minimum berkorelasi

(nilai rata-rata dan nilai tengah/median indeks penerimaan riil versus rata-rata indeks upah minimum riil, 2001-2018)

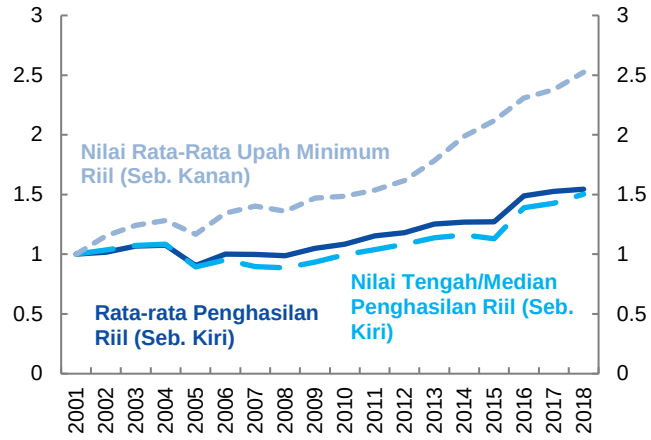

Gambar A.29: ... semakin banyak pekerja yang mendapatkan upah lebih rendah dari yang diamanatkan oleh provinsi

(pangsa pekerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi, rata-rata 2006-2008 versus 2016-2018)

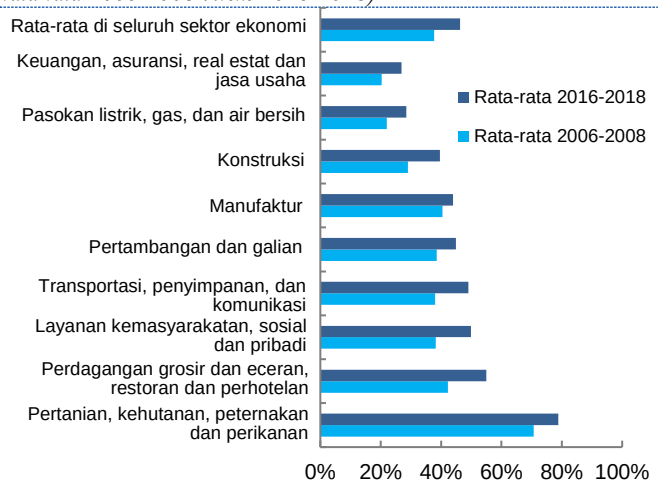

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), perhitungan staf Bank Dunia

Upah minimum dan penghasilan memiliki korelasi

Pada tahun 2019 hingga bulan Agustus, upah nominal naik 3,0 persen, sedikit lebih kecil dari kenaikan 3,2 persen di tahun sebelumnya. Dengan tingkat inflasi sebesar 3,1 persen, hal ini menyiratkan bahwa upah riil menurun, meskipun terdapat kenaikan upah minimum. Tren upah

yang lemah, namun sebagian besar pekerja dilaporkan masih berpenghasilan kurang dari upah minimum

minimum dan penghasilan benar-benar mengalami penyimpangan dalam dekade terakhir ini. Data upah historis telah menunjukkan bahwa hanya ada korelasi yang lemah dan bahkan *de-coupling* antara perubahan dalam rata-rata dan median penghasilan dengan perubahan upah minimum. Selama periode 2001 hingga 2018; penghasilan rata-rata riil meningkat hanya 50 persen sementara upah minimum riil rata-rata meningkat 152 persen (Gambar A.28). Dalam periode 2016-2018, 46 persen dari semua pekerja mendapat upah kurang dari upah minimum provinsi yang diamanatkan. Memang, pangsa penerima upah di bawah upah minimum di setiap sektor meningkat pada periode 2016-2018 (Gambar A.29).

6. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun

Tingkat kemiskinan mencapai rekor terendah 9,4 persen pada bulan Maret 2019

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kondisi pasar tenaga kerja yang kuat dan inflasi yang relatif rendah, tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional menurun dari 9,8 persen pada Maret 2018 ke rekor terendah lainnya 9,4 persen pada bulan Maret 2019 (Gambar A.30). Sejalan dengan itu, jumlah masyarakat miskin turun dari 25,9 juta menjadi 25,1 juta. Sementara itu, kesenjangan kemiskinan[51] turun dari 1,7 persen menjadi 1,6 persen pada periode yang sama.

Gambar A.30: Kemiskinan terus tercatat dalam satu digit, meskipun laju penurunannya melambat
(tingkat kemiskinan, persen, Seb. Kiri; perubahan dalam tingkat kemiskinan, poin persentase, Seb. Kanan)

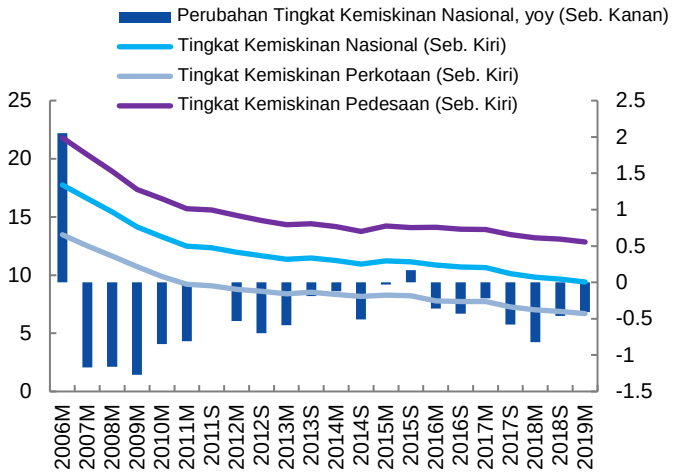

Gambar A.31: Kelas menengah terus meningkat, namun kerentanan masih tetap tinggi
(pangsa konsumsi nasional, persen)

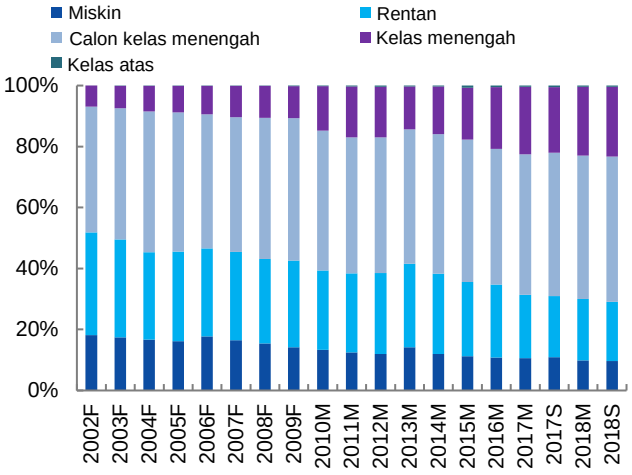

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Catatan: M = Maret, S = September. Bank Dunia (2019d) mengelompokkan individu berdasarkan tingkat pengeluaran mereka ke dalam lima kelas kesejahteraan: masyarakat miskin (hidup di bawah garis kemiskinan), rentan (hidup di antara 1,0-1,5x garis kemiskinan), Calon Kelas Menengah (CKM, hidup di antara 1,5- 3,5x Garis kemiskinan), Kelas Menengah (KM, hidup di antara 3,5-17x garis kemiskinan), dan Kelas Atas (KA, hidup di atas 17x garis kemiskinan)

Sebagian besar individu tetap rentan terhadap guncangan dan tidak memiliki keamanan ekonomi

Dalam dua dekade terakhir, kelas menengah (KM)[52] Indonesia telah tumbuh tiga kali lipat dari 7 persen pada tahun 2002 menjadi 23 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2018, 1 dari 4 orang Indonesia termasuk di dalam kelas menengah (KM). Namun demikian, mayoritas tetap sebagai calon kelas menengah (CKM)[53] (Gambar A.31). Pada bulan September 2018, 126,6 juta orang termasuk di dalam CKM, yang mencapai hingga 47,6 persen dari jumlah penduduk. Jika memasukkan kelompok yang rentan, maka lebih dari setengah jumlah penduduk di Indonesia

[51] Kesenjangan kemiskinan mengukur seberapa jauh pengeluaran rumah tangga miskin berada di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan yang menurun menunjukkan bahwa secara rata-rata, rumah tangga miskin di bulan Maret 2019 kurang miskin dibandingkan dengan rumah tangga miskin di bulan Maret 2018.
[52] Individu yang telah keluar dari kemiskinan dan memiliki keamanan ekonomi
[53] Didefinisikan sebagai individu yang hidup 1,5 kali hingga 3,5 kali di atas garis kemiskinan.

untuk naik ke kelas menengah

tidak miskin namun belum memiliki keamanan ekonomi untuk naik tingkat ke kelas menengah. Lebih lanjut, 77,4 juta orang, setara dengan 29,1 persen dari jumlah penduduk, tetap miskin atau rentan untuk kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Ini menyoroti tingginya jumlah penduduk di Indonesia yang masih rentan terhadap guncangan ekonomi, meskipun terdapat kemajuan yang berkelanjutan dalam penurunan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan anti-kemiskinan dan pertumbuhan inklusif, termasuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, tetap penting.

Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah untuk memastikan mobilitas ekonomi menuju ke atas di antara kelompok calon kelas menengah untuk tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi juga untuk menikmati dan mempertahankan keamanan ekonomi

Antara Maret 2018-19, pangsa konsumsi 40 persen masyarakat kelas bawah dan menengah meningkat. Peningkatan di bagian tengah distribusi penghasilan menunjukkan adanya pertumbuhan CKM di negara ini (Tabel A.3). Pada bulan Maret 2018, CKM menyumbang 92,6 persen dari konsumsi 40 persen masyarakat kelas menengah, sementara KM hanya menyumbang 7,4 persen. Sementara meningkatnya pangsa CKM dan KM berkontribusi pada penurunan moderat ketimpangan selama Maret 2018-19, hal ini juga menyoroti tantangan berikutnya. Yaitu untuk memastikan mobilitas ekonomi menuju ke atas di antara CKM untuk tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi juga menikmati dan mempertahankan keamanan ekonomi – yaitu, untuk naik tingkat ke kelas menengah.

Tabel A.3: Pangsa konsumsi dari 40 persen masyarakat kelas bawah dan menengah meningkat

(pangsa konsumsi nasional, persen)

	Periode	40 Bawah	40 Menengah	20 Atas
Nasional	Maret 2018	17,3	36,6	46,1
	Maret 2019	17,7	36,8	45,5
	Δ 2019-2018	+0,4	+0,2	-0,6
Perkotaan	Maret 2018	16,5	36,9	46,6
	Maret 2019	16,9	37,1	46,0
	Δ 2019-2018	+0,4	+0,2	-0,6
Pedesaan	Maret 2018	20,2	39,6	40,3
	Maret 2019	20,6	39,7	39,7
	Δ 2019-2018	+0,4	+0,1	-0,6

Sumber: Susenas Putaran Bulan Maret

Gambar A.32: Meskipun secara nasional tingkat kemiskinan menurun, penurunannya tidak seragam di semua provinsi

(tingkat kemiskinan, persen; penurunan kemiskinan, poin persentase)

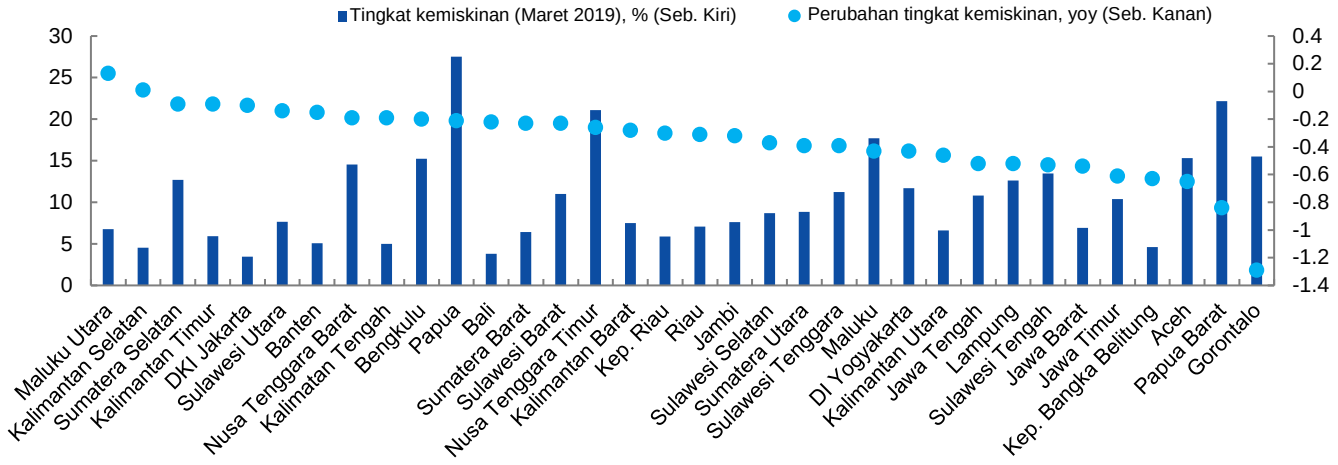

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), putaran bulan Maret

Pembangunan yang seimbang secara spasial tetap menjadi tantangan karena

Menyeimbangkan kemajuan pembangunan lintas daerah juga masih menjadi tantangan, karena tren penurunan kemiskinan berbeda-beda di seluruh wilayah di Indonesia (Gambar A.32). Kesenjangan perkotaan-pedesaan tetap menjadi ciri utama kemiskinan di negara ini. Pada bulan Maret 2019, proporsi masyarakat miskin di daerah pedesaan adalah 12,9 persen, 6 poin

tetap ada perbedaan secara geografis dalam tingkat kemiskinan dan kesejahteraan secara keseluruhan

persentase lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Pada tahun 2019 hingga bulan Maret, pangsa masyarakat miskin di daerah perkotaan turun 0,33 poin persentase dan terjadi penurunan kurang dari 0,35 poin persentase di daerah pedesaan, menandakan adanya konvergensi perkotaan-pedesaan.

Selain itu, kesenjangan antara provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah dan tertinggi sangat lebar. Pada bulan Maret 2019, DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah, yaitu 3,5 persen, sementara pangsa masyarakat miskin di Papua mencapai 27,5 persen. Selain itu, dua provinsi (Maluku Utara dan Kalimantan Selatan) mengalami peningkatan dalam jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan selama Maret 2018-19. Penurunan kemiskinan tertinggi juga tidak teramati di daerah-daerah di mana kemiskinan terkonsentrasi tinggi. Lebih dari separuh penduduk miskin hidup di Jawa dan Bali, akan tetapi penurunan terbesar dalam kemiskinan tercatat di tempat lain, seperti di Gorontalo, Papua Barat, dan Aceh. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan dan pertumbuhan yang secara spasial seimbang tetap menjadi tantangan bagi Indonesia, karena perbedaan geografis dalam kemiskinan dan tingkat kesejahteraan keseluruhan cenderung akan tetap ada.

7. Prospek dan risiko pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2020

Diperkirakan dengan penurunan ketegangan perdagangan internasional secara bertahap, harga komoditas yang secara umum stabil, dan berkurangnya ketidakpastian politik dalam negeri, pertumbuhan PDB riil diproyeksikan membaik secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,0 persen pada tahun 2019 dari tingkat yang tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar 5,2 persen pada tahun 2018, naik menjadi 5,1 persen pada tahun 2020 (Tabel A.4).

Tabel A.4: Indikator-indikator ekonomi yang utama
(pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2018	2019e	2020p	2019
1. Indikator ekonomi yang utama				
Produk Domestik Bruto (PDB)	**5,2**	**5,0**	**5,1**	**-0,1**
Konsumsi sektor swasta	5,1	5,2	5,1	0,0
Konsumsi pemerintah	4,8	3,5	3,7	-1,6
Pembentukan modal tetap bruto	6,7	4,5	5,0	-0,5
Ekspor barang dan jasa	6,5	-1,0	1,5	-3,6
Impor barang dan jasa	12,0	-6,0	0,5	-6,0
2. Indikator ekonomi lainnya				
Indeks harga konsumen	3,2	3,1	3,5	0,1
3. Asumsi ekonomi				
Nilai tukar (Rp/USD)	14.237	14.160	14.165	-26
Harga minyak mentah Indonesia (USD/bbl)	67,5	60,0	58,0	-4,3

Sumber: BPS; Bank Indonesia; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia
Catatan: angka yahun 2018 adalah hasil aktual; e adalah singkatan dari estimasi dan p untuk perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaam tidak disajikan dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB yang terbaru. Asumsi nilai tukar dan harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Revisi relatif terhadap proyeksi dalam IEQ (*Indonesia Economic Quarterly*) edisi Desember 2018.

Investasi diharapkan menguat oleh karena menurunnya ketidakpastian politik dan reformasi dividen

Dengan adanya penurunan ketegangan perdagangan internasional secara bertahap, berkurangnya ketidakpastian politik mengenai susunan kabinet baru, turunnya biaya pinjaman, dan perbaikan sentimen bisnis seiring wacana reformasi kebijakan, pertumbuhan investasi dalam negeri diperkirakan akan meningkat tahun depan, meskipun tetap lebih rendah dari tahun lalu, yang merupakan level tertinggi selama lima tahun terakhir. Dengan pulihnya investasi dan tingkat upah, pertumbuhan konsumsi swasta diproyeksikan secara umum akan stabil, meskipun sedikit menurun pada tahun 2020 karena inflasi yang lebih tinggi dengan penghapusan subsidi tarif

listrik untuk sejumlah besar rumah tangga tahun depan dan berkurangnya dampak pemilihan umum di paruh pertama tahun ini. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga diperkirakan relatif konservatif mengingat realisasi penerimaan yang tidak terlalu tinggi mengingat harga komoditas yang lemah dan impor yang kurang baik, meskipun reformasi pajak sedang berlangsung.

Baik ekspor maupun impor diperkirakan akan melemah karena adanya hambatan perdagangan

Di tengah ketidakpastian kebijakan global, pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional yang lemah, pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan akan tertahan, meskipun terdapat beberapa jalur baru untuk ekspor yang lebih tinggi.[54] Impor juga diproyeksikan akan melemah, di mana kontraksi saat ini akan secara bertahap melonggar seiring dengan pertumbuhan investasi yang pulih kembali.

Nilai tukar perdagangan memburuk pada tahun 2019

Harga barang-barang komoditas ekspor utama Indonesia menurun tajam di tahun 2019

Harga barang-barang komoditas ekspor utama Indonesia diperkirakan akan menurun tahun ini dan pada tahun 2020. Harga batubara diproyeksikan akan turun lebih dari 25 persen yoy tahun ini dan 10 persen lagi tahun depan (Tabel A.5). Demikian pula, minyak sawit dan logam dasar diproyeksikan akan turun 10 persen tahun ini, dan harga minyak juga diperkirakan akan turun tahun ini dan pada tahun 2020. Namun demikian, karena Indonesia adalah pengimpor minyak bersih, harga minyak yang lebih lemah cenderung memperkuat nilai tukar perdagangannya. Secara keseluruhan, ToT (*Terms-of-Trade,* atau nilai tukar perdagangan) komoditas pada tahun 2019 diproyeksikan menurun sebesar 16 persen dan 4 persen lagi pada tahun 2020 (Gambar A.33)[55].

Gambar A.33: Indeks harga tertimbang bersih (NTI) Indonesia diproyeksikan akan terus melemah di tahun ini dan tahun depan…
(indeks 2015=100)

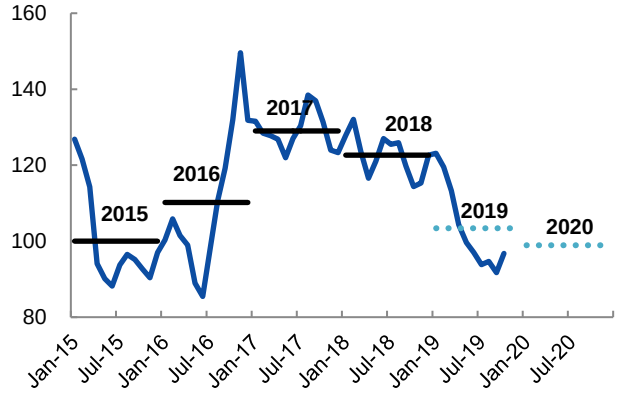

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia.

Tabel A.5: … karena harga untuk semua komoditas utama, kecuali karet, diperkirakan akan terus menurun
(harga, historis dan perkiraan)

	2017	2018	2019p	2020p
Karet, SGP/MYS (USD/kg)	2,0	1,6	1,7	1,7
Logam dasar, tidak termasuk bijih besi (indeks)	84,9	90,6	81,7	82,1
Batu bara, Australia (USD/mt)	88,5	107,0	79,0	71,0
Minyak mentah, rata-rata (USD/bbl)	52,8	68,3	60,0	58,0
LNG, Jepang (USD/mt)	8,6	10,7	10,7	9,8
Minyak sawit (USD/mt)	751	639	575	575

Sumber: Tinjauan Pasar Komoditas Bank Dunia, Oktober 2019.
Catatan: p adalah singkatan dari perkiraan.

[54] Potensi jalur baru untuk volume ekspor yang lebih tinggi untuk Triwulan ke-4 tahun 2019 dan seterusnya termasuk peningkatan ekspor minyak sawit ke India karena adanya penurunan tarif sebesar 5 poin persentase, Antara News (11 September 2019), peningkatan ekspor tembaga karena kuota ekspor naik lebih dari tiga kali lipat, The Jakarta Post (13 September 2019), peningkatan ekspor baja ke Tiongkok karena produksi baja dalam negeri Tiongkok melambat di tengah pembatasan emisi yang lebih ketat, Reuters (14 Agustus 2019), dan kemungkinan Pertamina mulai mengekspor bahan bakar jet, Reuters (26 Agustus 2019).

[55] Indeks Harga Perdagangan Komoditas Bersih (NTI) didefinisikan sebagai berikut: $NTI_t = \frac{Bobot_{i,p}\, xHarga_{i,t}}{Harga_{i,t}}$ di mana $Bobot_{i,p} = \frac{(E_{i,t})-(I_{i,t})}{\sum(E_{N,t})-\sum I_{N,t}}$ dan i= jenis komoditas; t= bulan; p=periode (mis. 5 tahun rata-rata); N = jumlah komoditas; T= tahun basis; E= nilai ekspor; I= nilai impor

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan menyempit

Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan menyempit menjadi 2,7 persen dan 2,6 persen dari PDB pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing

Meskipun pertumbuhan lebih lambat dari MTPs (*Major Trading Partners*, atau mitra dagang utama) dan ToT komoditas yang lebih lemah, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan akan menyempit menjadi masing-masing 2,7 persen dan 2,6 persen dari PDB pada tahun 2019 dan 2020, sebagian karena defisit perdagangan yang lebih kecil. Nilai impor diproyeksikan akan meningkat lebih lambat dibandingkan dengan nilai ekspor karena pertumbuhan impor Migas yang lebih lambat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk mengelola impor yang terus mendapat pijakan dalam waktu dekat ini (Gambar A.34).

Gambar A.34: Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan secara bertahap menyempit.
(USD miliar)

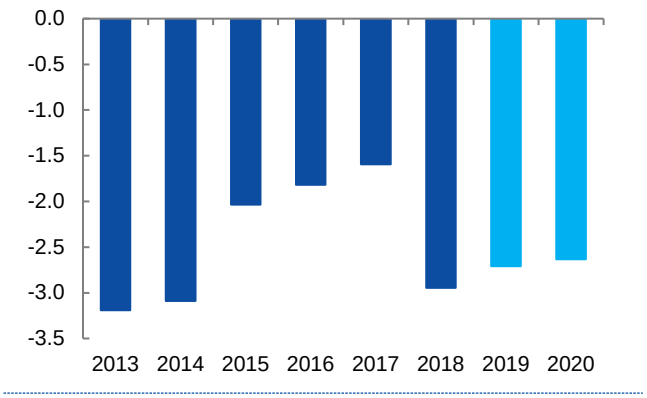

Sumber: Bank Indonesia; Perhitungan staf Bank Dunia

*Inflasi harga konsumen (diukur dari perubahan IHK) diperkirakan akan naik pada tahun 2020 karena adanya perubahan harga barang-barang yang harganya diatur pemerintah (*administered goods*)*

Inflasi akan tetap rendah tahun ini tetapi meningkat selama dua tahun ke depan dengan adanya reformasi subsidi listrik

Inflasi IHK untuk tahun 2019 diperkirakan rata-rata 3,1 persen, yang terendah dalam catatan, sebagian besar didukung oleh harga makanan yang relatif tertahan dan inflasi harga barang-barang yang harganya diatur pemerintah (*administered goods*). Pada tahun 2020, inflasi diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,5 persen setelah kebijakan Pemerintah yang baru-baru ini diumumkan untuk mencabut subsidi tarif listrik untuk pelanggan 900VA dari rumah tangga yang tidak miskin, peningkatan premi asuransi kesehatan BPJS dan kenaikan tariff cukai tembakau.[56] (Gambar A.35)

Gambar A.35: Inflasi IHK diproyeksikan turun sebesar 3,1 persen pada 2019
(Inflasi bulanan dan inflasi rata-rata tahunan, perubahan yoy, persen)

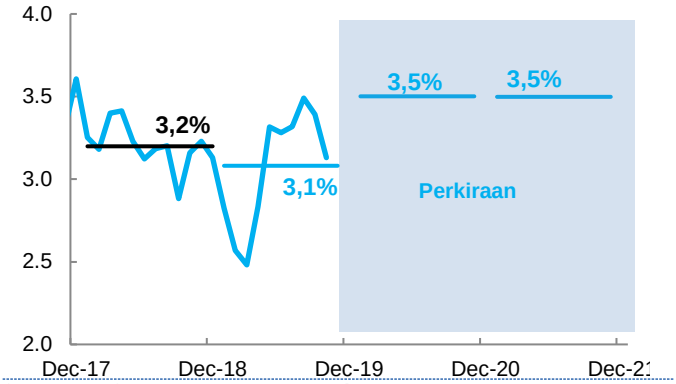

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

[56] Republika (19 November 2019).

Defisit APBN akan melebar di tahun 2019 dan menyempit lagi di tahun 2020

Defisit anggaran diperkirakan akan melebar ke 2,1 persen di tahun 2019

Sejalan dengan prospek ekonomi makro untuk tahun 2019, defisit anggaran diproyeksikan mencapai 2,1 persen dari PDB dari 1,8 persen pada tahun 2018 (Gambar A.36). Meskipun lebih besar, estimasi defisit tersebut masih di bawah rata-rata 2,4 persen yang telah dicapai pada 2015-2018. Defisit fiskal primer (*primary fiscal deficit*) diperkirakan melebar menjadi 0,4 persen dari PDB, naik dari 0,1 persen dari PDB di tahun 2018.

Gambar A.36: Harga komoditas yang lebih rendah diproyeksikan akan menyebabkan defisit anggaran yang lebih lebar pada tahun 2019

(persen dari PDB)

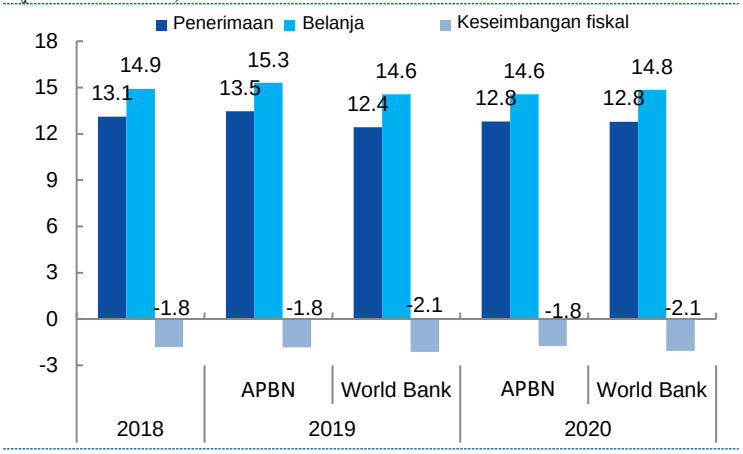

Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia

Penerimaan pemerintah diproyeksikan mencapai 12,4 persen dari PDB, terutama karena harga komoditas yang lebih rendah, impor yang lebih lambat, dan peningkatan pengembalian pajak. Total belanja pemerintah diproyeksikan mencapai 14,6 persen dari PDB, 0,7 poin persentase lebih rendah dari tahun 2018, dengan belanja modal dan belanja subsidi yang lebih kecil.

Total utang pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp 4,8 triliun atau 30,1 persen dari PDB pada akhir tahun 2019, naik sedikit dari 29,8 persen dari PDB pada akhir tahun 2018.

Defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,1 persen dari PDB pada tahun 2020

Pada tahun 2020, penerimaan diproyeksikan akan tumbuh hingga 12,8 persen dari PDB, dengan persentase penerimaan pajak diproyeksikan akan meningkat sebagai hasil reformasi pajak yang berlangsung. Persentase penerimaan non-pajak diperkirakan akan menurun karena tertahannya harga komoditas (Tabel A.6:). Total pengeluaran diproyeksikan mencapai 14,8 persen dari PDB, yang menyebabkan defisit fiskal primer sebesar 0,4 persen dari PDB dan defisit anggaran sebesar 2,1 persen dari PDB. Utang pemerintah pusat diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 30,2 persen dari PDB pada akhir tahun 2020 (Lihat Kotak A.3 mengenai APBN 2020).

Risiko yang merugikan (downside risks) *baru-baru ini meningkat dengan kembali adanya peningkatan ketegangan perdagangan*

Masih buruknya risiko eksternal dengan adanya ketegangan perdagangan yang berkepanjangan

Masih buruknya *downside risks* terhadap prospek pertumbuhan dengan adanya ketegangan perdagangan yang berkepanjangan yang menimbulkan risiko tambahan terhadap arus perdagangan internasional dan prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Berlanjutnya peningkatan ketegangan perdagangan kemungkinan akan terus membebani perekonomian Tiongkok dan regional yang tergabung dalam rantai pasokan (*supply chains*) regional, sehingga semakin mengurangi pertumbuhan perekonomian regional, yang akibatnya akan berdampak pada penerimaan Pemerintah Indonesia dan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan harga komoditas yang lebih lemah.

Sentimen bisnis dan investasi global juga berisiko mengalami pelemahan dalam jangka menengah

Terkait dengan hal tersebut, meningkatnya ketegangan perdagangan bersamaan dengan terganggunya rantai pasokan juga berdampak pada kepercayaan bisnis global dan karenanya berdampak pula pada investasi. Jika hambatan pada pertumbuhan investasi ini berkepanjangan hingga jangka menengah, potensi pertumbuhan ekonomi negara dapat menurun, semakin membahayakan lemahnya prospek pertumbuhan dunia, untuk kawasan ini, dan untuk Indonesia.

Kondisi eksternal yang tidak menguntungkan dapat memicu aksi jual aset keuangan negara-negara berkembang

Sebagaimana yang baru-baru ini dialami, risiko eksternal yang meningkat dapat memicu aksi jual aset negara-negara berkembang yang berujung pada arus keluar modal (*capital outlfows*). Mata uang negara-negara berkembang bisa kembali berada di bawah tekanan karena investor menyeimbangkan kembali portofolio mereka dengan *safe-haven assets* (aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah, ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik – pent.) tradisional seperti surat utang Pemerintah AS (*US Treasuries*) sebagai pengganti aset negara-negara berkembang. Rupiah dapat terdepresiasi secara tajam dan imbal hasil obligasi dapat melonjak, yang menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi dan menurunkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi.

Resolusi perselisihan perdagangan AS-Tiongkok yang lebih cepat dari perkiraan bisa membawa risiko yang menguntungkan (*upward risks*) terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dengan perjanjian perdagangan "Tahap Pertama" antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang tampaknya hampir selesai, normalisasi hubungan perdagangan internasional yang lebih cepat dari perkiraan, bersama dengan cepat kembalinya tarif perdagangan ke tarif sebelum terjadinya sengketa, dapat memacu pemulihan dalam perdagangan global dan meningkatkan aktivitas perekonomian global, yang dapat mendukung harga komoditas global serta arus perdagangan dan investasi dunia yang lebih kuat. Ini kemudian dapat memperbaiki penerimaan Indonesia, sektor eksternal dan investasi dalam negeri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi risiko perekonomian global yang meningkat, Indonesia harus meningkatkan daya saing globalnya untuk menuai peluang …

Dalam menghadapi peningkatan risiko perekonomian global, sangatlah penting bagi Indonesia untuk berfokus pada penguatan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjangnya. Terlepas dari 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah sejak September 2015, hambatan struktural yang substansial tetap ada di pasar tenaga kerja dan pasar barang. Ini termasuk pengembangan kualitas SDM yang terbatas dan ketidakcocokan keterampilan (*skills mismatches*) yang terkait (Bank Dunia 2019c); peraturan yang rumit terutama di tingkat pemerintah daerah; hambatan untuk FDI (*Foreign Direct Investment*, atau penanaman modal asing) (Bank Dunia 2017); dan kuatnya kehadiran BUMN yang membatasi persaingan. Reformasi untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ini, seperti kebijakan untuk mendorong peningkatan FDI dan meningkatkan produktivitas investasi (Bank Dunia 2018), akan mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Awal masa jabatan kedua Presiden Jokowi memberikan peluang baru untuk mendorong reformasi struktural yang telah dijalankan Pemerintah melalui inisiasi berbagai reformasi struktural[57].

… dan meningkatkan bantuan serta jaminan sosial untuk membantu membangun dan mempertahankan SDM

Selain berinvestasi pada modal keras (*hard capital*), juga penting bagi Pemerintah untuk berfokus pada peningkatan dan perlindungan SDM melalui sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien. Sebanyak 28 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, serta 68 juta penduduk rumah tangga yang rentan miskin harus didukung dengan bantuan dan jaminan sosial untuk memastikan ketahanan mereka terhadap guncangan yang merugikan. Bagian B dari laporan ini membahas pentingnya untuk memiliki sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien yang akan memungkinkan investasi semacam itu dan dengan demikian mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih adil dan dinikmati masyarakat secara luas.

[57] The Jakarta Post (2 Desember 2019).

Tabel A.6: Proyeksi Anggaran Fiskal Bank Dunia

(Rp Triliun, kecuali dinyatakan lain)

	APBN 2019	Prospek Kemenkeu 2019	APBN 2020	Bank Dunia 2019	Bank Dunia 2020	Prospek Kemenkeu 2019 vs APBN 2019 (% realisasi)	Prospek Kemenkeu 2019 vs Aktual 2018 (% peningkatan)	Bank Dunia 2019 vs Aktual 2018 (% peningkatan)
A. Penerimaan	**2.165**	**2.031**	**2.233**	**1.975**	**2.178**	**93,8**	**4,5**	**1,6**
1. Penerimaan pajak	**1.786**	**1.643**	**1.866**	**1.553**	**1.769**	**92,0**	**8,2**	**2,3**
Pajak penghasilan Migas	66	57	57	59	56	86,8	-11,2	(9,5)
Pajak Non-Migas, terdiri dari:	1.511	1,380	1.585	1.265	1.454	91,3	10,5	1,3
Pajak Penghasilan Non-Minyak & Gas	828	761	872	715	812	91,9	11,1	4,4
PPN/PPnBM	655	593	686	522	614	90,4	10,3	(2,9)
Pajak bumi dan bangunan	19	19	19	21	22	98,7	-3,0	8,3
Pajak lainnya	9	7	8	6	7	85,0	10,3	(5,1)
Cukai	166	166	181	189	217	100,2	3,9	18,7
Pajak perdagangan internasional	43	40	43	41	42	91,8	-13,3	(11,0)
2. Penerimaan negara bukan pajak	**378**	**386**	**367**	**420**	**405**	**102,1**	**-5,6**	**2,6**
Penerimaan sumber daya alam	191	152	160	158	154	79,8	-15,7	(12,3)
Migas	160	119	127	124	118	74,8	-16,3	(13,1)
Non migas	31	33	33	34	37	105,6	-13,5	(9,4)
Penerimaan negara bukan pajak lainnya	188	234	207	262	251	124,8	2,4	14,5
3. Hibah	**0**	**1**	**0**	2	3	307,8	-91,4	(90,4)
B. Pengeluaran	**2.461**	**2.342**	**2.540**	**2.312**	**2.529**	**95,1**	**5,8**	**4,5**
1. Pemerintah pusat	**1.634**	**1.527**	**1.683**	**1.505**	**1.638**	**93,4**	**4,9**	**3,4**
Belanja pegawai	382	376	416	382	411	98,7	8,5	10,0
Belanja barang	345	334	360	340	365	96,8	-3,8	(2,1)
Belanja modal	189	173	187	178	220	91,6	-5,9	(3,5)
Pembayaran bunga pinjaman	276	276	295	276	289	100,1	7,0	7,0
Subsidi	224	212	188	179	170	94,7	-2,1	(17,4)
Energi	160	143	125	117	103	89,1	-7,1	(23,6)
Bahan bakar minyak	101	90	71	59	49	89,7	-6,9	(39,0)
Listrik	59	52	55	58	54	88,2	-7,4	2,8
Non-energi	64	70	62	62	67	108,4	10,1	(2,4)
Hibah	2	8	2	2	2	405,2	417,1	27,6
Belanja sosial	102	100	108	101	130	97,6	18,1	19,8
Lainnya	114	47	128	47	51	41,4	192,3	191,8
2. Transfer ke pemda	**827**	**814**	**857**	807	891	98,5	7,5	6,5
C. Keseimbangan Umum	**-296**	**-311**	**-307**	-337	-352		15,4	25,0
D. Pembiayaan	**296**	**311**	**307**	337	352		1,7	
1. Pembiayaan utang	359	374	352					
2. Pembiayaan investasi	-76	-76	-74					
3. Pemberian pinjaman	-2	-2	5					
4. Kewajiban penjaminan	0	0	-1					
5. Pembiayaan lainnya	15	15	25					
Item memo (sebagi % dari PDB)								
Total Penerimaan	13,5	12,6	12,8	12,4	12,8			
Penerimaan Pajak	11,1	10,2	10,7	9,8	10,4			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,4	2,4	2,1	2,6	2,4			
Total Pengeluaran	15,3	14,5	14,6	14,6	14,8			
Belanja Pemerintah Pusat	10,2	9,5	9,6	9,5	9,6			
Transfer ke daerah dan Dana Desa	5,1	5,1	4,9	5,1	5,2			
Keseimbangan Umum	-1,8	-1,9	-1,8	-2,1	-2,1			
Asumsi:								
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)	5,3	5,2	5,3	5,0	5,1			
IHK/PDB Deflator*	3,5	3,5	3,1	2,0	2,1			
Nilai tukar (Rp/USD)	15.000	14.250	14.400	14.160	14.165			
Harga minyak mentah (USD/barel)	70,0	63,0	63,0	60,0	58,0			

Kotak A.3: APBN 2020 - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan yang optimis terhadap penerimaan dan belanja di tengah perlambatan global

Sebelum berakhirnya masa jabatan, DPR masa bakti 2014-19 menyetujui APBN 2020 pada 24 September 2019 yang akan menjadi anggaran pertama masa jabatan kedua Presiden Jokowi yang mencerminkan keberlanjutan program-program Pemerintah. Asumsi makroekonomi utama APBN 2020 diantaranya tingkat pertumbuhan PDB 5,3 persen, tingkat inflasi 3,1 persen, harga minyak mentah USD 63 per barel, proyeksi produksi (*lifting*) minyak 755 ribu barel per hari, dan nilai tukar Rp 14.400 per USD.

Target peningkatan penerimaan yang relatif optimis untuk tahun 2020

Meskipun penerimaan cukup lambat pada tahun 2019, target Pemerintah untuk total penerimaan dan hibah adalah sebesar Rp 2.233,2 triliun pada tahun 2020, setara dengan 12,8 persen dari PDB dan 10,0 persen lebih tinggi dari Prospek (*Outlook*) 2019.[1] Ini juga secara signifikan lebih tinggi dari perkiraan total peningkatan penerimaan sebesar 4,5 persen yoy pada tahun 2019 dan peningkatan rata-rata tahunan sebesar 6,5 persen (tidak termasuk penerimaan dari program amnesti pajak) antara 2014 dan 2018 (Gambar A.37).

Gambar A.37: Total penerimaan dalam APBN 2020 ditargetkan untuk meningkat dua digit, lebih tinggi dari rata-rata historis

(pertumbuhan yoy, persen)

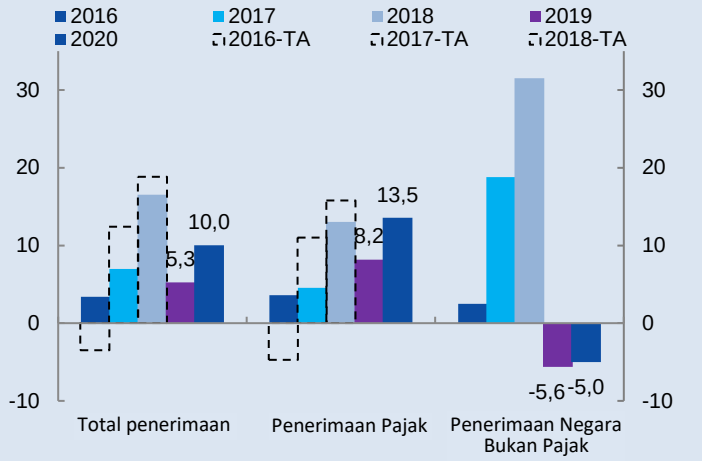

Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan staf
Catatan: Hingga 2018 mengacu pada anggaran aktual; 2019 merujuk ke Preospek (Outlook); 2020 mengacu pada anggaran yang disetujui. TA mengacu pada program amnesti pajak Pemerintah pada 2016-2017

Penerimaan pajak, merupakan sumber terbesar dari total penerimaan, ditargetkan meningkat sebesar 13,5 persen yoy, lebih tinggi dari perkiraan peningkatan penerimaan pajak sebesar 8,2 persen pada tahun 2019, meskipun terdapat insentif pajak baru untuk menarik investasi.[2] Peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2020 ini diperkirakan akan didorong oleh pemungutan PPN dan PPnBM, cukai, dan penerimaan pajak penghasilan non-Migas yang lebih tinggi, menunjukkan dampak yang diharapkan dari administrasi dan reformasi kebijakan perpajakan yang sedang berjalan.[3]

Pajak cukai juga ditargetkan meningkat sebesar 9,0 persen yoy karena cukai tembakau yang lebih tinggi (Kotak A.2) dan cukai yang baru untuk kantong plastik (Kotak A.4). Di sisi lain, Pemerintah memproyeksikan penurunan penerimaan pajak penghasilan migas sebesar 4,2 persen pada tahun 2020, yang secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan penurunan yang diperkirakan sebesar 11,2 persen pada tahun 2019, sebagian karena proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun ini.[4] Selain itu, penerimaan negara bukan pajak juga diproyeksikan menurun sebesar 5,0 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari penurunan sebesar 5,6 persen pada tahun 2019, sebagian disebabkan oleh keuntungan yang lebih rendah dari kekayaan Negara yang dipisahkan, seperti BUMN dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.[5] Secara keseluruhan, Pemerintah masih menargetkan rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi sebesar 10,7 persen pada tahun 2020, dibandingkan dengan yang diproyeksikan sebesar 10,2 persen dari PDB untuk tahun 2019.

Peningkatan kualitas belanja dan pada saat yang sama mempertahankan defisit yang rendah

Total belanja secara nominal pada tahun 2020 dianggarkan untuk meningkat secara moderat dibandingkan dengan tahun 2019, dengan Pemerintah terus meningkatkan belanja modal dan belanja sosial sementara itu juga mengurangi belanja subsidi. Pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 2.540,1 triliun atau 14,6 persen dari PDB, yang mencakup pembayaran bunga pinjaman, transfer ke daerah, dan Dana Desa.[6] Ini merupakan peningkatan sebesar 8,5 persen dibandingkan dengan tahun 2019, di atas proyeksi pertumbuhan sebesar 5,8 persen pada tahun 2019 dan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 6,1 persen pada 2014-2018. Rasio defisit anggaran pemerintah terhadap PDB akan diperkecil pada 2020 sebesar 1,8 persen atau 0,1 poin persentase lebih rendah dari tahun 2019, sebagian karena proyeksi pemungutan penerimaan yang relatif optimis.

Setelah pertumbuhan yang diproyeksikan rendah sebesar 1,1 persen pada 2019,[7] belanja infrastruktur dianggarkan memiliki peningkatan yang lebih tinggi sebesar 5,9 persen pada tahun 2020, namun masih lebih rendah dari peningkatan rata-rata tahunan sebesar 21,9 persen untuk tahun 2014-18. Peningkatan yang lebih tinggi ini sebagian didorong oleh belanja modal Pemerintah Pusat untuk pengembangan daerah tujuan wisata, seperti Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika. Sebaliknya, belanja infrastruktur pada bagian pembiayaan (*below-the-line*) yang berupa suntikan modal ke BLU-LMAN (Badan Layanan Umum-Lembaga Manajemen Aset Negara) dan BUMN terkait infrastruktur, yang telah dilakukan sejak tahun 2017, diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019, mengikut kebijakan Pemerintah yang menginginkan lebih banyak investasi swasta untuk

pembiayaan infrastruktur.[8] Sementara itu, belanja infrastruktur Pemda, yang merupakan hampir setengah dari total belanja infrastruktur, diperkirakan akan meningkat sebesar 4,1 persen, sedikit lebih rendah dari peningkatan sebesar 4,5 persen pada tahun 2018 sebagian karena peningkatan total transfer yang lebih lambat ke Pemda.[9]

Belanja bantuan sosial ditargetkan meningkat sebesar 8 persen (Gambar A.38), jauh lebih rendah dari peningkatan yang diperkirakan sebesar 18 persen pada tahun 2019.[10] Peningkatan ini sebagian didorong oleh peningkatan manfaat Kartu Sembako (kartu Makanan Pokok Murah), yaitu sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program bantuan makanan non tunai. Di bawah program Kartu Sembako, rangkaian produk makanan yang memenuhi syarat akan diperluas untuk meningkatkan gizi keluarga sasaran.[11] Selain itu, akan ada peningkatan manfaat dalam beberapa komponen program PKH khusus untuk ibu hamil dan anak-anak, sementara tetap menjaga jumlah penerima manfaat.[12] Demikian pula, jumlah penerima beasiswa di tingkat universitas akan digandakan dengan manfaat yang sama, dan Kartu Pra-Kerja[13] akan dimulai pada tahun 2020.

Gambar A.38: Lebih banyak prioritas pada belanja modal dan belanja sosial sementara lebih sedikit pengeluaran untuk belanja subsidi pada tahun 2020

(pertumbuhan)

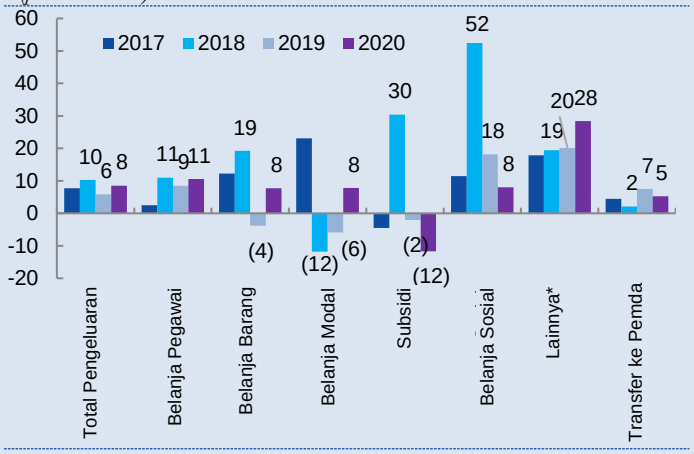

Catatan: Hingga tahun 2018 mengacu pada anggaran aktual; 2019 merujuk ke Outlook; 2020 mengacu pada anggaran yang disetujui.
*lainnya termasuk pembayaran bunga pinjaman, hibah dan pengeluaran lain seperti dana cadangan

Belanja subsidi energi akan turun lebih jauh sebesar 12,1 persen yoy pada tahun 2020 setelah penurunan yang diperkirakan sebesar 7,1 persen pada tahun 2019, terutama karena penurunan tagihan subsidi bahan bakar untuk minyak solar, minyak tanah dan LPG. Secara khusus, subsidi tetap solar yang sebesar Rp 2.000 akan dikurangi setengahnya menyusul adanya perkiraan harga minyak yang lebih rendah dan perbaikan penetapan sasaran distribusi LPG karena menggunakan distribusi tertutup.[14] Di sisi lain, tagihan subsidi listrik akan meningkat sedikit sebesar 4,7 persen, sebagian karena basis yang rendah pada tahun 2019 dengan penurunan sebesar 7,4 persen serta perkiraan kenaikan tingkat elektrifikasi pada tahun 2020. Untuk mengurangi tekanan lebih lanjut pada tagihan subsidi, Pemerintah akan mencabut subsidi listrik untuk rumah tangga yang tidak miskin atau sebagian besar pelanggan 900VA pada tahun 2020 dan hanya memberikan subsidi kepada pelanggan yang terdaftar dalam database kemiskinan terpadu (DTPPFM/BDT).[15]

Secara keseluruhan, APBN tahun 2020 memproyeksikan target defisit yang lebih sempit sebesar 1,8 persen dari PDB dibandingkan dengan tahun 2019, masih di bawah ambang batas yang diperkenankan sebesar 3 persen.

[1] Prospek (*Outlook*) 2019 mengacu pada angka Prospek APBN yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam laporan Pelaksanaan Anggaran Semester I 2019 yang diterbitkan pada bulan Juli 2019. Semua referensi bagi angka untuk tahun 2019 dalam Kotak ini mengacu pada angka Prospek 2019.
[2] Tambahan insentif pajak penghasilan (baru) meliputi pengurangan yang sangat besar untuk mendukung kegiatan kejuruan dan Litbang, fasilitas pengurangan pajak (*tax holiday*) mini untuk investasi baru hingga Rp 500 miliar, dan fasilitas investasi untuk industri padat modal, serta pajak penghasilan bersubsidi untuk beberapa sektor seperti panas bumi dan obligasi pemerintah asing. Selain itu, pembebasan PPN akan diberlakukan untuk jasa sewa transportasi (kapal, pesawat terbang, dan kereta api) untuk meningkatkan daya saing.
[3] Salah satu reformasi adalah penerapan Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange of Information*, AEoI), yang akan memperluas basis pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Selanjutnya, Pemerintah telah menciptakan unit manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dilengkapi dengan staf teknis dan sistem TI untuk meningkatkan kepatuhan sukarela secara keseluruhan. Sementara itu, Pemerintah mendukung perluasan basis pajak penghasilan umum dengan memberlakukan kebijakan "*sunset clause*" atau batas waktu pengenaan pajak untuk pajak final UMKM dan memungkinkan para wajib pajak UMKM untuk memilih rezim pajak umum. Terakhir, Pemerintah mengembangkan model perjanjian pajak dan telah secara aktif menggunakannya untuk menegosiasikan kembali perjanjian pajak yang siap untuk meningkatkan pemungutan penerimaan.
[4] CNBC Indonesia (16 Agustus 2019).
[5] Keuntungan dari kekayaan Negara yang dipisahkan, salah satu komponen dari "penerimaan negara bukan pajak lainnya", diperkirakan akan turun sebesar 38,5 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebagian besar disebabkan oleh efek tahun dasar dari surplus Bank Indonesia. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada bulan September 2019 Bank Indonesia telah menyetor sisa surplusnya ke rekening Pemerintah sekitar Rp 30 triliun atau hampir setengah dari penerimaan negara bukan pajak dari kekayaan Negara yang dipisahkan, yang meningkatkan total penerimaan negara bukan pajak kekayaan Negara sebesar 76,8 persen dibandingkan dengan tahun 2018. (Bisnis, 30 September 2019)
[6] Dana Desa adalah dana yang ditransfer oleh Pemerintah ke desa-desa untuk membiayai operasional pemerintahan desa, pembangunan fisik, serta pemberdayaan masyarakat.
[7] Belanja infrastruktur sangat rendah pada tahun 2019 sebagian karena upaya untuk menghindari defisit neraca transaksi berjalan yang lebih lebar melalui pengurangan impor barang modal yang terkait dengan investasi infrastruktur.
[8] Media Indonesia (3 Oktober 2019).
[9] Untuk menegakkan kepatuhan dengan amanat mengalokasikan 25 persen dari DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) untuk infrastruktur, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan), akan mengenakan sanksi, seperti menahan pencairan dana Transfer DAU, untuk Pemda yang tidak mengajukan rencana anggaran infrastruktur atau tidak memiliki rencana untuk memenuhi persyaratan belanja infrastruktur sebesar 25 persen.

[10] Kenaikan premi PBI atau premi asuransi kesehatan bersubsidi bagi masyarakat miskin yang dimulai pada tahun 2020 dicatat sebagai dana cadangan dalam kategori "belanja lainnya", dan belum di bawah kategori belanja bantuan sosial dalam APBN 2020. Peningkatan belanja bantuan sosial dengan demikan akan meningkat lebih cepat ketika pengeluaran-pengeluaran ini dikategorikan ulang sebagai belanja bantuan sosial.
[11] Jumlah manfaat bulanan dari Kartu Sembako meningkat, dari Rp 110.000 menjadi Rp 150.000 per bulan dengan jumlah penerima manfaat yang sama yaitu 15,6 juta rumah tangga.
[12] Antara News (22 Agustus 2019).
[13] Kartu kejuruan / pelatihan adalah salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi masalah keterampilan yang tidak cocok dengan lapangan kerja yang tersedia. Kartu ini akan diberikan kepada para pekerja atau pencari kerja saat ini untuk mengakses pelatihan kejuruan (baik pembinaan keterampilan maupun keterampilan ulang), baik dari pusat pelatihan reguler (secara nyata) atau secara daring (pelatihan digital). Program ini memiliki target hampir 2 juta peserta.
[14] Ada beberapa simulasi yang dilakukan oleh TNP2K untuk mencoba sistem distribusi LPG tertutup yang menunjukkan bahwa sistem biometrik dan e-voucher bisa menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan sistem kartu. (Bisnis. 26 Mei 2019.)
[15] Merdeka (4 September 2019).

Kotak A.4: Mengurangi polusi sampah kantong plastik di Indonesia

Jumlah limbah plastik di seluruh dunia sebesar 242 juta ton - 12 persen dari semua limbah padat kota di seluruh dunia [1] - pada tahun 2016[2]. Sampah plastik ini terutama berasal dari Asia Timur dan Pasifik (57 juta ton), diikuti oleh Eropa dan Asia Tengah (45 juta ton), dan kemudian Amerika Utara (35 juta ton). Visibilitas limbah plastik meningkat karena akumulasi limbah plastik dalam beberapa dekade terakhir dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Tidak seperti sampah organik, plastik dapat memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami. Limbah plastik menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir, memicu masalah pernapasan saat terbakar, memperpendek rentang hidup hewan saat dikonsumsi, dan mencemari badan air saat dibuang ke kanal dan lautan[3]. Di lautan, plastik terakumulasi dalam pilinan yang berputar-putar yang lebarnya bermil-mil. Di bawah sinar ultraviolet dari matahari, plastik terdegradasi menjadi "mikroplastik" yang hampir tidak mungkin terurai dan cenderung mencemari rantai makanan dan habitat alami[4]. Diperkirakan bahwa jika tidak ada tindakan korektif yang dilakukan, akan ada lebih banyak plastik di lautan dibandingkan dengan ikan pada tahun 2050.[5]

Suatu studi di tahun 2015 mengungkapkan bahwa Indonesia adalah produsen polusi sampah plastik laut terbesar kedua di dunia, menghasilkan hingga 1,3 juta ton setiap tahun[6], di belakang Tiongkok, tetapi di depan Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Kantong plastik, kemasan, dan jenis plastik lainnya, seperti sandal karet, mainan, dan gelas ditemukan di sampel limbah dari saluran air di Indonesia. Kantong plastik sebagai jenis plastik yang paling lazim ditemukan dalam sampel, rata-rata 16 persen dari semua jenis sampah plastik di semua kota[7]. Secara keseluruhan, pencemaran sampah plastik laut merupakan risiko yang signifikan terhadap perekonomian laut Indonesia yang mencakup perikanan dan pariwisata[8]. Selain itu, suatu studi baru-baru ini memperkirakan bahwa polusi sampah kantong plastik saja menyebabkan kerugian penerimaan sebesar USD 140 juta per tahun untuk sektor pariwisata Indonesia, dengan USD 55 juta hanya dari Bali saja[9].

Gambar A.39: Di negara-negara di mana data tersedia, pengurangan konsumsi plastik berkorelasi positif dengan tingkat retribusi / pajak

(cukai per kg (USD) vs tingkat pengurangan konsumsi, persen, berdasarkan negara)

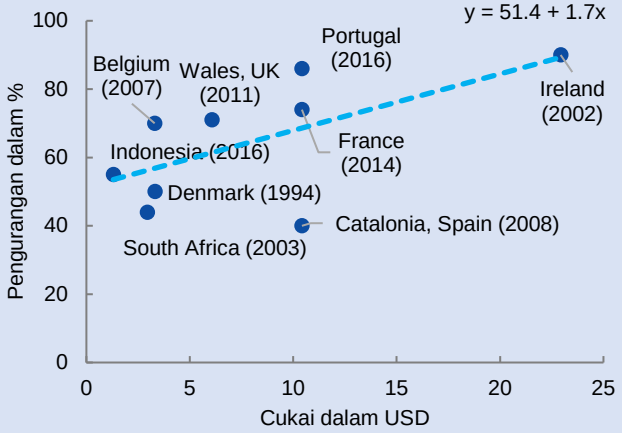

Sumber: Berbagai sumber; perhitungan staf Bank Dunia
Sumber Catatan: Pengurangan dalam penggunaan kantong plastik diukur selama periode 6 bulan sampai satu tahun setelah implementasi.

Dalam upaya mereka untuk mengurangi limbah plastik, hingga bulan Juli 2018, setidaknya 127 negara[10] telah mengadopsi beberapa bentuk undang-undang untuk mengekang penggunaan kantong plastik[11]. Kebijakan-kebijakan ini berkisar dari larangan langsung seperti di Kepulauan Marshall, hingga penghapusan secara bertahap di negara-negara seperti Moldova dan Uzbekistan, hingga undang-undang di Rumania dan Vietnam yang mendorong penggunaan tas yang dapat digunakan kembali. Beberapa yurisdiksi telah menerapkan larangan total penggunaan kantong plastik. San Francisco menerapkan larangan kantong plastik yang menyebabkan penurunan sampah plastic sebesar 72 persen di pantai setempat dari 2010 hingga 2017.[12] Di Kenya, larangan penggunaan kantong plastik telah dilaksanakan secara efektif dengan sanksi keuangan dan hukuman lainnya.[13,14] Kebijakan lain yang semakin lazim adalah menerapkan cukai pada kantong plastik. Cukai tersebut, awalnya diterapkan di Jerman pada tahun 1991 di mana pelanggan dikenakan biaya € 0,05 - € 0,10 untuk setiap kantong plastik yang mereka konsumsi, dan telah diterapkan di sejumlah negara[15].

Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang telah berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan mengenakan biaya kepada konsumen. Selama tiga bulan pada tahun 2016, sambil menunggu peraturan formal dari berbagai kementerian[16], Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)[17] membebankan kepada pelanggan setidaknya Rp 200 per kantong belanja plastik di 27 kota di seluruh Indonesia. Akibatnya, penggunaan tas belanja plastik dari toko ritel yang terafiliasi dengan Asosiasi turun 55 persen[18]. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mengurangi sampah laut, termasuk produksi dan penggunaan plastik, hingga 70 persen pada tahun 2025 dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut[19]. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan telah mengajukan rancangan peraturan kepada DPR untuk memungut cukai nasional sebesar Rp 30.000 (USD 2) untuk setiap kilogram kantong plastik sekali pakai[20], setara dengan Rp 200 (USD 2,02) untuk setiap kantong plastik[21].

Analisis statistik sederhana dari data yang tersedia dari negara-negara yang menerapkan cukai atau retribusi pada kantong belanja plastik, bersama dengan pengurangan penggunaan kantong plastik, menyoroti efektivitas cukai tersebut pada penggunaan kantong plastik (Gambar A.39).

Hasilnya menunjukkan bahwa:

- cukai positif, seberapapun kecilnya, akan mengurangi konsumsi kantong plastik sekitar 50 persen[22]. Pengurangan yang tinggi sebagian dapat dikaitkan dengan peningkatan kesadaran terhadap polusi kantong plastik.
- terdapat hubungan yang positif antara besaran cukai yang dikenakan dan pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini menyiratkan bahwa cukai yang lebih besar harus menyebabkan pengurangan yang lebih besar dalam penggunaan kantong plastik.
- meskipun memberlakukan retribusi dengan nilai yang paling kecil,[23] pengurangan penggunaan kantong plastik di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan di Afrika Selatan, Denmark, dan Catalonia (Spanyol), yang semuanya mengenakan retribusi lebih tinggi.

Terlepas dari efektivitas cukai kantong plastik dalam membatasi penggunaan kantong plastik, adalah hal yang umum bagi para pembuat kebijakan untuk juga khawatir mengenai kemungkinan akibat dari pengenaai cukai tersebut terhadap tingkat pekerjaan. Ini karena pengurangan konsumsi kantong plastik dari cukai seperti itu dapat menyebabkan produksi yang lebih rendah dan kehilangan pekerjaan di industri kantong plastik. Sebagian besar studi empiris pada cukai kantong plastik berfokus pada dampak larangan atau pungutan dan cukai pada penggunaan kantong tersebut.[24] Dampak ekonomi lainnya, seperti dampak ketenagakerjaan dari kebijakan terhadap produsen kantong plastik belum sepenuhnya dieksplorasi.[25]

Memanfaatkan periode pengenaan biaya Rp 200 per kantong oleh APRINDO pada tahun 2016 dan menghubungkan periode pengenaan biaya dengan data tenaga kerja dan industri[26],dampak cukai kantong plastik terhadap tingkat pekerjaan dianalisis secara statistik.[27] Analisis ini difokuskan pada 18 dari 27 kota yang tidak hanya menerapkan biaya kantong plastik pada tahun 2016, tetapi juga adalah lokasi pabrik pembuatan kantong plastik . Peluang kerja di 18 kota ini dibandingkan dengan peluang kerja di kota-kota yang tidak menerapkan biaya kantong plastik, baik kota dengan maupun tanpa pabrik pembuatan kantong plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya kantong plastik tidak mempengaruhi kemungkinan mendapatkan pekerjaan di kota-kota di mana terdapat pabrik pembuatan kantong plastik (Tabel A.7), yang menunjukkan bahwa tidak ada perubahan lapangan kerja yang terdeteksi karena adanya pengenaan biaya kantong plastik pada tahun 2016.

Tabel A.7: Hasil dari analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang dapat terdeteksi dalam tingkat pekerjaan akibat dari biaya kantong plastik yang dipungut di 27 kota di Indonesia pada tahun 2016

	(1) Bekerja	(2) Bekerja	(3) Bekerja di sektor Manufaktur	(4) Bekerja di sektor Manufaktur
Pasca 2016	0,006	0,009	0,046	0,042*
	(0,006)	(0,005)	(0,021)	(0,016)
Kabupaten dengan Pajak Plastik x Pasca 2016	0,000	-0,001	-0,025	-0,033
	(0,005)	(0,004)	(0,018)	(0,015)
Paparan awal ke Industri Plastik	0,000	0,000	0,000	0,000
	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)
Kabupaten dengan Pajak Plastik x Paparan Awal ke Industri Plastik	0,000	0,000	0,000	0,000
	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)

Pasca 2016 x Paparan Awal ke Industri Plastik	-0,335	-0,453	-3,339	-2,892
	(0,574)	(0,650)	(1,990)	(1,634)
Kabupaten dengan Pajak Plastik x Pasca 2016 x Paparan Awal ke Industri Plastik	0,816	0,696	3,070	3,806
	(0,537)	(0,534)	(2,881)	(2,258)
Kombinasi linier	0,481	0,241	-0,294	0,880
	(0,337)	(0,313)	(2,56)	(2,384)
Pengamatan	167.717	167.717	38.318	38.318
R-kuadrat	0,007	0,104	0,065	0,243
Tren Waktu	Ya	Ya	Ya	Ya
Efek Tetap Kabupaten	Ya	Ya	Ya	Ya
Variabel Kontrol	Tidak	Ya	Tidak	Ya

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Estimasi Model Probabilitas Linier (Linear Probability Model, LPM). Kesalahan baku (standard error) dalam tanda kurung, dikelompokkan di tingkat tahun kabupaten. Regresi menggunakan data dari Sakernas 2014, 2015, 2017, dan 2018. Pada tahun 2016, 18 kabupaten/kota di Indonesia, di mana pabrik plastik berada, menerapkan program "kantong plastik berbayar ". Ke-18 kabupaten/kota ini adalah kabupaten yang menerapkan biaya kantong plastik, sementara kabupaten/kota kontrol adalah kabupaten/kota tetangga dengan perbatasan yang sama (25 kabupaten/kota) yang tidak menerapkan biaya kantong plastik. Variabel kontrol adalah usia, jenis kelamin, tinggal di daerah perkotaan, pendidikan tertinggi, status perkawinan, indikator untuk kepala rumah tangga, dan indikator untuk menunjukkan jika responden telah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh perusahaan dan memiliki sertifikat.

[1] Umumnya dikenal sebagai sampah, ini adalah jenis sampah yang terdiri dari barang sehari-hari yang dibuang oleh masyarakat.
[2] Kaza, et al (2018).
[3] Baconguis (2018).
[4] (Amerika Serikat, NOAA n.d.).
[5] Berdasarkan beratnya, penelitian dilakukan oleh the Ellen MacArthur Foundation (2016).
[6] Jambeck et al. (2015).
[7] Shuker et al (2018)
[8] Pembahasan lebih lanjut tentang dampak sampah plastik laut terhadap lautan Indonesia dapat ditemukan di Bank Dunia (2019).
[9] Making Oceans Plastic Free Initiative (2017).
[10] dari 192 negara yang diulas.
[11] UNEP (2019).
[12] Mercury News (2017).
[13] Sebagai contoh: siapa pun yang didapati memproduksi, mengimpor atau menjual kantong plastik dapat didenda hingga USD 40.000 atau menghadapi hukuman penjara hingga empat tahun. Menggunakan tas yang dilarang dapat didenda lebih dari USD 500 atau hukuman penjara hingga satu tahun
[14] de Freytas-Tamura (2017).
[15] Earth Policy Institute (2014).
[16] Termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
[17] Didirikan pada tahun 1994 dan saat ini memiliki 150 anggota yang mengoperasikan sekitar 45.000 toko ritel di seluruh Indonesia.
[18] PPID.KLHK. (3 Juli 2018).
[19] Bank Dunia (2019b).
[20] 1 kilogram setara dengan 500 kantong plastik.
[21] Peraturan saat ini sedang menunggu persetujuan dari Parlemen Indonesia.
[22] Ini diwakili oleh titik potong-y dari garis regresi.
[23] Ini relatif terhadap negara lain yang datanya tersedia.
[24] Lihat, misalnya, Taylor dan Villas-Boas (2015), dan Homonoff (2018).
[25] Lihat, misalnya, Convery et al. (2007), BIO Intelligence Service (2011) untuk dampak yang dapat diabaikan dari pungutan terhadap pekerjaan, atau NCPA (2012) untuk dampak negatif dari kebijakan tersebut.
[26] Data tenaga kerja berasal dari Sakernas sedangkan data industri dari survei Statistik Industri.
[27] Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan (*difference-in-differences*, DD), yang digunakan untuk memperkirakan dampak kebijakan atau perlakuan (mis. diberlakukannya cukai kantong plastik) dengan membandingkan perubahan hasil antara kelompok yang menerima perlakuan (yaitu kota yang mengenakan cukai kantong plastik) dan kelompok yang tidak menerima perlakuan (kelompok kontrol, yaitu kota tanpa cukai kantong plastik). Ukuran paparan awal (initial exposure) untuk pabrik plastik dimasukkan di dalam regresi untuk lebih mengisolasi pengaruh pajak plastik sekali pakai terhadap ketenagakerjaan. Paparan awal diukur sebagai rasio dari pekerja di pabrik plastik terhadap pekerja di sektor manufaktur di kota-kota pada tahun 2014.

B. Membangun Manusia: Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia tahun 2045

1. Sistem perlindungan sosial modern adalah kunci untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dan tanpa kemiskinan

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia, akan dibutuhkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien

Visi Pemerintah Indonesia untuk tahun 2045, ketika Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya, adalah untuk mencapai status pendapatan tinggi dan mengurangi kemiskinan hingga mendekati nol.[58] Sistem perlindungan sosial (PS) yang modern, inklusif dan efisien akan sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam konteks tren demografis, teknologi, dan lingkungan hidup selama beberapa dekade mendatang. Sistem PS penting dalam memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi, dan berbagai tren yang muncul ini memiliki arti bahwa mereka juga akan memainkan peran yang semakin penting untuk membangun, mempekerjakan, dan melindungi modal manusia Indonesia[59].

Indonesia telah mencapai penurunan tingkat kemiskinan yang berkelanjutan, dari 19,1 persen dari populasi pada tahun 2000 menjadi 9,4 persen dari populasi pada tahun 2019.[60] Namun demikian, kemajuan ini sangat bertolak belakang dengan kinerja Indonesia dalam kemakmuran. Ketimpangan, yang diukur dengan koefisien Gini, naik dari nilai terendah sebesar 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin pada tahun 2014, turun menjadi 38,2 pada bulan Maret 2019. DisaatIndonesia mengalami ekspansi pesat kelas menengahnya, yang terdiri atas sekitar 23 persen penduduk Indonesia, sekitar 127 juta penduduk Indonesia, atau 47 persen dari jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai calon kelas menengah (CKM), belum mencapai keamanan

[58] Bappenas (2019).
[59] Bank Dunia (2019a).
[60] Bagian ini mengacu pada sumber-sumber berikut ini: Bank Dunia (2019c) dan (2016).

ekonomi[61]. Hampir seperlima dari CKM pada tahun 1993 menjadi rentan terhadap kemiskinan pada tahun 2014. Dua pertiga dari jumlah tersebut juga menderita kekurangan setidaknya satu dimensi kesejahteraan non-moneter.[62] Kerentanan juga tinggi: Disaat 25 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, terdapat tambahan sebesar 52 juta penduduk yang hidup kurang dari 50 persen di atas garis kemiskinan. Ketimpangan dan kerentanan dapat memiliki akibat negatif yang signifikan untuk pertumbuhan serta stabilitas sosial dan politik, dan tanpa adanya perlindungan yang memadai, guncangan kecil dapat dengan mudah membuat masyarakat yang rentan tersebut menjadi miskin kembali.

Gambar B.1: Struktur Usia Penduduk dari waktu ke waktu

(persen)

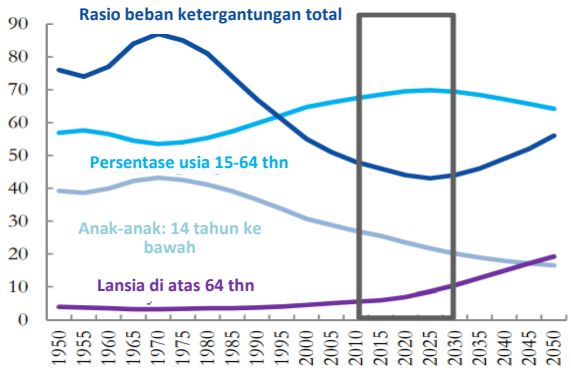

Sumber: Data Kependudukan PBB dan perhitungan Bank Dunia

Untuk menuai dividen demografis, Indonesia perlumenciptakan jumlah dan jenis pekerjaan yang memadai bagi jutaan orang yang bergabung dengan angkatan kerja setiap tahunnya

Indonesia sedang mengalami masa transisi demografis yang akan berdampak pada dinamika pasar tenaga kerja dan modal manusia dalam beberapa dekade mendatang (Gambar B.1). Jumlah lansia Indonesia akan meningkat secara signifikan, seiring dengan semakin pentingnya sistem perawatan kesehatan dan pensiun. Selain itu, Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin terampil dengan tingkat keterampilan dan bauran keterampilan yang tepat untuk persyaratan pasar kerja di masa depan[63]. Sistem perlindungan sosial dapat memainkan peran kunci dalam membangun modal manusia – dan terutama memastikan bahwa potensi semua orang Indonesia dapat dimaksimalkan. Program-program bantuan sosial dapat membangun modal manusia dengan memberikan dukungan konsumsi dan memastikan agar semua warga mendapatkan gizi dan pendidikan yang memadai. Program-program tersebut dapat dirancang untuk mendorong permintaan, pemanfaatan, dan akses ke pendidikan, kesehatan, gizi, dan layanan lainnya. Program bantuan sosial sudah menjadi bagian inti dari komitmen Pemerintah untuk mempercepat investasi dalam modal manusia, termasuk Strategi untuk Percepatan Pemberantasan Stunting (STRANAS Stunting). Perlindungan sosial yang kuat dan komprehensif memberdayakan masyarakat untuk menjadi sehat, mampu mengejar pendidikan, dan mencari peluang untuk mengangkat suatu keluarga keluar dari kemiskinan.

Teknologi akan terus mengubah sifat dari pasar tenaga kerja dan kegiatan bekerja itu sendiri…

Teknologi dan otomasi akan membentuk kembali keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja, tetapi juga bagaimana cara orang bekerja. Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin terampil dengan tingkat keterampilan dan bauran keterampilan yang tepat – termasuk keterampilan kognitif tingkat lanjut dan kombinasi keterampilan dengan kemampuan beradaptasi yang dapat diprediksi, seperti penalaran dan efikasi diri yang dibutuhkan di pasar kerja di masa depan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa bagian yang lebih besar dari tenaga kerja akan beralih dari pola tradisional satu pekerjaan per karir menjadi memiliki banyak sumber pekerjaan di sepanjang karir mereka, termasuk periode tanpa upah atau wirausaha. Sektor informal di Indonesia masih menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 50 persen dari total pekerja (70 persen di daerah pedesaan), dan ada kemungkinan bahwa tingkat informalitas yang tinggi

[61] Calon Kelas Menengah (CKM): mereka yang tidak lagi berada di dalam kemiskinan atau kerentanan tetapi belum terjamin secara ekonomi, dengan konsumsi antara Rp 531.000 dan Rp 1,2 juta per orang per bulan (USD 3,30-7,75 per orang per hari).
[62] 53 persen tinggal di perumahan yang berkualitas rendah, 30 persen tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, dan 7 persen tidak memiliki akses terhadap air bersih.
[63] Bagian ini mengacu pada hal berikut ini: Bank Dunia (2019b) dan Bank Dunia (2016b).

akan bertahan mengingat tren pertumbuhan *gig economy* (suatu tren yang muncul di mana perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja lepas dan pekerja kontrak daripada pekerja penuh waktu) dan perdagangan daring (*e-commerce*).

…mensyaratkan adanya program yang efektif untuk mengembangkan keterampilan dan memberikan perlindungan bagi pekerja

Program perlindungan sosial yang efektif akan menjadi kunci untuk membantu semua orang Indonesia untuk menggunakan modal manusianya dalam konteks transisi yang disebabkan oleh sifat pekerjaan yang berubah. Program bantuan sosial dapat mencakup peningkatan keterampilan dan menghubungkan masyarakat miskin yang tidak memiliki keterampilan dan rentan dengan peluang mendapat upah dan berwirausaha. Sistem jaminan sosial modern dan inklusif yang tersedia untuk semua orang dan tidak terikat pada bagaimana atau di mana orang bekerja (yaitu, pekerjaan berupah yang formal) mendorong partisipasi dan pekerjaan angkatan kerja, dan mengakomodasi perubahan di pasar tenaga kerja dari teknologi, otomatisasi, dan munculnya *gig economy*. Program-program jaminan sosial dan pasar tenaga kerja berkontribusi pada pasar tenaga kerja yang modern dan efektif dengan ketentuan yang memadai untuk pensiun, dukungan bagi pengangguran, dan akses ke pekerjaan produktif melalui intervensi aktif terhadap pasar tenaga kerja seperti layanan ketenagakerjaan dan pelatihan khusus yang tertarget atau program-program pengembangan keterampilan.

Masyarakat Indonesia – terutama masyarakat yang paling miskin – sangat rentan terhadap bencana dan perubahan iklim

Indonesia rentan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Indeks Risiko Dunia[64] memberi peringkat paparan Indonesia terhadap risiko terkait bencana alam di tingkat tertinggi. Dampak ekonomi tahunan dari bencana alam antara tahun 2000 dan 2016 diperkirakan mencapai 22,8 triliun rupiah (atau 1,4 miliar dolar AS) atau sekitar 0,3 persen dari PDB Indonesia (Gambar B.2). Ini tidak termasuk perkiraan kerusakan dan kerugian langsung dari gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (Lombok) serta gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Palu) yang terjadi pada tahun 2018, yang diperkirakan menimbulkan kerugian paling sedikit sebesar USD 1,8 miliar (0,2 persen dari PDB).

Gambar B.2: Jumlah, Jenis, dan Kerusakan akibat Bencana (1996–2017)

Jumlah bencana menurut jenisnya, 1996–2017

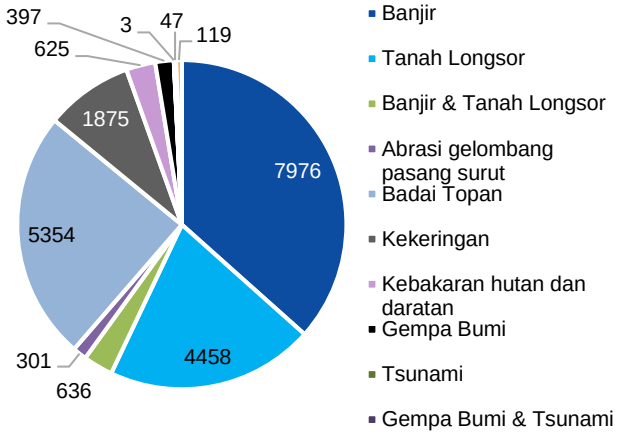

Kejadian Bencana yang Utama di Indonesia

Jenis bencana	Lokasi	Tahun	Dampak langsung bagi Masyarakat	Kerugian Finansial (USD miliar)
Tsunami Samudera Hindia	Aceh	2004	167.000 korban jiwa	7
Gempa bumi	Yogyakarta	2006	6.000 korban jiwa, 3,2 juta terkena dampak	2,3
Banjir	Jakarta	2007	68 korban jiwa, 2,2 juta terkena dampak	0,56
Gempa bumi	Padang	2009	1.195 korban jiwa, 2,5 juta terkena dampak	2,1
Letusan Gunung Berapi	Gn. Merapi	2010	322 korban jiwa, 137.000 juta terkena dampak	0,400
Banjir	Jakarta	2013	34 korban jiwa, 250.000 juta terkena dampak	0,826
Gempa bumi	Nusa Tenggara Barat	2018	564 korban jiwa, 396.000 juta terkena dampak	0,854
Gempa bumi dan Tsunami	Sulawesi Tengah	2018	2.256 korban jiwa, 1,5 juta terkena dampak	1,3

Sumber: BNPB. https://dibi.bnbp.go.id/dibi

Masyarakat miskin dan rentan secara tidak proporsional terkena dampak bencana.[65] Hal ini disebabkan karena mereka lebih sering terpapar karena tinggal di daerah rentan seperti tanah

[64] Hanya lima bencana alam umum yang dipertimbangkan – gempa bumi, angin topan, banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan laut.
[65] Perkiraan dari Rush, J. V. (2013) menunjukkan bahwa, di tingkat kabupaten, peningkatan deviasi 1-standar dalam bahaya bencana dapat menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,8 persen dan kesenjangan kemiskinan sebesar 2,3 persen.

yang rawan banjir dan lereng bukit yang curam atau di pemukiman yang dirancang dan dibangun dengan buruk. Bencana juga dapat memaksa rumah tangga miskin untuk menggunakan strategi untuk mengatasi guncangan dengan cara-cara yang negatif atau merusak seperti melikuidasi tabungan dan aset, mengurangi asupan gizi, mengeluarkan anak-anak dari sekolah untuk bekerja, dan menunda atau mengabaikan kebutuhan kesehatan. Dalam semua kasus tersebut, kemampuan yang terbatas untuk menanggapi dan memulihkan dengan cepat mendorong rumah tangga yang sudah miskin menjadi semakin miskin, dan masyarakat yang rentan menjadi miskin. Oleh karena itu, lazim bagi rumah tangga untuk melakukan transisi untuk masuk dan keluar dari kemiskinan karena bencana dan guncangan terkait dengan perubahan iklim.

Perlindungan sosial juga memainkan peran kunci dalam melindungi aset Indonesia yang paling berharga: penduduknya

Program perlindungan sosial melindungi modal manusia dari penyakit dan bencana dan membangun ketahanan dengan mengasuransikan dampak buruk dari guncangan dan memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam aset dan mata pencaharian mereka, dan bukannya menabung untuk alasan pencegahan. Cakupan dan tingkat manfaat yang memadai dari program-program bantuan sosial dapat memainkan peran kunci untuk melindungi modal manusia dan membangun ketahanan. Sistem perlindungan sosial yang berfungsi baik, adaptif, dan responsif dapat melindungi rumah tangga miskin dan rentan terhadap risiko dan guncangan di sepanjang siklus kehidupan mereka. Ini meminimalkan perilaku mereka dalam mengatasi guncangan dengan cara-cara yang negatif (misalnya mengorbankan investasi produktif untuk mempertahankan konsumsi minimum) dan berkontribusi pada peningkatan modal manusia dan finansial para penerima bantuan dalam jangka panjang.

Sistem perlindungan sosial Indonesia di masa depan harus beradaptasi dan menanggapi dunia yang terus berubah

Sistem perlindungan sosial Indonesia di masa depan harus beradaptasi dan menanggapi dunia yang terus berubah dan tujuan yang berkembang. Secara khusus, perubahan teknologi, perubahan dalam cara dan lokasi orang bekerja, dan perkembangan demografis akan memengaruhi jenis sistem dan program perlindungan sosial yang dibutuhkan. Ini akan membutuhkan pemikiran ulang kontrak sosial yang dapat mendorong kesejahteraan bagi semua orang dan memungkinkan Indonesia untuk mencapai target pengentasan kemiskinan, modal manusia, dan pertumbuhan inklusif yang telah ditetapkan untuk tahun 2045. Apa yang tersirat dari peluang dan risiko ini bagi sistem perlindungan sosial Indonesia, termasuk bantuan sosial dan program jaminan sosial?

2. Selama dua dekade terakhir ini, Indonesia telah meletakkan dasar yang kuat untuk sistem perlindungan sosialnya di masa depan

2.1 Membangun dan Melindungi Modal Manusia: Program Bantuan Sosial Indonesia

Program bantuan sosial Indonesia adalah instrumen kebijakan utama untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan dan untuk membangun, mempekerjakan dan melindungi modal manusia

Sistem bantuan sosial Indonesia baru diperkenalkan pada akhir 1990-an, namun telah mengalami ekspansi yang signifikan dan mencapai hasil-hasil yang penting. Sistem ini telah berevolusi dari memberikan dukungan sementara pada saat dibutuhkan seperti dengan reformasi subsidi (BLSM/BLT)[66], ke mengimplementasikan serangkaian program inti permanen yang saat ini mencakup program bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan - PKH), subsidi pendidikan (Program Indonesia Pintar - PIP), bantuan ketahanan pangan (Rastra/BPNT), dan iuran jaminan kesehatan bersubsidi (JKN-PBI). Program-program ini ditargetkan untuk masyarakat miskin dan rentan, dan bertujuan untuk mendukung tingkat konsumsi mereka dan mengurangi angka kemiskinan. Saat ini, sistem bantuan sosial juga memainkan peran penting dalam membangun dan melindungi modal manusia Indonesia.

[66] Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat mentargetkan program bantuan langsung tunai tanpa syarat yang diluncurkan untuk mengkompensasi dampak reformasi subsidi energi; BLSM terakhir digunakan pada tahun 2015, bersamaan dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat untuk rumah tangga miskin, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek dan meningkatkan modal manusia melalui dukungan konsumsi yang dikombinasikan dengan investasi dalam pendidikan, kesehatan dan gizi. Keluarga juga didorong untuk berpartisipasi dalam Sesi Pengembangan Keluarga yang meningkatkan kesadaran tentang gizi, pendidikan anak usia dini, literasi keuangan, dan topik-topik terkait lainnya. Pada tahun 2019, 10 juta keluarga terdaftar dalam program ini. Untuk dapat memenuhi syarat, sebuah keluarga harus dimasukkan dalam *Unified Data Base* (UDB, sekarang disebut SIKS-NG) dan dinilai sebagai berada di bawah titik batas kemiskinan tertentu. Mereka juga harus memiliki ibu hamil atau menyusui atau memiliki satu atau lebih anak usia pra-sekolah atau usia sekolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah dari 25 persen rumah tangga termiskin. Biaya keuangan adalah kendala utama yang membatasi akses rumah tangga miskin ke layanan pendidikan. Mendaftarkan siswa ke sekolah mahal biayanya: biaya sendiri (termasuk transportasi) berkisar antara Rp 1 juta hingga lebih dari Rp 3 juta per tahun, tergantung pada tingkat sekolahnya. Pendidikan menengah (SMA dan SMK) bisa menjadi sangat mahal untuk rumah tangga termiskin: biaya reguler untuk menyekolahkan satu anak ke sekolah menengah atas menghabiskan sekitar 18 persen dari keseluruhan anggaran rumah tangga miskin. PIP menurunkan biaya bersih akses ke pendidikan tersebut dengan memberikan bantuan langsung tunai.

Untuk menanggapi kerawanan pangan yang terus-menerus terjadi, salah satu program bantuan sosial paling awal yang diluncurkan di Indonesia adalah Raskin, yang sekarang diganti namanya menjadi Rastra, menjadi program distribusi pangan yang saat ini diserap ke dalam program kupon makanan bernama BPNT. BPNT bertujuan untuk mencakup 15,6 juta keluarga pada akhir tahun 2019, di mana rumah tangga sasaran dapat menukar *voucher* bulanan sebesar Rp 110.000 dengan 10 kilogram beras atau telur di titik titik distribusi terkendali yang disebut E-Warong.[67] Pemerintah juga telah memulai persiapan untuk memperluas cakupan BPNT dengan memasukkan beberapa barang bergizi baru untuk dibeli dan meningkatkan jumlah manfaat untuk memungkinkan pembelian barang-barang tersebut.

Komponen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari skema Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, mensubsidi premi asuransi untuk rumah tangga miskin dan rentan dan membuat penggunaan semua layanan dan fasilitas layanan kesehatan yang tersedia menjadi gratis, sesuai dengan peraturan PBI-JKN. Menyadari bahwa rumah tangga miskin dan rentan memiliki tingkat pemanfaatan yang lebih rendah, tingkat kondisi yang dapat dicegah yang lebih tinggi, dan lebih banyak kehilangan penghasilan karena peristiwa kesehatan yang merugikan[68], fokus utama kebijakan perlindungan sosial Indonesia adalah akses perawatan kesehatan, perilaku sehat, dan hasil yang sehat untuk semua warga.

[67] BPNT kemungkinan akan diubah namanya menjadi Kartu Sembako pada tahun 2020. Bank Dunia (2017).
[68] Harimurti dkk. (2013).

Tabel B.1: Program Bantuan Sosial yang Utama di Indonesia

Program	Tujuan	Target Cakupan	Anggaran (Rp miliar)	Manfaat (nilai nominal atau rata-rata)	Kecukupan (% dari rata-rata konsumsi bulanan dari 10% masyarakat termiskin)	Cakupan 10% masyarakat termiskin yang memenuhi syarat	Kejadian penerima manfaat bagi 10% masyarakat termiskin memenuhi syarat*	Badan Pelaksana
PKH	Pengentasan kemiskinan, penguatan modal manusia	10 juta keluarga	34.300	Bantuan langsung tunai bersyarat – Rp 315.000/bulan	21%	47%	24%	Kementerian Sosial
PIP	Biaya sekolah yang lebih rendah	15 juta rumah tangga / 20 juta siswa	11.200	Bantuan langsung tunai – Rp 100.000/bulan	7%	56%	19%	Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama
BPNT / Rastra	Meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan gizi	15,6 juta rumah tangga (target akhir 2019 untuk BPNT)**	20.800	Rp 110.000/bulan/ KK untuk beras + telur	7%	42%	17%	Kementerian Sosial
PBI-JKN	Mencegah guncangan kesehatan	96,8 juta orang	26.700	Pembebasan biaya layanan kesehatan	7%	54%	15%	BPJS & Kemenkes

Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan data dari Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan.
Catatan: Cakupan dan kejadian kepada 10% masyarakat termiskin dari penerima manfaat yang memenuhi syarat dibangun dengan menggunakan data Susenas 2018 bulan Maret. Penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan cakupan aktual dari program PKH dan BPNT. * Kejadian penerima manfaat didefinisikan sebagai pangsa dari total penerima program yang ditemukan dalam 10% masyarakat termiskin. ** Rastra akan diserap sepenuhnya oleh BPNT pada akhir tahun 2019. Cakupan BPNT adalah sekitar 12 juta rumah tangga (RT) pada pertengahan tahun 2019.

Paket bantuan sosial "de-jure" yang ada saat ini menunjukkan bahwa keluarga miskin dengan anak-anak mereka terlindungi dengan baik

Gambar B.3 menggambarkan kecukupan "de-jure" dari manfaat bagi rumah tangga sasaran oleh program bantuan sosial di sepanjang distribusi kesejahteraan. Penggambaran secara de jure ini dalam arti bahwa titik batas di sepanjang sumbu horizontal mewakili bagian penduduk yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan masing-masing program, meskipun alokasi aktual semakin menjauh di sepanjang distribusi karena adanya kesalahan inklusi (*inclusion errors*).

Sesuai rencana, paket manfaat bantuan sosial untuk rumah tangga yang memiliki anak memberikan perlindungan yang memadai untuk rumah tangga di 15 persen penduduk termiskin

Secara khusus, rumah tangga yang berhak atas PKH harus menerima rata-rata 21 persen dari konsumsi median[69] di dalam bantuan langsung tunai. Jadi, jika suatu rumah tangga menerima PKH, sesuai rencana mereka akan menerima tingkat perlindungan minimum.[70] PIP, BPNT, dan PBI-JKN ditambahkan ke PKH sehingga menjadi paket perlindungan yang sangat memadai untuk 15 persen rumah tangga termiskin yang memiliki anak, sebesar rata-rata 36 persen dari konsumsi median. Manfaat PIP dan BPNT masing-masing merupakan rata-rata dari rata-rata 7 persen konsumsi median; dengan demikian, dengan hanya menerima PIP dan BPNT/Rastra saja (sekitar 14 persen dari anggaran konsumsi yang didukung) atau hanya menerima salah satu dari program-program bantuan yang lainnya, paket bantuan yang diberikan menjadi tidak memadai. Penduduk di luar 20 persen penduduk termiskin dengan demikian menerima paket

[69] Konsumsi rumah tangga rata-rata mengacu pada tingkat konsumsi oleh rumah tangga tertentu di mana setengah dari rumah tangga tersebut mengoonsumsi lebih banyak dan setengahnya lagi mengkonsumsi lebih sedikit

[70] Tingkat perlindungan minimum di sini didefinisikan secara relatif sebagai tingkat konsumsi minimum yang diperlukan untuk membawa rata-rata rumah tangga miskin ke atas garis kemiskinan, juga didefinisikan sebagai indeks kesenjangan kemiskinan. Kekhawatiran potensialnya adalah efek disinsentif dari pekerjaan yang harus dilakukan di antara para penerima. Namun demikian, literatur telah menunjukkan bahwa di negara-negara (termasuk Indonesia) yang memberikan bantuan langsung tunai yang mewakili tidak lebih dari seperempat konsumsi rata-rata kepada penerima manfaat, dampak ini tidak ada (Banerjee et al, 2017).

perlindungan minimal, dan mereka yang berada di luar 40 persen penduduk termiskin tidak menerima bantuan sesuai dengan yang direncanakan.

Gambar B.3: Nilai "de jure" dari manfaat bantuan sosial untuk rumah tangga yang memiliki anak, 2019
(dalam persen)

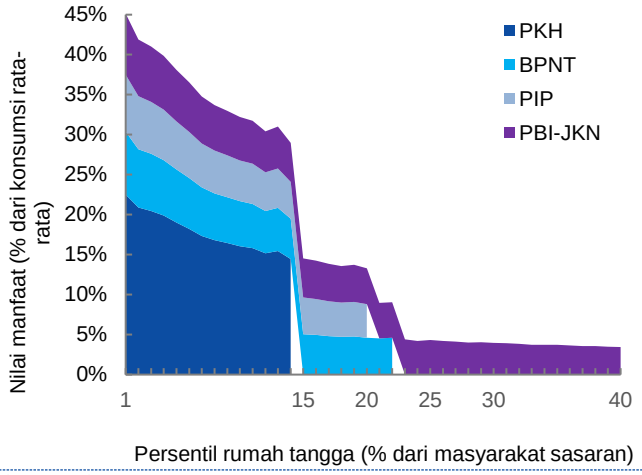

Sumber: Susenas 2018 dan perhitungan penulis

Gambar B.4: Nilai "de jure" dari manfaat bantuan sosial untuk 40% rumah tangga termiskin tanpa anak yang menerima dua program utama, 2019
(dalam persen)

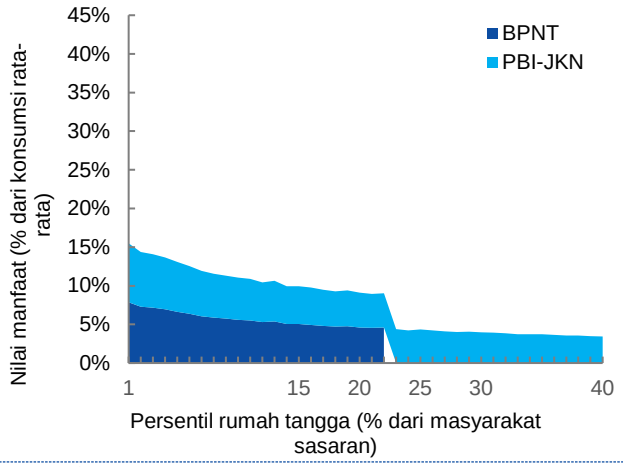

Sumber: Susenas 2018 dan perhitungan penulis

Sebaliknya, rumah tangga miskin dan rentan tanpa anak tidak mendapat perlindungan yang memadai

Rumah tangga tanpa anak hanya berhak menerima PBI-JKN dan BPNT/Rastra, bukan PIP atau PKH (Gambar B.4). Rumah tangga penerima BPNT menerima setara dengan sekitar 1 minggu bantuan makanan pokok melalui pemberian 10 kg beras dan telur. Nilainya sekitar 7 persen dari pengeluaran konsumsi rata-rata dan oleh karenanya hanya memberikan ketahanan pangan secara parsial. Dengan peningkatan yang direncanakan untuk tahun 2020, nilai manfaat ini akan meningkat menjadi sekitar 9 persen. Layanan kesehatan di bawah JKN untuk para penerima bantuan iuran (PBI) membantu melindungi rumah tangga yang berhak dari guncangan terkait masalah kesehatan.

Program cakupan yang bersifat "de-facto" berbeda dengan desain program de-jure

Terdapat kesalahan dalam proses memasukkan dan mengecualikan para calon penerima distribusi kesejahteraan, yang berarti bahwa beberapa rumah tangga dimasukkan ke dalam program bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat, sementara rumah tangga lainnya yang memenuhi kriteria kelayakan dikecualikan. Pada kenyataannya, sangat sedikit rumah tangga yang memiliki-anak yang menerima semua manfaat.[71] Sebagaimana terlihat pada Gambar B.5, ketika melacak cakupan di sepanjang distribusi konsumsi, alokasi aktual program jauh melampaui 40 persen masyarakat termiskin.[72] PBI-JKN mencakup pangsa tertinggi rumah tangga yang tidak miskin dan tidak rentan, diikuti oleh PIP, BPNT/Rastra dan kemudian PKH. Cakupan besar dari PBI-JKN di luar kelompok sasaran adalah fungsi dari ukuran programnya yang besar (Rastra memiliki tingkat kesalahan inklusi yang sama tingginya sebelum cakupannya dikurangi) dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima manfaat di bawah skema sebelumnya, Jamkesda. Pengaturan serupa diterapkan untuk PIP, yang juga kemungkinan menjelaskan sebagian mengenai tingkat kesalahan inklusi yang ada saat ini. Namun demikian,

[71] Kecukupan PKH, BPNT, dan PIP dinyatakan dalam nilai bantuan langsung tunai atau kupon makanan sebagai bagian dari pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. Kecukupan PBI-JKN, meskipun merupakan program bantuan iuran tanpa adanya manfaat langsung yang diberikan, dapat dianggap sebagai hal yang sama. Sederhananya, nilai bantuan iuran PBI dapat dibangun sebagai nilai iuran yang dibayarkan untuk rumah tangga oleh Pemerintah. Hal ini mengasumsikan bahwa elastisitas permintaan konstan terhadap PBI-JKN. Ukuran kecukupan lain untuk PBI-JKN akan terdiri dari pemanfaatan layanan kesehatan dibandingkan dengan adanya pengeluaran langsung yang tetap ada meskipun ada anggapan bahwa biaya layanan kesehatan dibebaskan di bawah program JKN.

[72] Penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan cakupan administrasi atas penduduk yang memenuhi syarat secara adil (cakupan PIP dan PKH dinyatakan sebagai pangsa dari rumah tangga yang memiliki setidaknya satu anak).

perlu dicatat bahwa meskipun terdapat kesalahan penetapan sasaran, tingkat keparahannya . Disaat kesalahan pengecualian masih tinggi, kesalahan tersebut telah menurun melalui perluasan cakupan. Dimasukkannya populasi yang termasuk di dalam persentil 40 hingga 70 dalam beberapa hal dapat diterima, karena distribusi kesejahteraan relatif datar sampai sekitar persentil 70, yang menunjukkan adanya perbedaan kecil dalam status kesejahteraan di antara rumah tangga di bagian distribusi ini. Penetapan rumah tangga sasaran dari program bantuan langsung tunai, khususnya PKH, menjadi paling efisien dalam mengalokasikan manfaat kepada masyarakat miskin dan rentan. Pada tahun 2018, PKH dan PIP masing-masing mengalokasikan 71 persen dan 63 persen manfaat bagi 40 persen masyarakat termiskin. Diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penetapan sasaran dan memastikan pemanfaatan penuh Database Terintegrasi (*Unified Data Base* (UDB)) untuk meningkatkan efisiensi alokasi manfaat bantuan sosial.

Gambar B.5: Nilai manfaat dan cakupan program Bantuan Sosial utama tahun 2019

(cakupan atas penduduk yang memenuhi syarat dalam persen dan nilai manfaat dalam persen dari penghasilan rata-rata untuk setiap desil; desil konsumsi)

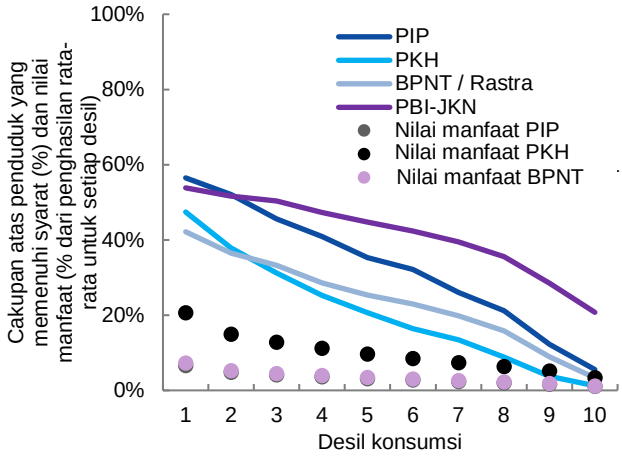

Sumber: Susenas 2018. Penyesuaian cakupan yang dilakukan: cakupan diberikan kepada penduduk yang memenuhi syarat dan cakupan survei ditingkat hingga tingkat cakupan administrative tahun 2019. Cakupan BPNT diukur dengan menggunakan variabel keikut-sertaan dalam BPNT atau Rastra. Diharapkan bahwa putaran Susenas di masa depan akan menunjukkan cakupan BPNT yang lebih rendah di antara kelompok-kelompok penduduk non-sasaran.

Bantuan sosial berkontribusi cukup besar terhadap peningkatan modal manusia yang dibuktikan dengan dampak positif di tingkat rumah tangga di bidang kesehatan dan pendidikan

PKH telah sangat berhasil dalam meningkatkan modal manusia. Evaluasi dampak terbaru, yang diterbitkan pada tahun 2018, mendapati bahwa stunting di antara para penerima PKH menurun sebesar 9 hingga 11 poin persentase (stunting diperkirakan berdampak pada 28 persen dari semua anak di Indonesia pada tahun 2019). Pendaftaran masuk ke sekolah dasar (SD) meningkat sebesar 4 poin persentase di antara para penerima manfaat. Ini menjadi hal yang sangat mengesankan, mengingat bahwa angka partisipasi murni sekolah dasar sudah tinggi, sekitar 93 persen. Pendaftaran untuk masuk ke sekolah menengah pertama (SMP) meningkat sekitar 8 poin persentase – angka partisipasi murni di SMP adalah sekitar 78 persen. Telah didapati pula dampak positif PKH pada konsumsi dan perilaku hidup sehat sehubungan dengan praktik ibu dan bayi baru lahir.[73]

Terdapat kesenjangan cakupan untuk kelompok-kelompok tertentu dalam sistem bantuan sosial, terutama untuk lansia

Lansia di Indonesia adalah kelompok yang rentan saat ini (sekitar 36 persen adalah miskin atau rentan) dan akan menjadi semakin meningkat jumlahnya di masa depan, mengingat tren penuaan yang cepat. Meskipun terdapat program-program bantuan sosial untuk lansia untuk mengatasi risiko usia tua, program-program tersebut sangat terbatas. Para penyandang cacat adalah kelompok lain yang perlu dilindungi secara lebih baik. Kesenjangan cakupan akhir berkaitan dengan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, yang terkena dampak buruk dari bencana alam dan guncangan serta tekanan terkait iklim, karena sistem bantuan sosial saat ini

[73] Cahyadi dkk. (2018).

tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mereka untuk "bangkit kembali" setelah terjadinya peristiwa semacam itu.

Fenomena penuaan dapat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi perekonomian, termasuk penyediaan layanan kesehatan yang berkelanjutan, pensiun, dan perawatan jangka panjang bagi para lansia. Meskipun Indonesia belum menghadapi angkatan kerja yang menyusut, negara ini menua dengan cepat dan menghadapinya tanpa adanya seperangkat alat pelindung yang memadai. Dukungan bantuan sosial bagi para lansia di Indonesia rendah. Ini, ditambah dengan cakupan jaminan hari tua yang rendah dan regresif secara keseluruhan (Gambar B.6), membuat jaminan penghasilan untuk lansia miskin menjadi masalah yang signifikan. Walaupun sudah ada program bantuan lansia, program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan cakupan yang kecil. Pada saat yang sama, ada beberapa kemajuan dalam cakupan lansia dan penyandang disabilitas di lingkungan keluarga penerima PKH; peningkatan ini sangat berharga namun tidak merata dalam melindungi lansia atau penyandang cacat yang tidak tinggal di keluarga penerima PKH.

Gambar B.6: Total cakupan pensiun di antara penduduk berusia 65+ menurut desil, 2018
(cakupan dalam persen)

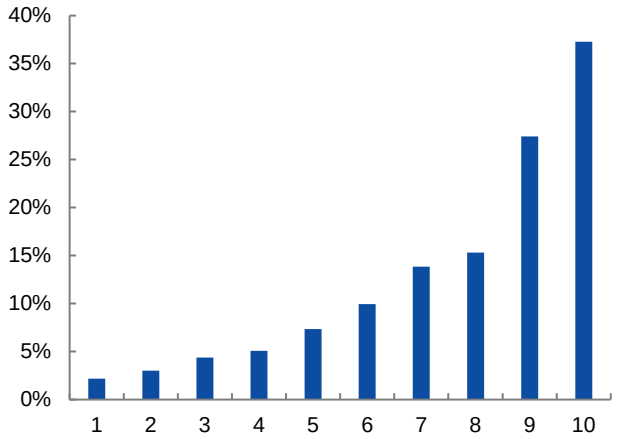

Sumber: Susenas 2018, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan pensiun veteran.

Total belanja untuk bantuan sosial tetap rendah yaitu sebesar 0,7 persen dari PDB, yang lebih kecil dari rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah

Belanja Pemerintah Pusat untuk program bantuan sosial rumah tangga utama yang ditargetkan tidak termasuk subsidi telah meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil antara tahun 2009 dan 2018, mencapai Rp 87,5 triliun pada tahun 2018. Belanja tersebut mencerminkan peningkatan besar dalam cakupan; PKH dan PIP melipatgandakan jumlah penerima manfaat antara tahun 2010 dan 2017 dan PKH sekarang ini mencakup 10 juta keluarga dengan bantuan langsung tunai bersyarat. Namun demikian, total belanja untuk bantuan sosial tetap rendah, yaitu sebesar 0,7 persen dari PDB, yang lebih kecil dari rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah secara global (Gambar B.7). Ketika membandingkan Indonesia dengan beberapa negara setara di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP), pangsa dari PDB untuk bantuan sosial serupa dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia. Namun

Gambar B.7: Belanja bantuan sosial sebagai bagian dari PDB (%) - negara terpilih
(persen)

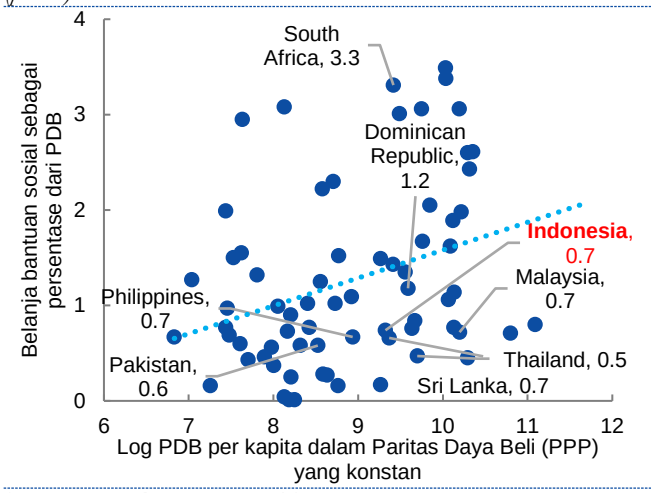

Sumber: Bank Dunia (2017b), ASPIRE, dan perhitungan staf Bank Dunia 2019.
Catatan: Seleksi berdasarkan ketersediaan data. Sorotan warna hijau menunjukkan negara-negara yang memiliki kinerja pemungutan penerimaan yang sama dengan Indonesia, yang disorot dalam warna oranye.

demikian, ini lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara Amerika Latin (LAC) dan Eropa Timur dan Asia Tengah (ECA). Bukti secara global menunjukkan bahwa belanja secara agregat dari bantuan sosial (jaring pengaman sosial) rata-rata sebesar 1,6 persen dari PDB, dengan rata-rata untuk negara-negara berpendapatan rendah sekitar 1,5 persen dari PDB.[74]

2.2 Mempekerjakan Modal Manusia: Komposisi dan Kinerja Program Jaminan Sosial Indonesia

Jaminan sosial dapat membantu rumah tangga dan individu menghadapi guncangan besar yang mempengaruhi sebagian besar penduduk

Jaminan sosial dapat membantu mengatasi guncangan yang berkaitan dengan biaya prosedur medis, pengangguran, cacat, kematian, dan usia tua. Sementara bantuan sosial bertujuan untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan kronis, jaminan sosial yang efektif memungkinkan rumah tangga untuk memperlancar konsumsi selama siklus hidup mereka. Dengan menggabungkan risiko, hal ini mengurangi dampak guncangan dengan biaya yang cukup rendah relatif terhadap mekanisme alternatif untuk mengatasi guncangan seperti asuransi mandiri, pinjaman, atau penjualan aset. Lebih jauh lagi, perlindungan ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam modal manusia dan mata pencaharian mereka bukannya dengan menabung untuk alasan pencegahan.

Sistem jaminan sosial Indonesia relatif baru dan negara ini telah membuat kemajuan yang signifikan dalam implementasinya dan memperluas cakupannya, khususnya jaminan kesehatan. Sekarang ada jaminan kesehatan nasional tunggal yang besar untuk seluruh rakyat Indonesia (JKN), tiga skema pensiun terpisah untuk pekerja sektor formal swasta, pegawai negeri sipil, dan angkatan bersenjata, serta tunjangan kecelakaan terkait pekerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK) dan jaminan kematian (Jaminan Kematian, JKM) untuk pekerja bergaji dan yang tidak bergaji. Reformasi pada tahun 2014 telah mengarah pada rasionalisasi kerangka hukum dan pengaturan kelembagaan untuk program ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Peningkatan jumlah masyarakat yang ditanggung oleh jaminan kesehatan (JKN) – dari 130 juta menjadi lebih dari 200 juta dalam lima tahun terakhir – adalah suatu pencapaian besar[75].

Perluasan cakupan jaminan sosial untuk risiko lainnya jauh lebih lambat. Pada tahun 2018, masing-masing hanya 14 juta dan 11 juta pekerja dicakup untuk program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). Cakupan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaminan kesehatan (JKN) ini sebagian karena tidak adanya subsidi iuran untuk pekerja sektor informal. Namun demikian, hal itu juga karena sebagian besar pekerja sektor formal didapati berada di perusahaan yang memiliki kurang dari 20 karyawan (perusahaan kecil dan mikro) dan oleh karenanya tidak diwajibkan untuk membayar iuran. Selanjutnya, kecukupan untuk pekerja saat ini rendah, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat penggantian yang rendah.

[74] Bank Dunia (2018b). Perkiraan belanja bantuan sosial untuk Indonesia mencakup angka anggaran nominal untuk program padat karya (cash for work) yang baru dibentuk.

[75] Namun demikian, saat pemanfaatan jaminan kesehatan meningkat, masih terdapat masalah yang signifikan dalam hal akses bagi masyarakat miskin, terutama di daerah-daerah terpencil di negara ini. Terdapat kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam cakupan, dengan perkiraan 60 juta "masyarakat menengah yang tidak tercakup", yang belum tercakup. Selanjutnya, biaya jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah meningkat dan defisit telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini (total sekitar 0,1 persen dari PDB pada tahun 2018).

Tabel B.2: Program Jaminan Sosial yang Utama

Program	Tujuan secara umum	Target cakupan	Cakupan bagi yang memenuhi syarat	Jumlah iuran	Uraian manfaat	Badan Pelaksana
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	Mencegah guncangan karena masalah kesehatan	268 juta orang[1]	223 juta; 83% (2019)	5% dari penghasilan bulanan (pekerja bergaji) atau Rp 42.000-Rp160.000 (tidak bergaji dan bukan pekerja	Pembebasan biaya layanan kesehatan	BPJS Kesehatan
JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	Layanan kesehatan dan manfaat tunai untuk cedera terkait dengan pekerjaan dan/atau kematian	120 juta orang[2]	17,8 juta[4]; 15% (2017)	0,24% –1,75% dari penghasilan bulanan	Perawatan medis dan manfaat tunai[5]	BPJS Ketenagakerjaan
JKM (Jaminan Kematian)	Manfaat tunai untuk ahli waris dalam hal kematian peserta			0,3% dari penghasilan bulanan (pekerja bergaji) atau Rp 6,800 (pekerja tidak bergaji)	Dana bantuan kematian, dana bantuan pemakaman, dan beasiswa senilai total 36 juta[6]	
JHT (Jaminan Hari Tua)	Memastikan peserta memiliki tabungan saat memasuki masa pensiun atau dalam hal cacat tetap total.		15,4 juta; 12% (2018)	5,7% dari penghasilan bulanan (gaji) atau sekitar 2% (pekerja tidak bergaji)	Pembayaran tunai sekaligus setelah pensiun[7]	
JP (Jaminan Pensiun)	Memastikan kondisi kehidupan yang layak bagi para peserta pasca pensiun atau dalam keadaan cacat total	45 juta orang[3]	11.8 juta; 26% (2018)	3% dari penghasilan bulanan	Pembayaran tunai bulanan	

Sumber: Kementerian Keuangan, data BPJS
[1] Jumlah total penduduk pada bulan Juli 2019 termasuk PBI. [2] Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2018; [3] jumlah pegawai formal tidak termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2018; [4] data 2017, tidak termasuk jumlah pekerja konstruksi; [5] tergantung pada tingkat keparahan cedera (kecacatan) dan penghasilan bulanan; [6] manfaat beasiswa mensyaratkan kepesertaan minimal 5 tahun; [7] peraturan yang memungkinkan penarikan dini mencakup pemutusan hubungan kerja dan pengunduran diri sebagai bentuk pensiun.
Catatan: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menetapkan definisi dan batasan SJSN. Pasal ini menetapkan bahwa "jaminan sosial adalah mekanisme pengumpulan dana wajib yang berasal dari iuran dan digunakan untuk melindungi dari risiko sosial-ekonomi" Pasal 1 (3). Lebih lanjut, undang-undang ini mendefinisikan "pekerja adalah orang perorangan yang bekerja dan yang menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, Pasal 1 (11).

Saat ini tidak ada sistem tunjangan pengangguran di Indonesia. Hal ini, dikombinasikan dengan sistem pembayaran pesangon dengan kepatuhan rendah yang tidak diterapkan secara memadai, telah menyebabkan sejumlah besar penarikan awal dari skema jaminan hari tua (JHT) setelah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 di tahun 2015[76] (lihat Gambar B.8). Hal ini telah melemahkan fungsi jaminan hari tua sebagai bagian dari sistem pensiun dan malah menjadikannya sebagai rekening pengangguran de-facto bagi banyak pekerja.

[76] Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2015 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua". Peraturan tersebut secara mendasar telah mengubah persyaratan penarikan JHT dengan memungkinkan penarikan tanpa harus memenuhi persyaratan iuran minimum 10 tahun.

Gambar B.8: Penarikan meningkat tajam sejak Peraturan Pemerintah No. 60 diterbitkan pada tahun 2015
(klaim)

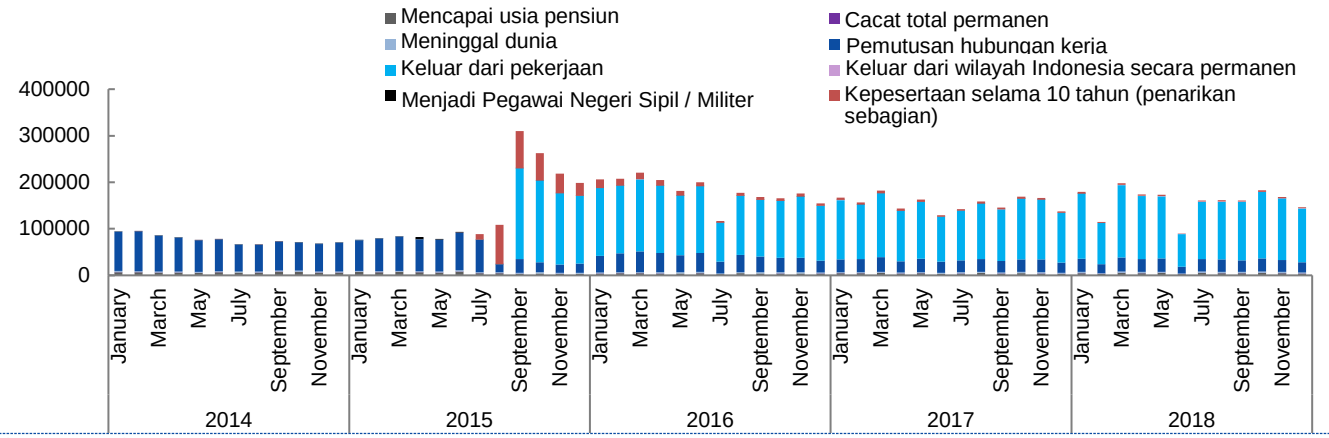

Sumber: BPJS Kesehatan (2019)

Seperti di negara-negara Asia Timur lainnya yang sedang berkembang, jumlah penduduk yang menua jauh lebih cepat daripada perkembangan jaminan pensiun ber-iuran yang tradisional di Indonesia

Skema Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mulai beroperasi pada tahun 2015, akan membayar secara penuh pensiun hanya setelah tahun 2050.[77] Meskipun cakupan meningkat ketika perusahaan dan karyawan terdaftar, pengalaman internasional (Gambar B.9) menunjukkan bahwa potensi cakupan berdasarkan pada pekerjaan sektor formal terbatas. Sebagian besar pekerja akan terus dikecualikan dan jaminan pensiun bagi sebagian kecil pekerja yang ditanggung akan lebih rendah dibandingkan dengan tolok ukur internasional. Tanpa adanya langkah-langkah tambahan untuk memasukkan pekerja sektor informal dan untuk memastikan bahwa lansia miskin dilindungi oleh bantuan sosial, persentase lansia yang hidup dalam kemiskinan hampir pasti akan meningkat.

Gambar B.9: Tingkat cakupan dana pensiun antar negara dan tingkat penghasilan
(persen)

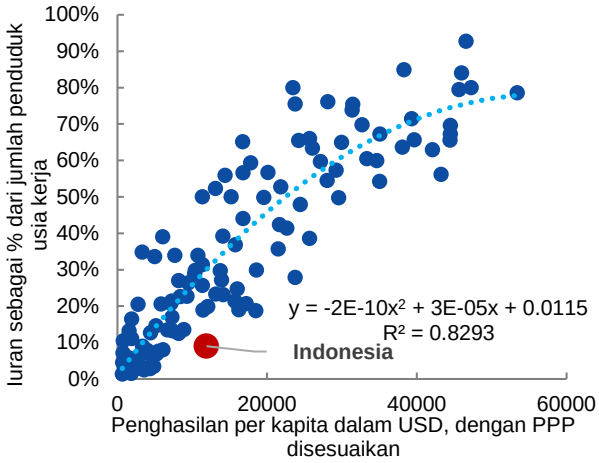

Sumber: Database pensiun Bank Dunia.

Selain tekanan fiskal jangka pendek yang timbul dari defisit jaminan kesehatan, demografi pegawai negeri sipil akan menyebabkan peningkatan belanja pensiun pada dekade mendatang. Pensiun pegawai negeri telah dibiayai atas dasar skema *pay-as-you-go* (ini adalah skema pembayaran dana pensiun dari hasil iuran PNS yang dipotongkan beberapa persen dari gaji selama bekerja ditambah dengan dana dari APBN), sehingga setiap pengeluaran baru akan meningkatkan defisit. Sementara itu, skema pensiun SJSN yang mencakup sektor swasta akan mengumpulkan cadangan yang signifikan tetapi pada akhirnya akan mengalami defisit.

[77] Bank Dunia (2016a).

3. Perlindungan Sosial untuk Masa Depan Indonesia: Sistem PS yang koheren, terkonsolidasi, dan terkoordinasi untuk melayani negara yang berubah di dunia yang terus berubah

Profil demografi Indonesia dan sifat pekerjaan yang berubah menghadirkan tantangan bagi kebijakan dan program perlindungan sosial yang harus ada agar dapat membantu masyarakat dalam mengelola risiko terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka

Indonesia telah melewati dua dekade terakhir dengan sangat baik dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan perkembangan sosial-ekonomi. Hal tersebut dapat lebih dipercepat jika Indonesia mampu memanfaatkan peluang saat ini yang muncul dari profil demografi yang menguntungkan, berasal dari tumbuhnya angkatan kerja muda serta berkembangnya kelas menengah, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan, dan menjadi sumber pertumbuhan wirausaha serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, lingkungan yang berubah dengan cepat, termasuk profil demografi Indonesia dan sifat pekerjaan yang berubah ditambah dengan informalitas yang terus menerus muncul di pasar tenaga kerja, juga menghadirkan tantangan bagi kebijakan dan program perlindungan sosial yang harus ada agar dapat membantu masyarakat dalam mengelola risiko dalam kehidupan dan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk memikirkan kembali pembagian risiko dalam kontrak sosial serta mengembangkan sistem perlindungan sosial di Indonesia secara keseluruhan agar layanan perlindungan sosial dapat secara memadai memenuhi tuntutan perubahan yang berkembang pesat. Sistem PS yang mampu menjawab tuntutan perubahan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari status pekerjaan mereka. Meskipun Indonesia telah membangun program dan sistem yang solid, baik dalam bantuan sosial dan jaminan sosial, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat cakupan, penyelenggaraan, dan efisiensi di kedua bidang tersebut serta dalam mengembangkan sistem kohesif yang mampu melayani semua orang yang membutuhkan. Masih banyak hal yang harus dilakukan agar keseluruhan sistem PS dapat menjadi inklusif, memadai, berkelanjutan, dan efisien untuk menjawab kebutuhan di masa depan.

Sistem perlindungan sosial Indonesia di masa depan harus mendukung rumah tangga dan individu dalam masa transisi yang berbeda-beda

Sistem perlindungan sosial harus mendukung masyarakat dalam masa transisi. Hal ini termasuk transisi dari pengangguran ke mendapat pekerjaan; dari kemiskinan atau kerentanan ke kemakmuran; dari masa muda ke masa tua; dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya; di antara berbagai lokasi geografis; selama masa sakit atau cedera; atau setelah terjadinya suatu guncangan. Dengan demikian, sistem PS dapat memenuhi perubahan kebutuhan penduduk Indonesia dan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi penduduk usia lanjut, mendukung pencarian pekerjaan, serta memberikan dukungan keuangan jika terjadi suatu guncangan. Sistem perlindungan sosial Indonesia di masa depan harus menjadi salah satu sistem yang berkontribusi terhadap kekayaan nasional dan akumulasi sumber daya manusia, mampu merespon dinamika sosial dan berbagai kebutuhan baru, serta secara aktif mendukung kelas menengah. Unsur penting dari sistem PS adalah bahwa sistem ini harus memiliki semangat universal dan dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia, terlepas dari apakah pekerjaan mereka adalah pekerjaan formal atau informal.

Kontrak sosial yang baru dapat memberikan jaminan minimum, dikombinasikan dengan jaminan sosial universal dasar yang tidak dikaitkan dengan bagaimana

Untuk mengejar visi ini, Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan paket jaring pengaman, asuransi, tabungan, dan layanan yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dari guncangan dan memberi mereka instrumen untuk mengelola risiko dan ketidakpastian. Meningkatnya risiko yang dihadapi dalam perubahan sifat pekerjaan juga menuntut penyesuaian terhadap perlindungan pekerja.[78] Suatu kontrak sosial yang baru dapat memberikan jaminan minimum, dikombinasikan dengan jaminan sosial universal dasar yang tidak dikaitkan dengan bagaimana atau di mana orang bekerja. Kontrak sosial baru ini dapat membentuk sistem yang 1) memberikan jaminan perlindungan minimum kepada seluruh masyarakat sepanjang siklus kehidupan mereka melalui suatu paket program, dan 2) melengkapi jaminan minimum tersebut dengan serangkaian program jaminan sosial wajib dan dibiayai secara individual untuk

[78] Packard et al. (2019).

atau di mana orang bekerja

mengamankan konsumsi. Jaminan perlindungan minimum tersebut dapat disalurkan melalui berbagai macam bentuk, serta dapat dicapai melalui serangkaian program atau dengan memperluas intervensi individu. Masing-masing modalitas ini menyajikan keunggulan komparatif yang berbeda-beda dan memiliki implikasi administratif, fiskal, dan politik.

Di Indonesia, yang sistem bantuan sosialnya relatif sudah matang, jaminan minimum tersebut dapat dicapai dengan merasionalisasi program-program yang ada saat ini dan memperluas cakupan bantuan sosial untuk rumah tangga, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki anak, serta memastikan para lansia dan penyandang disabilitas terlindungi. Bantuan sosial ini dapat dilengkapi dengan subsidi yang berbeda-beda dan tepat sasaran yang mencakup bantuan premi dan iuran jaminan sosial bagi para pekerja sektor informal. Program jaminan sosial yang sudah ada dapat lebih diefisienkan lagi dengan menerapkan reformasi seperti meningkatkan usia pensiun secara bertahap di dalam skema pensiun SJSN, dan merasionalisasi skema pensiun pegawai negeri serta memindahkan para pegawai negeri sipil yang lebih muda ke dalam program nasional. Reformasi jaminan sosial ini dapat memunculkan tunjangan pengangguran melalui penggabungan sistem pembayaran pesangon saat ini yang dilakukan dengan cara memberi pendanaan awal ke dalam rekening tabungan pengangguran untuk dikelola bersama dengan program tabungan hari tua yang ada.

Gambar B.10: Visi 2025
(tingkat perlindungan; kelas dalam persen)

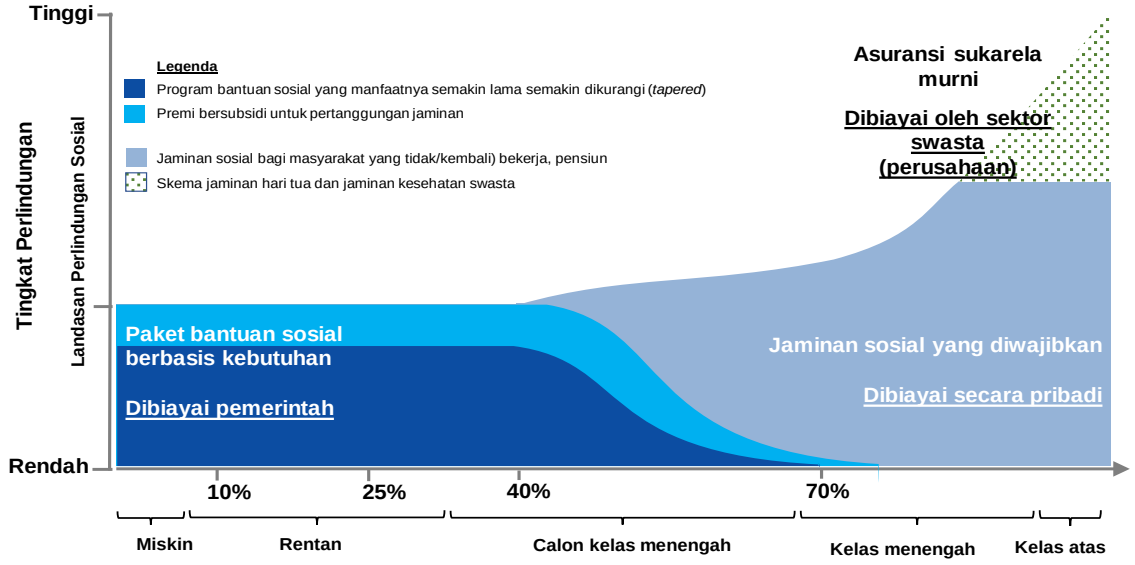

Sumber: Ilustrasi penulis. Gambar dan distribusi kesejahteraan adalah ilustrasi. Catatan: meskipun landasan perlindungan sosial atau jaminan minimum dibayangkan sebagai rata, jaminan minimum tersebut tidak mencakup tingkat manfaat yang sama secara absolut; misalnya untuk bantuan langsung di bawah skema bantuan langsung tunai bersyarat yang semakin menurun nilainya (*tapered*), dan nilainya akan ditetapkan relatif terhadap jarak konsumsi rata-rata rumah tangga dengan garis kemiskinan dan kerentanan di seluruh kelompok masyarakat yang berbeda.

Indonesia dapat secara progresif bergerak menuju jaminan minimum dan menjangkau lebih banyak penduduk Indonesia dengan mengurangi manfaat bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar B.10, hal tersebut memerlukan perluasan paket bantuan sosial berbasis kebutuhan dan dibiayai Pemerintah terhadap bagian yang lebih besar dari jumlah penduduk. Dengan distribusi penduduk yang ada saat ini, serta dengan sejumlah besar masyarakat yang masuk di dalam kategori miskin, rentan, dan CKM, jaminan minimum ini dapat mencakup beberapa rumah tangga hingga persentil ke-70. Tingkat jaminan perlindungan minimum harus ditetapkan sehingga mampu memberikan dukungan konsumsi dan perlindungan yang memadai terhadap suatu guncangan rumah tangga. Jaminan minimum tersebut digunakan untuk mengangkat rumah tangga ke atas garis kemiskinan, dengan manfaat

yang semakin dikurangi yang menunjukkan berkurangnya dukungan untuk rumah tangga ketika kebutuhan mereka terhadap bantuan semakin berkurang ketika posisi mereka sudah meningkat dalam distribusi konsumsi. Lintasan program perlindungan sosial kepada golongan masyarakat ini akan memiliki implikasi terhadap kaburnya kategori antara program non-iuran dan program beriuran dari waktu ke waktu, dan adanya suatu periode transisi di mana Pemerintah membiayai subsidi iuran untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang paling miskin, serta bagi para pekerja informal.

Seiring waktu, ketika ekonomi terus bertumbuh dan Indonesia berkembang lebih jauh menjadi negara berpenghasilan tinggi, CKM dan jumlah masyarakat yang miskin dan rentan akan menurun dan kelas menengah akan tumbuh lebih besar. Kebutuhan paket bantuan sosial akan terus berkurang, dan seiring waktu, kemungkinan hanya akan dibutuhkan oleh sekelompok kecil masyarakat yang dikategorikan miskin. Pada saat yang sama, bagian yang lebih besar dari jumlah penduduk akan ditanggung oleh paket jaminan sosial yang memadai. Pada tahun 2045, diharapkan kelas menengah akan meningkat secara signifikan, dan pangsa rumah tangga miskin dan rentan yang membutuhkan bantuan sosial akan menurun (Gambar B.11[79]).

Gambar B.11: Visi 2045
(tingkat perlindungan; kelas dalam persen)

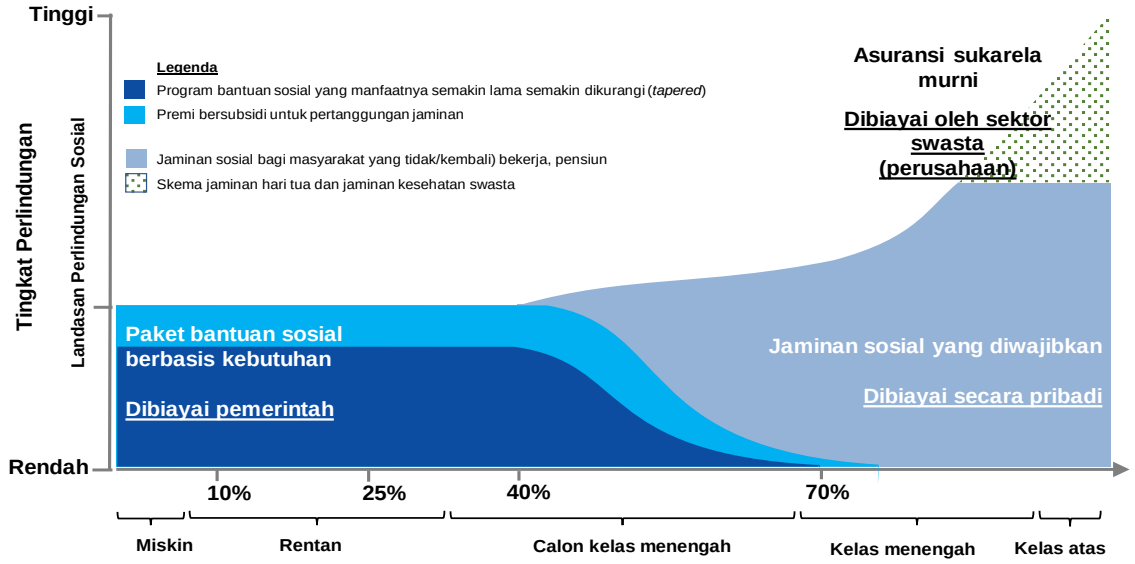

Sumber: Ilustrasi penulis. Gambar dan distribusi kesejahteraan adalah ilustrasi.

4. Bergerak menuju sistem Perlindungan Sosial untuk masa depan

4.1. Menetapkan Jaminan Minimum untuk Memberikan Landasan Perlindungan Sosial

"Jaminan Minimum" dapat memberikan perlindungan dasar bagi semua orang

Tujuan kebijakan dari "jaminan minimum" inti adalah untuk dapat secara efektif mencegah kemiskinan di antara kelompok masyarakat rentan pada atau dekat garis kemiskinan serta mencegah pemiskinan lebih lanjut dari masyarakat yang sudah miskin dengan memberikan landasan perlindungan dasar sosial bagi semua orang. Selain itu, jaminan minimum tersebut dapat mendorong tercapainya tujuan prioritas lain seperti percepatan sumber daya manusia berkualitas, produktivitas dan mobilitas tenaga kerja, dan tanggapan bencana dengan terus menggunakan instrumen kebijakan seperti bantuan langsung tunai bersyarat, membangun

[79] Distribusi dalam gambar hanya ilustrasi saja.

keterhubungan dengan program-program ketenagakerjaan atau keterampilan, dan dengan memasukkan pembangunan ketahanan dan mekanisme pembiayaan yang responsif.

Memastikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif di Indonesia melalui jaminan minimum akan mensyaratkan adanya perluasan paket bantuan sosial berbasis kebutuhan dan dibiayai oleh Pemerintah terhadap bagian yang lebih besar dari jumlah penduduk dibandingkan dengan yang sudah tercakup saat ini. Pembayaran manfaat dapat bersifat kontinjensi dan progresif, artinya manfaat baru tersedia ketika dan saat diperlukan. Beberapa manfaat mungkin tidak diperlukan oleh banyak orang atau bahkan sama sekali tidak diperlukan dalam periode tertentu, sehingga yang penting adalah universalitas ruang lingkup untuk perlindungan kerugian yang membuat suatu kelompok masyarakat menjadi miskin. Masyarakat yang tidak menderita kerugian tersebut dapat ditanggung oleh jaminan ini, namun tidak pernah benar-benar menerima pembayarannya. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan kebijakan perlindungan sosial universal yang progresif dengan melibatkan pengurangan manfaat jaminan yang dibiayai oleh pemerintah bagi masyarakat yang distribusi penghasilannya lebih tinggi.

Sistem yang komprehensif dapat merasionalisasi program-program yang ada saat ini dan memperluas cakupan bantuan sosial untuk rumah tangga yang tidak memiliki anak, terutama untuk lansia

Berbagai program bantuan sosial yang saat ini berjalan di Indonesia memberikan dasar yang kuat. Program-program tersebut dapat dikonsolidasikan dan direformasi lebih lanjut untuk turut melibatkan kesenjangan yang ada saat ini bagi masyarakat miskin/rentan, rumah tangga yang tidak memiliki anak, dan golongan lanjut usia. Sementara skema pensiun saat ini (JHT) dirancang untuk melindungi penduduk usia kerja saat ini dari kemiskinan di masa tua nantinya, terdapat 5,4 juta lansia dan 3,5 juta penyandang disabilitas yang miskin atau rentan saat ini yang akan tidak mendapat perlindungan dari guncangan terkait dengan usia tua jika tidak terdapat suatu rancangan jaring pengaman yang layak bagi mereka. Rumah tangga yang tidak memiliki anak juga tidak terlindungi dengan baik karena mereka saat ini hanya memenuhi syarat untuk menerima BPNT dan PBI-JKN. Untuk kelompok masyarakat ini, meningkatkan kecukupan BPNT, diikuti dengan memasukkan mereka ke dalam program lain seperti pengembangan keterampilan, akan memberikan lapisan perlindungan yang sangat dibutuhkan. Mengingat kesenjangan cakupan bantuan sosial yang masih ada dan sedikit perbedaan kecil dalam tingkat konsumsi antara rumah tangga di kuintil terbawah, terdapat justifikasi yang jelas untuk memperluas cakupan bantuan sosial di luar cakupan saat ini sekitar 20 persen dari jumlah penduduk.

Berdasarkan program yang sudah ada, terdapat tiga opsi dapat dipertimbangkan untuk memenuhi paket jaminan minimum tersebut:(i) Mengkonsolidasikan pemberian bantuan langsung tunai dengan mengintegrasikan program PKH dan PIP; (ii) Memperluas jaring pengaman dengan meningkatkan cakupan PKH dan BPNT ke 40 persen masyarakat termiskin dan menyediakan paket perlindungan yang lebih memadai[80], dengan tingkat manfaat yang semakin lama semakin dikurangi (*tapered*)[81]; dan (iii) Meningkatkan perlindungan bagi lansia dan

[80] Untuk pemodelan yang dilakukan di dalam laporan ini, tingkat manfaat BPNT disesuaikan menjadi Rp 135.000 untuk rumah tangga yang menerima PKH yang ada saat ini dan menjadi Rp 220.000 untuk rumah tangga yang tidak menerima PKH. Kemudian diumumkan bahwa tingkat manfaat BPNT akan meningkat menjadi Rp 150.000 pada tahun 2020.

[81] Manfaat dapat dikurangi dan ditingkatkan kepada tingkat kesejahteraan relatif terhadap konsumsi rata-rata di garis kerentanan. Agar rumah tangga rentan rata-rata berada di atas garis kerentanan (1,5 kali garis kemiskinan), paket bantuan langsung tunai bernilai sekitar 60% dari tingkat manfaat PKH saat ini dapat ditawarkan kepada keluarga rentan dalam persentil desil konsumsi 16 hingga 40. Untuk memperhitungkan posisi relatif rata-rata dari garis kerentanan, bantuan langsung tunai ditetapkan pada dua tingkatan: tingkat pertama memperhitungkan nilai PKH dan BPNT pada tingkat yang ada, yang cukup untuk membawa rata-rata rumah tangga miskin untuk berada di atas garis kemiskinan. Tingkat yang kedua memandang posisi rumah tangga rentan rata-rata terkait dengan garis kerentanan dan menetapkan paket perlindungan rata-rata yang mencukupi untuk mengangkat rumah tangga tersebut berada tepat di atas garis kerentanan. Hal ini secara signifikan akan mengurangi kemungkinan rumah tangga-rumah tangga tersebut jatuh ke dalam kemiskinan.

penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada 70 persen masyarakat termiskin yang berusia 65 tahun ke atas[82] dan kepada para penyandang disabilitas.

(i) Mengintegrasikan program PKH dan PIP.

Program PKH dan PIP saat ini melayani kelompok penduduk dan tujuan yang serupa. Mengintegrasikan kedua program tersebut di bawah PKH akan memperkuat penetapan sasaran dan pelaksanaan program. PKH dan PIP yang terpadu juga akan berdampak pada cakupan yang lebih tinggi kepada masyarakat miskin, dan para penerima manfaat PIP akan menerima dukungan yang jauh lebih memadai melalui peningkatan manfaat rata-rata dari 7 persen menjadi 21 persen dari konsumsi rata-rata. Dari sudut pandang efisiensi, integrasi PIP dan PKH dapat menghasilkan tambahan penurunan angka kemiskinan sekitar 0,2 poin persentase. Biaya administrasi dalam menjalankan PIP secara paralel juga akan dapat dihemat.[83]

(ii) Meningkatkan cakupan PKH dan BPNT dengan tingkat manfaat yang semakin menurun (*tapered*)

Distribusi kesejahteraan di Indonesia relatif rata, dan sekitar 40 persen rumah tangga miskin pada tahun tertentu tidak miskin di tahun sebelumnya.[84] Karena itu, segmen penduduk Indonesia yang rentan hanya sedikit lebih baik daripada penduduk miskin. Perlindungan yang lebih baik dapat diberikan dengan memperluas program yang ada saat ini seperti PKH dan BPNT dengan menyesuaikan tingkat manfaatnya sesuai dengan posisi penerima manfaat di dalam distribusi kesejahteraan rumah tangga. Paket bantuan langsung tunai semacam itu dapat terdiri dari bantuan langsung tunai tanpa syarat (BPNT) dan bantuan langsung tunai bersyarat (PKH). Secara administratif, hal ini dapat dilakukan dengan relatif mudah dengan menyusun jumlah manfaat menjadi dua atau tiga tingkataan saja. Perubahan kebijakan ini, dikombinasikan dengan penggabungan PIP dan PKH yang dijelaskan di atas, akan memberikan tingkat perlindungan yang meningkat untuk rumah tangga baik yang memiliki anak maupun yang tidak memiliki anak.

Untuk rumah tangga yang tidak memiliki anak, jaminan minimum dapat dicapai dengan meningkatkan — berpotensi menggandakan — program yang ditargetkan untuk kemiskinan seperti BPNT. Peningkatan manfaat BNPT dapat mengurangi kemiskinan dengan tambahan 0,8 poin persentase dan mengurangi kerentanan dengan tambahan sebesar 0,5 poin persentase. Pemerintah telah menyetujui kenaikan 36 persen dalam manfaat BPNT mulai tahun 2020, dan untuk memasukkan spektrum yang lebih luas dari bahan makanan, termasuk bahan pokok, daging, dan kacang-kacangan lokal. Seiring waktu, Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan manfaat BPNT ke program bantuan langsung tunai, yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan menghasilkan pengganda ekonomi lokal. Bantuan langsung yang ditargetkan untuk menurunkan kemiskinan yang diberikan secara tunai akan membentuk lapisan pertama dari "jaminan minimum" untuk semua rumah tangga, terlepas dari komposisi keluarga mereka.

(iii) Meningkatkan perlindungan di sepanjang siklus kehidupan, khususnya bagi para lansia

Lansia akan membutuhkan langkah-langkah

Diperlukan langkah-langkah khusus untuk memasukkan lansia ke dalam sistem bantuan sosial secara lebih komprehensif dan untuk memastikan bahwa mereka juga dilindungi oleh jaminan minimum dan ditanggung oleh bantuan sosial, sementara skema pensiun beriuran telah jatuh

[82] 65 akan menjadi usia pensiun akhir sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[83] Jumlah yang kira-kira setara dengan anggaran tersebut berpotensi untuk diubah menjadi bonus kelulusan bagi anak-anak yang melanjutkan sekolah antara SD, SMP, dan SMA. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mengatasi angka putus sekolah yang masih ada di berbagai tingkat sekolah , yang merupakan hal yang paling menonjol bagi keluarga miskin dan rentan.
[84] Bank Dunia (2016b).

penanganan khusus dari bantuan sosial

tempo. Dengan demikian ada kebutuhan mendesak untuk memberikan bantuan sosial lebih banyak kepada kelompok lansia miskin dan rentan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kelompok lansia secara spesifik sebagai sasaran bantuan langsung tunai BPNT, memperluas cakupan bantuan sosial untuk lansia di PKH terlepas dari apakah mereka tinggal di rumah tangga yang memiliki anak atau tidak, atau merancang program bantuan sosial yang terpisah untuk lansia.

Tabel B.3: Perkiraan dampak kumulatif dari reformasi bantuan sosial

Model	Komponen	Tingkat kemiskinan	Tingkat kerentanan	Ketimpangan (Gini)
A	Menggabungkan PIP dengan PKH	-4%	-1%	-0,0
A + B	Memperluas cakupan PKH, BPNT hingga 40% cakupan dengan tingkat manfaat yang semakin menurun	-31%	-9%	-1,3
A, B + C1	Memperluas cakupan bantuan bagi lansia hingga 70% cakupan	-41%	-12%	-1,8
A, B + C2	Memperluas cakupan bantuan bagi penyandang disabilitas hingga 70% cakupan	-32%	-10%	-1,4

Catatan: Dari Pemodelan CEQ Bank Dunia. Estimasi dampak untuk model B, C1, atau C2 bersifat kumulatif dan memasukkan model-model sebelumnya di dalamnya. Dampaknya bersifat indikatif dan dapat berubah karena meningkatnya inflasi, serta terjadinya pertumbuhan dan inflasi di seluruh distribusi kesejahteraan. Melalui model A dan B termasuk C1 atau C2 dalam tabel, dampak yang timbul karena meningkatnya kecukupan[85] dan perluasan cakupan program, hingga 40 persen dari jumlah penduduk keseluruhan dan hingga 70 persen dari jumlah penduduk lansia dan penyandang disabilitas, dilakukan pemodelan baik untuk program-program yang sudah ada maupun yang baru. Pembahasannya di sini menyangkut PKH, BPNT, PIP, dan program-program bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Perubahan-perubahan di atas dapat berdampak pada inklusi, cakupan dan kecukupan yang lebih besar dari program bantuan sosial dan dapat menurunkan kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan lebih lanjut lagi

Bagaimana perkiraan dampak dari reformasi ini secara gabungan? Dibandingkan dengan situasi yang ada saat ini, sekitar 60 persen dari 10 persen masyarakat termiskin menerima setidaknya satu program (PKH atau BPNT), tiga perubahan yang diusulkan di atas akan menyebabkan 90 persen masyarakat miskin menerima setidaknya satu program (di antara PKH, BPNT, atau dukungan bagi lansia dan dukungan bagi penyandang disabilitas). Dengan demikian jaring pengaman semacam itu akan jauh lebih inklusif dan protektif dibandingkan dengan jaring pengaman yang ada saat ini. Perkiraan dampak kumulatif dari berbagai model skenario ini akan cukup besar (Tabel B.3). Kebijakan yang mengarah pada inklusi, cakupan, dan kecukupan program bantuan sosial yang lebih besar dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan lebih lanjut (sekitar setengah dari tingkat yang ada saat ini, yang lainnya tetap sama), kerentanan (sekitar 12 persen), dan ketimpangan (penurunan dalam koefisien Gini sekitar 1,8 poin).

Manfaat harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai dan berkelanjutan secara fiskal, serta memfasilitasi para penerima agar terhindar dari kemiskinan tetapi tidak menjadi disinsentif untuk bekerja

Nilai manfaat dari jaminan minimum harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai, berkelanjutan secara fiskal, serta memastikan agar para penerima terhindar dari kemiskinan tetapi tidak memiliki disinsentif untuk bekerja. Nilai dari manfaat gabungan untuk program PKH dan BPNT saat ini untuk 15 persen masyarakat termiskin dianggap telah memadai karena memberi bantuan langsung tunai yang cukup untuk membawa rata-rata rumah tangga penerima bantuan berada di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan secara tahunan adalah sekitar 22 juta rupiah dan konsumsi tahunan rata-rata 10 persen rumah tangga termiskin adalah sekitar 18,7 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa perkiraan nilai tahunan saat ini dari bantuan langsung tunai utama secara gabungan, yang berjumlah sekitar Rp 5 juta, akan membawa rata-rata rumah tangga miskin jauh di atas garis kemiskinan. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melakukan indeksasi bantuan langsung tunai terhadap inflasi atau secara teratur melakukan penilaian terhadap inflasi untuk memastikan bahwa besaran nilai bantuan langsung tunai tetap memadai untuk mencapai tujuan program.

[85] Kecukupan paket simulasi untuk 15 persen masyarakat termiskin dijaga sebagaimana adanya, sebesar sekitar 28 persen dari konsumsi rata-rata, dan bagi 16–40 persen masyarakat yang termiskin, diatur untuk terdiri dari 11 persen dari konsumsi rata-rata — tingkat manfaat yang tepat untuk membawa rata-rata rumah tangga yang ada di dalam kelompok tersebut berada di atas garis kerentanan.

Guncangan dapat menyebabkan kerugian yang akan melampaui batas nilai jaminan minimum. Hal ini termasuk biaya dari peristiwa kesehatan (kehilangan waktu bekerja / penghasilan / biaya perawatan medis dan obat-obatan), disabilitas, kematian, dan bencana alam. Dampak dari guncangan yang berpotensi memiskinkan tersebut dapat memengaruhi rumah tangga di sepanjang distribusi kesejahteraan secara keseluruhan. Indonesia sudah mengatasi guncangan kesehatan melalui iuran jaminan kesehatan bersubsidi. Dengan demikian, iuran jaminan kesehatan bersubsidi tersebut memperluas cakupan kontinjensi terhadap kerugian bencana besar yang sangat besar, dengan memasukkan masyarakat yang tidak mampu membayar iuran ke dalam sistem pengelompokan risiko bersama dengan orang lain.

Tanpa adanya sistem perlindungan sosial yang disesuaikan dengan bencana, rumah tangga yang terkena bencana mungkin menghadapi periode kemiskinan yang berkepanjangan dan mungkin tidak sepenuhnya pulih dari kehilangan mata pencaharian mereka

Sistem perlindungan sosial Indonesia kurang siap untuk menanggapi bencana alam dan untuk lebih mendukung korban bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kembali kehidupan mereka lebih cepat. Tanpa kemampuan tanggapan bencana yang sistematis dan tepat waktu, rumah tangga yang terkena bencana rentan menghadapi periode kemiskinan yang lama dan mungkin tidak sepenuhnya pulih dari hilangnya mata pencaharian mereka. Tanggapan bencana yang ada di Indonesia saat ini dirancang dan sebagian besar dioperasikan secara terpisah dari program-program bantuan sosial inti dan seringkali tidak tepat waktu karena adanya persyaratan proses realokasi anggaran. Agar bantuan sosial menjadi adaptif dan lebih besar dalam menanggapi bencana, sistem bantuan sosial harus dapat meningkatkan manfaat bagi para penerima yang ada, memberikan manfaat bagi para penerima baru, dan memasukkan manfaat baru di bawah program yang ada. Hal ini harus dilaksanakan di bawah kerangka perlindungan sosial adaptif dan kuat yang mencakup sistem peringatan dini, pembiayaan yang dapat diprediksi, dan skalabilitas program-program utama untuk melakukan tanggap bencana secara tepat waktu dan dapat diprediksi.

4.2. Perataan konsumsi melalui program jaminan sosial yang diwajibkan (untuk dibiayai perusahaan) dan program yang dibiayai diri sendiri

Jaminan sosial sangatlah penting untuk membantu orang perorangan dan rumah tangga untuk menghadapi guncangan cuaca seperti biaya prosedur perawatan medis, untuk mengatasi pengangguran, disabilitas, kematian, dan usia lanjut

Jaminan sosial sangat penting untuk membantu orang perorangan dan rumah tangga menghadapi guncangan yang mempengaruhi sebagian besar penduduk, termasuk yang terkait dengan biaya prosedur perawatan medis, pengangguran, disabilitas, kematian, dan usia lanjut. Sebagian besar pekerjaan di masa depan di Indonesia kemungkinan akan tetap informal dan dilakukan tanpa adanya kontrak kerja yang standar. Hal ini berarti pekerjaan tersebut tidak memberikan manfaat dari skema jaminan sosial beriuran tradisional seperti pensiun atau perlindungan pekerja yang diwajibkan seperti pesangon. Jika Indonesia terus mengandalkan skema jaminan sosial beriuran tradisional yang menghubungkan pertanggungan dengan status pasar tenaga kerja formal, hal tersebut akan mengecualikan sebagian besar pekerja informal dan keluarga mereka dari pertanggungan terhadap risiko jangka pendek dan pertanggungan pensiun mungkin tidak akan mampu mengejar laju penuaan penduduk. Memperkenalkan insentif baru untuk mendorong kepesertaan sukarela dalam jaminan sosial, termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan (jaminan sosial) dari pekerjaan di masa depan, dapat membantu mengurangi risiko ini.

Program asuransi sosial dapat dibuat lebih efisien dan efektif dengan menerapkan perubahan pada skema pensiun SJSN, termasuk peningkatan usia

Masih terdapat kesenjangan dalam sistem SJSN dalam hal kecukupan, keberlanjutan, dan pertanggungan. Cakupan pensiun khususnya, baik saat ini dan di masa depan, adalah masalah yang mengkhawatirkan mengingat penduduk yang semakin menua. Program-program jaminan sosial tersebut dapat dibuat lebih efisien dan efektif dengan menerapkan sejumlah perubahan pada sistem SJSN, termasuk peningkatan usia pensiun secara bertahap. Untuk memastikan keberlanjutan, peningkatan dalam kecukupan memerlukan langkah-langkah tambahan seperti perubahan dalam penilaian manfaat, sementara secara ideal cakupannya harus ditingkatkan setelah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutannya. Jaminan sosial di masa depan harus dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia, terlepas dari apakah mereka

pensiun secara bertahap

bekerja dalam pekerjaan formal atau informal. Seiring waktu, kehendak (untuk memberi pertanggungan) tersebut haruslah untuk semua pekerja, termasuk wiraswasta dan pekerja sektor informal, untuk mendapat pertanggungan terhadap risiko-risiko ini.

Besarnya nilai iuran dapat ditingkatkan agar defisit dapat ditunda dalam jangka lama, tetapi hal ini akan meningkatkan potongan pajak – kesenjangan antara biaya tenaga kerja dan upah yang dibawa pulang – dan dapat mendorong informalitas. Pendekatan alternatif untuk cakupan asuransi sosial sudah diterapkan untuk asuransi kesehatan di Indonesia, yaitu, agar pemerintah membayar iuran untuk pekerja sektor informal yang miskin. Pendekatan serupa, dikombinasikan dengan perluasan cakupan bantuan sosial untuk para lansia, akan membantu mengatasi kesenjangan cakupan ini tepat pada saat percepatan usia penduduk yang menua akan mulai terjadi. Untuk mencapai cakupan asuransi sosial universal, Indonesia dapat mengandalkan kombinasi asuransi yang dibiayai sendiri untuk mereka yang mampu, dan subsidi atau redistribusi bagi mereka yang tidak mampu. Elemen yang dibiayai sendiri akan dibiayai oleh iuran sedangkan subsidi iuran akan ditanggung oleh APBN. Sistem yang mulus seperti ini akan memungkinkan portabilitas manfaat terlepas dari status pekerjaannya dan akan mengurangi biaya administrasi dibandingkan dengan memiliki banyak dana (pensiun). Sebagaimana halnya paket jaminan minimum, subsidi untuk cakupan kontinjensi dapat dikurangi secara bertahap ketika penghasilan atau konsumsi masyarakat meningkat.

Perubahan untuk merasionalisasi skema pensiun pegawai negeri dan memindahkan pegawai negeri yang lebih muda ke skema nasional juga akan diperlukan

Indonesia juga perlu mengimplementasikan beberapa perubahan pada pensiun pegawai negeri agar siap dalam menghadapi gelombang pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Tujuan-tujuan yang saling bersaing untuk meningkatkan kecukupan dan memastikan keberlanjutan fiskal dapat dicapai dengan memberlakukan perubahan parametrik pada skema yang ada dan/atau perubahan sistem jangka panjang yang akan diterapkan pada pegawai negeri sipil baru, seperti meningkatkan periode penghasilan untuk perhitungan manfaat, indeksasi nilai manfaat pensiun terhadap inflasi, dan menaikkan usia pensiun. Jika pemerintah ingin meningkatkan manfaat pensiun sambil menjaga biaya program pensiun pegawai negeri tetap tidak berubah, solusi apa pun yang layak akan melibatkan bertambahnya usia pensiun dan perubahan indeksasi nilai manfaat pensiun terhadap inflasi. Kedua perubahan tersebut menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk peningkatan skema pensiun karena manfaat dimulai pada usia yang lebih tua dan kenaikan nilai manfaat setelah pensiun lebih kecil.

Kotak B.1: Rekomendasi untuk keberlanjutan JKN

Kerangka kerja untuk meningkatkan pelaksanaan JKN, dan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutannya, haruslah mencakup:

- Meningkatkan pendapatan
- Memutakhirkan iuran JKN dengan menggunakan analisis aktuaria yang kuat
- Mempertimbangkan memperluas subsidi ke sektor informal untuk menarik anggota yang lebih sehat untuk bergabung dengan pengelompokan risiko (risk pool)
- Mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya potensial terutama dari cukai tembakau
- Mengelola pertumbuhan pengeluaran medis
- Memperkuat peran pembelian BPJS-Kesehatan, yang akan memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan memungkinkan mereka untuk menciptakan insentif untuk memengaruhi perilaku penyedia untuk pemberian layanan yang lebih efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, dan kualitas perawatan yang lebih tinggi
- Merasionalisasi dan membuat paket manfaat yang tegas dan gamblang
- Memperbaiki desain pembayaran kepada penyedia, mis., menangani pembayaran terbuka (open-ended) kepada rumah sakit di mana sebagian besar pengeluaran terjadi
- Meningkatkan kualitas dan penggunaan data dengan berinvestasi dalam kualitas dan interoperabilitas berbagai sistem informasi

Perubahan jaminan sosial dapat menggabungkan sistem pembayaran pesangon saat ini dengan melakukan pembentukan rekening tabungan pengangguran untuk dikelola bersama dengan program tabungan hari tua yang ada

Ketentuan perlindungan bagi pekerja di Indonesia saat ini tidak berisi ketentuan mengenai perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan, dengan pengecualian pada sistem pembayaran pesangon yang seringkali memberikan perlindungan de-facto yang sangat terbatas kepada para pekerja. Pemberlakuan tunjangan pengangguran akan membantu mengelola risiko ini, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja. Sistem "bauran" tunjangan pengangguran dapat mengintegrasikan kewajiban pembayaran pesangon saat ini dan sistem tabungan hari tua sambil mengurangi beban ekonomi bagi para pekerja dan pengusaha. Sistem "bauran" tunjangan pengangguran di Indonesia dapat terdiri dari pilar tabungan individu dan dana solidaritas yang dikumpulkan, yang secara bersama-sama didanai oleh pengusaha dan negara. Setelah menipisnya dana di dalam rekening individual, para pekerja yang menganggur bisa mendapat akses ke komponen solidaritas berdasarkan persyaratan tertentu. Persyaratan ini dapat melibatkan kepesertaan dalam program pasar kerja aktif, termasuk konseling pekerjaan, pencarian kerja, dan pelatihan keterampilan. Secara keseluruhan, dengan perubahan-perubahan ini, perlindungan penghasilan jika menganggur harus jauh lebih efektif dan memadai dibandingkan dengan sistem yang ada saat ini. Negara-negara lain seperti Chili dan Korea telah berhasil mengimplementasikan skema yang serupa.

4.3. Berapa biaya dari perubahan-perubahan tersebut?

Biaya untuk menyediakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan efektif akan berbeda-beda, tergantung pada opsi kebijakan yang diterapkan seperti yang ditunjukkan pada Tabel B.4. Untuk jaminan minimum, perkiraan menunjukkan bahwa biayanya sekitar 1 persen dari PDB (sekitar 0,4 poin persentase dari tingkat pengeluaran yang ada untuk PKH, PIP dan BPNT/Rastra[86]) hingga total Rp 145 triliun per tahun untuk perubahan-perubahan yang dibahas tersebut. Salah satu pendekatan untuk mengelola biaya yang dibutuhkan adalah melalui peningkatan manfaat bantuan sosial secara berurutan dari waktu ke waktu, sementara terus berupaya untuk membantu rumah tangga dalam mendapatkan peluang mata pencaharian yang lebih baik.

Gambar B.12: Perkiraan total biaya perluasan dan perubahan jaminan pensiun
(persen dari PDB)

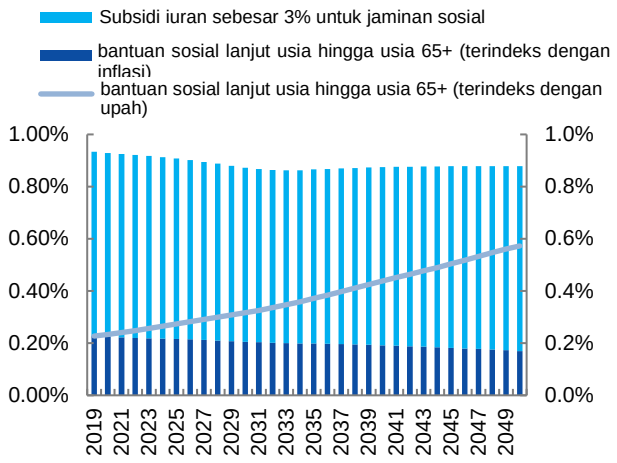

Sumber: Perhitungan penulis

Sebagai hasil dari skema pensiun BPJS yang relatif terlambat dimulai tersebut, belanja iuran dana pensiun sebagai bagian dari PDB juga akan terus lebih rendah dibandingkan dengan di banyak negara pada tahap penuaan demografis di Indonesia. Pendekatan universal akan mensyaratkan adanya subsidi yang signifikan untuk memperluas porsi non-iuran, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah. Pada akhirnya, tingkat belanja secara keseluruhan harus meningkat untuk mencapai tingkat kecukupan yang masuk akal dan terus mengurangi pengeluaran yang tidak langsung. Hal ini akan menelan biaya total sebesar 0,71 persen dari PDB pada tahun 2019 untuk membiayai subsidi iuran bagi semua pekerja berusia 20-64. Biaya ini naik menjadi total 0,88 persen pada tahun 2050. Secara keseluruhan, total kebutuhan belanja pada sistem

[86] Belanja bantuan sosial tahunan jika menambahkan program PBI -JKN dan program padat karya (*cash for work*) adalah 0,7% dari PDB.

Perlindungan Sosial akan menjadi sekitar 2,3 persen dari PDB. Hal tersebut merupakan investasi yang signifikan dibandingkan dengan total pendapatan umum pemerintah sebesar sekitar 14,9 persen dari PDB pada tahun 2018.

Tabel B.4: Biaya untuk memperluas cakupan Perlindungan Sosial sebagai persen dari PDB berdasarkan berbagai opsi

Intervensi	Program	Skenario Perubahan	Total	Biaya Tambahan
Bantuan Sosial	PKH* dan BPNT	Cakupan PKH dan BPNT diperluas hingga 40% cakupan dengan tingkat manfaat yang semakin menurun (*tapered*).	0,77%	0,24%
	Bantuan bagi lansia	Cakupan bantuan bagi lansia yang diperluas hingga 70% cakupan untuk lansia	0,17%	0,15%
	Bantuan bagi penyandang disabilitas	Cakupan bantuan bagi penyandang disabilitas yang diperluas hingga 70% cakupan untuk para penyandang disabilitas	0,03%	0,03%
	Bantuan Sosial Gabungan		0,97%	0,41%
Jaminan Sosial	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM)	Menawarkan subsidi iuran sebesar 0,54% dari upah minimum* untuk semua orang dewasa	0,12%	0,12%
	Pensiun	Menawarkan subsidi iuran jaminan pensiun sebesar 3% dari upah minimum* untuk semua orang dewasa	0,71%	0,71%
	Jaminan Sosial Gabungan		0,83%	0,83%
Perlindungan Sosial (PS)	**Bantuan Sosial + Jaminan Sosial**		1,8%	1,2%
Kesehatan	Subsidi jaminan kesehatan	Menawarkan subsidi jaminan kesehatan untuk semua orang dewasa	0,53%	0,32%
Bantuan Sosial + Jaminan Sosial dan subsidi pertanggungan kesehatan secara penuh			**2,3%**	**1,6%**

Catatan:
* * Upah minimum adalah upah minimum yang diamati untuk semua pekerja dari Sakernas 2018. Upah minimum 'yang diamati' untuk tahun 2018 yang kami simpulkan dari data adalah Rp 2 juta per bulan. Upah minimum diasumsikan meningkat pada tingkat pertumbuhan upah dalam perekonomian
Untuk perkiraan jaminan sosial: orang dewasa dalam perhitungan kami mencakup semua individu berusia 20-64. Perhitungan JKK dan JKM mengasumsikan adanya subsidi sebesar 0,54 persen dari upah bulanan rata-rata Rp 2 juta yang dibayarkan untuk semua orang dewasa / 40 persen orang dewasa (di desil) terbawah. Perhatikan bahwa berdasarkan undang-undang saat ini, JKK/ JKM/JP hanya mencakup sebagian dari semua orang dewasa. Peningkatan cakupan kesehatan akan mencakup 60 juta orang sisanya. Subsidi iuran pensiun sama dengan 3 persen dari Rp 2 juta per bulan dan subsidi ini akan memberikan pensiun kepada para pensiunan di masa depan yang setara dengan Rp 200.000 hari ini.

5. Melaksanakan dan Membiayai Sistem Perlindungan Sosial Indonesia

5.1. Pelaksanaan sistem perlindungan sosial yang efektif

Akan diperlukan sistem perlindungan sosial terintegrasi yang berfungsi dengan baik untuk dapat memberikan jaminan minimum dan untuk melaksanakan serangkaian program jaminan sosial yang koheren dan efisien

Pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif membutuhkan sistem penyaluran perlindungan terintegrasi untuk mengidentifikasi, mendaftar, dan membayar penduduk sasaran. Mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi modern yang memadai terhadap kesalahan, penipuan, dan korupsi juga penting. Indonesia telah membangun fondasi yang kuat dan platform terintegrasi untuk menyelenggarakan berbagai program dengan lebih baik, termasuk basis data terpadu (BDT)[87] untuk mengidentifikasi penerima manfaat, *gateway* pembayaran terintegrasi di bawah himpunan bank-bank-bank milik negara (HIMBARA), serta bermitra dengan pemerintah daerah dalam menguji layanan digital serta memungkinkan dilakukannya pemutakhiran data BDT[88] dan penanganan keluhan yang dinamis. Akan diperlukan adanya upaya lebih lanjut agar komponen-komponen ini dan komponen lainnya menjadi lebih efektif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan sistem perlindungan sosial. Penting juga bagi Indonesia untuk memperkuat rezim perlindungan data dan privasi yang saat ini tidak lengkap dan bersifat sementara.

[87] Tohari dkk. 2019 mendapati bahwa BDT meningkatkan kelayakan dan kepesertaan dalam berbagai program secara substansial – yaitu, peluang untuk menjadi peserta dalam 3 program inti meningkat sebesar 117%. Lihat Tohari dkk.(2019).
[88] Saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui pendaftaran SIKS-NG.

Indonesia memiliki daftar sosial (*social registry*), BDT, yang telah dikembangkan dengan baik untuk menilai kebutuhan dan kondisi untuk menentukan status kelayakan masyarakat atas program-program perlindungan sosial. BDT dirancang untuk mencakup 40 persen rumah tangga termiskin. Lebih lanjut, BDT saat ini bergerak dari dataset statis ke daftar sosial yang lebih dinamis. Walaupun Kementerian Sosial telah memprakarsai kegiatan pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagian data masih didasarkan pada kegiatan pengumpulan data besar-besaran yang terakhir dilakukan pada tahun 2015. Data ini menangkap informasi mengenai rumah tangga pada suatu waktu tertentu dan tidak secara terus menerus atau sepenuhnya dimutakhirkan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kondisi. Pada akhirnya, dengan membatasi cakupan pada 40 persen masyarakat termiskin ini meninggalkan sejumlah besar masyarakat yang rentan dan CKM[89] yang belum aman secara ekonomi dan dengan demikian berisiko untuk terdorong ke dalam kerentanan atau kemiskinan ketika mengalami guncangan seperti sakit, kehilangan pekerjaan, dan bencana alam. Dengan demikian BDT mmemiliki kegunaan terbatas untuk program-program yang memiliki persyaratan penilaian kelayakan untuk masyarakat miskin, rentan, dan yang berada pada kelompok CKM, seperti untuk subsidi listrik, program pelatihan keterampilan, jaminan kesehatan, atau terkena bencana. Bahkan untuk program-program yang menyasar 40 persen masyarakat termiskin, BDT tidak dapat memuat data masyarakat secara lengkap dan akurat tanpa kesalahan inklusi atau pengecualian.

BDT yang diperluas akan menjadi instrumen yang penting untuk meningkatkan cakupan dan menetapkan sasaran dari semua program

Akan ada manfaat yang signifikan dari (i) perluasan cakupan UDB hingga 80 persen dari jumlah penduduk untuk membantu menjangkau sektor informal yang tidak diasuransikan dan "masyarakat di desil tengah yang tidak tercakup"; (ii) mendorong pemutakhiran data yang dinamis; (iii) peralihan ke peringkat kemiskinan absolut; (iv) mengusahakan agar BDT dapat disilangkan dengan database lain (pajak, listrik, kepemilikan tanah/aset, pembelian mobil/motor); dan (v) integrasi dengan sistem informasi geografis agar tanggapan cepat terhadap guncangan dan krisis dapat dilakukan. Terdapat pula potensi yang sangat besar untuk menggunakan teknologi yang lebih mutakhir untuk mengubah proses bisnis dan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

Sangatlah penting untuk mengembangkan sistem pelaksanaan pembayaran bersama untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi yang lebih besar.

Banyak program perlindungan sosial Indonesia saat ini melakukan pembayaran melalui model Pemerintah ke masyarakat (*Government to Persons*, G2P) 2.0, menandai adanya perubahan yang cepat dari pemberian uang secara tunai ke pembayaran melalui rekening bank. Hal ini telah memungkinkan peningkatan efisiensi dan transparansi. Namun demikian, proses digitalisasi antara penyedia pembayaran dan penerima. Para penerima program menanggung biaya transaksi pribadi yang cukup besar untuk menarik uang tunai, karena mereka mungkin tinggal jauh dari cabang bank atau ATM dan tidak memiliki cara lain untuk mengakses atau menggunakan uang tunai secara virtual. Lebih lanjut lagi, tidak semua program memanfaatkan *gateway* pembayaran terintegrasi di bawah himpunan bank-bank milik negara (HIMBARA).[90] Ke depan, penting untuk mengembangkan sistem pelaksanaan pembayaran bersama untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi yang lebih besar.

Sistem ID yang kuat penting untuk sistem Perlindungan Sosial yang terintegrasi, yang memungkinkan dilakukannya otentikasi identitas

Sistem ID yang kuat adalah masukan yang penting untuk sistem Perlindungan Sosial yang terintegrasi, yang memungkinkan dilakukannya otentikasi identitas penerima manfaat dan memfasilitasi berbagi informasi mengenai penerima manfaat (mis., penghasilan, besarnya tingkat manfaat) di semua program. Sistem perlindungan sosial di Indonesia dapat lebih sistematis dengan menggunakan sistem ID dasar untuk identifikasi dan otentikasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung sistem ID SIAK yang mengeluarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik untuk semua orang yang terdaftar melalui kartu keluarga (KK)

[89] Bank Dunia (2019c).
[90] Bank Dunia (2018b).

penerima manfaat dan memfasilitasi berbagi informasi mengenai penerima manfaat di semua program

dan kartu tanda penduduk (KTP), menggunakan biometrik untuk mencegah duplikasi individu. Sementara 95 persen penduduk memiliki NIK di dalam sistem SIAK, NIK tersebut tidak selalu digunakan dan/atau diverifikasi. Sebagai contoh, program ketenagakerjaan SJSN tidak mensyaratkan NIK untuk pendaftaran bagi pekerja pada saat pendaftaran, tetapi melakukan verifikasi silang pada tahap berikutnya. Bahkan jika individu memiliki NIK dan ID fungsional lainnya untuk program seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan kartu BPJS, program-program menawarkan metode dan praktik otentikasi yang beragam dan terkadang tidak kompatibel.

5.2. Pembiayaan Perlindungan Sosial

Untuk membiayai berbagai perubahan yang diusulkan, realokasi sumber-sumber penerimaan yang ada dan penggalangan sumber-sumber penerimaan yang baru dapat dipertimbangkan

Indonesia sebagian besar bergantung pada penerimaan umum, pajak gaji, dan iuran wajib untuk membiayai sistem perlindungan sosialnya. Penerimaan umum digunakan untuk mendanai bantuan sosial dan komponen jaminan kesehatan bersubsidi (JKN-PBI), sementara iuran jaminan sosial dan pajak atas gaji digunakan untuk mendanai jaminan sosial. Untuk membiayai sistem perlindungan sosialnya di masa depan, Indonesia harus mempertimbangkan kombinasi dari (i) mengupayakan melalui penerimaan dan belanja yang ada untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya ini dengan lebih baik, dan (ii) menggalang sumber daya tambahan melalui peningkatan mobilisasi penerimaan.[91]

Tingkat pengeluaran perlindungan sosial juga dibatasi oleh penerimaan umum yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah. Peningkatan sumber daya yang dipergunakan untuk sektor perlindungan sosial menghendaki pemikiran tentang cara untuk meningkatkan penerimaan fiskal secara optimal. Terdapat beberapa alternatif kemungkinan-kemungkinan realistis yang meningkatkan pemungutan dan menjaga beban agar tetap adil, guna menghindari langkah-langkah yang justru memberi beban signifikan bagi masyarakat yang dimaksudkan untuk menerima manfaat dari perluasan perlindungan sosial, yaitu, mereka yang berada di desil bagian bawah.

Subsidi, termasuk subsidi LPG, pupuk dan subsidi bahan bakar yang masih ada misalnya, dapat lebih dikurangi atau dihapus dan penghematan anggaran dialokasikan kembali untuk perlindungan sosial. Senada, mengurangi pembebasan PPN akan meningkatkan sumber daya, tetapi dapat memberi beban yang signifikan kepada masyarakat miskin yang cenderung mengkonsumsi barang-barang yang mendapat pembebasan PPN. Alternatif lain yang menjanjikan mungkin adalah pajak atas tembakau, yang menawarkan manfaat tambahan kesehatan bagi masyarakat untuk masyarakat miskin, yang memiliki elastisitas konsumsi yang lebih tinggi. Pada akhirnya, pemerintah harus menyesuaikan ambisi dalam hal memperluas cakupan sistem perlindungan sosial dan perubahan fiskal yang dapat memenuhi harapan.

Salah satu bidang potensial bagi penerimaan tambahan dapat dihasilkan adalah dari subsidi bahan bakar…

Alokasi dan efisiensi belanja perlindungan sosial saat ini dapat lebih ditingkatkan, terutama jika mempertimbangkan subsidi bahan bakar. Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan sejak tahun 2014, belanja subsidi energi yang tidak seluruhnya tepat sasaran baru-baru ini meningkat dan tetap besar (Rp 153,5 triliun atau 1,0 persen dari PDB pada tahun 2018 - lihat Gambar B.13 dan Gambar B.14). Sekitar 56 persen dari subsidi bbm dialokasikan bagi kelas menengah dan atas. Oleh karena itu, realokasi lebih jauh dari subsidi yang regresif menuju bantuan langsung tunai yang ditargetkan seperti PKH dan BPNT akan meningkatkan efisiensi belanja sosial secara keseluruhan.

[91] Bank Dunia (2018b).

Gambar B.13: Belanja untuk subsidi energi sebagian diarahkan untuk bantuan sosial…
(Rp miliar)

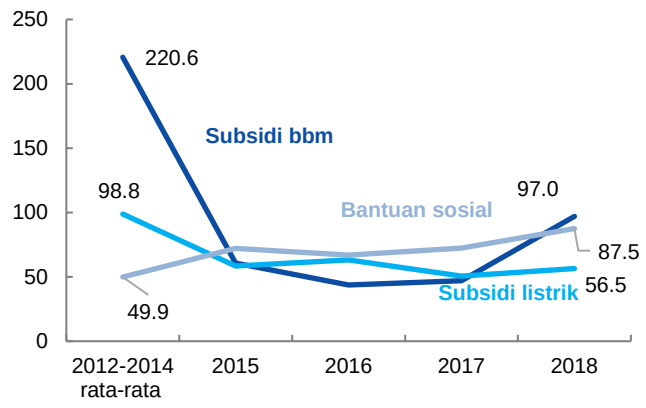

Gambar B.14: …tetapi tetap cukup besar, sebesar 1,0 persen dari PDB
(persen dari PDB)

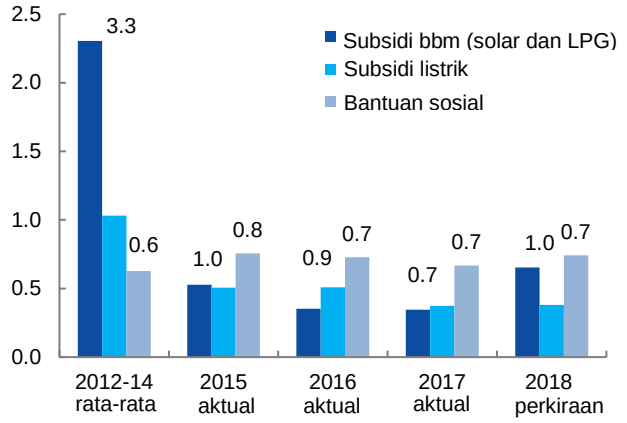

Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: Untuk Gambar B.13, semua tahun mengacu pada data belanja pemerintah pusat yang sudah diperiksa. Untuk Bantuan Sosial, angka untuk tahun 2018 termasuk angka anggaran pada program Padat Karya Tunai (PKT) yang baru dibentuk. Untuk Gambar B.14, data tahun 2018 adalah data anggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan pada Januari 2019.

…atau penghapusan beberapa pembebasan PPN

Indonesia telah menerapkan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) sejak tahun 1984. Besarnya pajak pertambahan nilai ini, sesuai undang-undang, ditetapkan 10 persen pada sebagian besar barang dan jasa, dengan banyak pengecualian. Selain itu, perusahaan-perusahaan kecil dibebaskan dari pembayaran PPN bahkan untuk barang dan jasa yang tidak mendapatkan pembebasan PPN, karena biaya administrasi yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan yang diharapkan. Struktur ambang pembebasan dan pembayaran PPN saat ini menjadi 90,6 triliun rupiah atau USD 21,6 miliar [dalam Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity* – PPP) tahun 2011), yang merupakan 0,67 persen dari PDB.

Gambar B.15: Pengeluaran pajak pemerintah melalui pembebasan PPN lebih dinikmati oleh kelas menengah dan atas
(kejadian PPN atau pangsa total pengeluaran pajak PPN berdasarkan desil penghasilan)

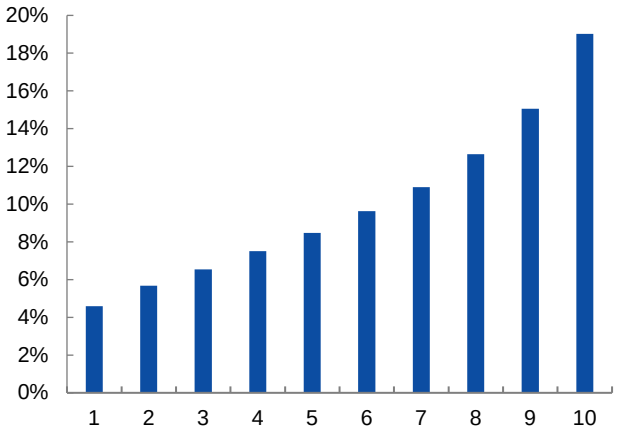

Pembebasan PPN atas barang dan jasa dapat diberikan karena berbagai alasan, tetapi paling sering dilakukan atas dasar kesetaraan (mis. barang berupa makanan). Namun demikian, pembebasan ini dapat memiliki dampak yang tidak signifikan dan bahkan regresif – sebagaimana halnya dengan subsidi harga. Saat ini sekitar setengah dari semua pengeluaran pajak dilakukan dengan tujuan untuk 'meningkatkan kesejahteraan rakyat'. Namun demikian, mirip dengan subsidi harga, pembebasan PPN ini seringkali lebih dinikmati oleh kelas masyarakat yang lebih kaya daripada oleh masyarakat miskin, sehingga pengeluaran pajak ini menjadi regresif (absolut) di seluruh distribusi kesejahteraan (Gambar B.15). Secara relatif, sebagai pangsa dari pendapatan rumah tangga, pembebasan PPN lebih penting bagi masyarakat miskin. Namun demikian,

penghapusan pembebasan PPN akan menghasilkan penerimaan tambahan yang signifikan yang dapat membiayai usulan perubahan perlindungan sosial yang dibahas di atas.

Menaikkan pungutan cukai untuk produk-produk tembakau merupakan alternatif lain yang menjanjikan

Untuk negara dengan salah satu prevalensi merokok orang dewasa yang tertinggi di dunia, beban pajak atas tembakau masih lebih rendah dibandingkan dengan di banyak negara dan tidak cukup untuk memiliki pengaruh yang berarti terhadap perilaku konsumsi.[92] Sementara tahun 2020 menandai kenaikan cukai tembakau yang signifikan, tarifnya masih bisa dinaikkan lebih lanjut. Menaikkan pajak sejenis dapat menghasilkan penerimaan tambahan yang signifikan bahkan dengan konsumsi yang lebih rendah dan juga menawarkan manfaat kesehatan masyarakat tambahan bagi masyarakat miskin. Lihat Kotak B.2 untuk rincian lebih lanjut. Dengan elastisitas konsumsi yang lebih tinggi, beban pajak semacam itu akan turun secara lebih proporsional pada kelas menengah. Sekali lagi, ukuran potensi penerimaan yang dihasilkan akan cukup besar untuk memberi kompensasi kepada mereka yang menanggung beban cukai tambahan ini.

Perkiraan kasar menunjukkan bahwa realokasi subsidi LPG, solar dan pupuk dapat menghasilkan 0,7 persen dari PDB. Dengan menghapus pembebasan PPN yang tidak tepat sasaran dan menaikkan cukai tembakau dapat menghasilkan 0,6 persen dari PDB. Biaya tambahan perubahan Perlindungan Sosial yang diusulkan diperkirakan sebesar 1,6 persen dari PDB. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan umum tambahan sebesar 0,3 persen dari PDB. Ini sesuai dengan target Pemerintah sendiri dalam strategi penerimaan jangka menengahnya yaitu meningkatkan 5 poin persentase tambahan dari PDB melalui sejumlah perubahan kebijakan pajak dan administrasi, yang meliputi peningkatan kepatuhan, memperluas basis pajak untuk PPN dan pajak penghasilan, meningkatkan pajak penghasilan, dan menerapkan pajak hijau termasuk terhadap plastik sekali pakai.

Tabel B.5: Proyeksi dampak tahunan dari perubahan
(persen dari PDB)

	2020-2024
LPG	0,3
Solar	0,2
Pupuk	0,2
Keuntungan dari perubahan cukai tembakau	0,2
Keuntungan dari penghapusan pembebasan PPN	0,4
Sumber-sumber lainnya	0,4
Total biaya tambahan perubahan Perlindungan Sosial	1,6

Sumber: Kajian Pengeluaran Publik, akan terbit

6. Penutup

Sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien akan sangat penting untuk mencapai visi 2045

Visi Pemerintah Indonesia untuk tahun 2045 adalah menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur, dan beralih dari status negara berpenghasilan menengah ke tinggi. Sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien akan sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tren demografis, teknologi, dan lingkungan yang muncul akan membutuhkan pemikiran ulang atas kontrak sosial yang ada untuk memastikan bahwa kontrak tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang dan memungkinkan Indonesia untuk mencapai target pemberantasan kemiskinan, modal manusia, dan pertumbuhan inklusif yang telah ditetapkan untuk tahun 2045.

Program perlindungan sosial yang ada saat ini membentuk dasar yang kuat di mana Indonesia dapat membangun sistem yang mampu mengatasi risiko dan tantangan yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Untuk mencapai hal ini, Pemerintah dapat mempertimbangkan suatu sistem yang memberikan tingkat jaminan perlindungan minimum di sepanjang siklus kehidupan melalui kombinasi program bantuan sosial dan melengkapi jaminan minimum ini dengan serangkaian program jaminan sosial yang koheren untuk perataan konsumsi dan perlindungan

[92] Bank Dunia (2018c).

terhadap risiko di masa lanjut usia dan pada saat menganggur. Perubahan ini tidaklah kecil, dan perubahan tersebut membutuhkan biaya yang signifikan tetapi hal ini dapat dilakukan dengan perubahan yang tepat, seperti mengakhiri pemberian subsidi dan meningkatkan pemungutan penerimaan.

Sekaranglah saat yang tepat untuk mempertimbangkan bagaimana untuk meningkatkan perlindungan sosial di Indonesia dan agar perlindungan sosial tersebut siap untuk masa depan. Sistem perlindungan sosial di Indonesia dapat membantu jutaan orang dewasa untuk memperoleh keterampilan yang tepat untuk bersaing di pasar kerja yang berubah saat ini dan jutaan anak dengan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik agar mereka siap untuk pasar tenaga kerja masa depan. Dengan melakukan investasi ini hari ini akan memberikan langkah awal untuk memastikan Indonesia mampu melindungi dan mendorong semua orang ketika Indonesia bergerak menuju pencapaian targetnya untuk tahun 2045.

Kotak B.2: Cukai tembakau yang lebih tinggi di Indonesia

Indonesia telah menaikkan cukai tembakau setelah mengalami jeda di tahun 2018. Pada akhir Oktober 2019, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan baru ini akan menghasilkan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 21,2 persen dan harga eceran minimum naik rata-rata 37,0 persen pada tahun 2020. Walaupun ini adalah penyesuaian terbesar selama lima tahun terakhir (Tabel B.6 kolom viii), tetapi ini terjadi setelah dua tahun tanpa adanya perubahan tarif dan harga minimum[1]. Kenaikan tarif cukai tembakau Indonesia terus meningkat relatif terhadap kenaikan harga yang diatur dan telah menyebabkan harga rokok tetap terjangkau.[2]

Tabel B.6: Perubahan rata-rata dalam harga eceran minimum yang diatur dan besaran tarif cukai hasil tembakau

Perubahan dalam	Rata-rata tidak tertimbang di seluruh tingkatan[a]							
	2013 (i)	2014[d] (ii)	2015 (iii)	2016 (iv)	2017 (v)	2018 (vi)	2019[e] (vii)	2020 (viii)
Harga minimum yang diatur (perubahan persen)	19,0%	0,0%	10,8%	33,3%	20,5%	0,8%	0,0%	37,0%
Sigaret Kretek Mesin (SKM)[b]	*28,0%*	0,0%	*13,5%*	*29,5%*	*19,7%*	*6,3%*	0,0%	*52,1%*
Sigaret Kretek Tangan (SKT)[c]	*4,8%*	0,0%	*7,6%*	*37,9%*	*21,2%*	*-7,4%*	0,0%	*14,3%*
Tarif cukai (persen perubahan)	4,9%	0,0%	7,5%	11,8%	9,0%	11,3%	0,0%	21,2%
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	*4,5%*	0,0%	*8,9%*	*14,3%*	*10,6%*	*12,4%*	0,0%	*26,7%*
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	*5,5%*	0,0%	*5,8%*	*8,9%*	*7,4%*	*9,7%*	0,0%	*12,8%*

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Tembakau, perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: a. Jumlah tingkatan/klasifikasi: 2018-2020 (10); 2017 (12). Setiap tingkatan/klasifikasi didasarkan pada jenis produk, jumlah produksi, dan harga eceran. Tidak tertimbang karena jumlah aktual berapa batang rokok yang diproduksi tidak tersedia.
b. Buatan mesin mengacu pada rokok putih dan rokok kretek yang digulung dengan bantuan mesin.
c. Buatan tangan mengacu pada rokok putih dan rokok kretek yang digulung dengan tangan.
d. Pemerintah hanya merevisi tarif cukai dan harga eceran untuk produk tembakau yang diatur di dalam PMK No. 179/2012 melalui PMK No. 205/2014, oleh karena itu, tarif dan harga yang ditetapkan pada tahun 2012 berlaku efektif selama dua tahun dari bulan November 2012 hingga Desember 2014
e. Lihat catatan kaki 1 Kotak ini.

Namun demikian, perubahan perpajakan tembakau tidak lengkap karena tarif cukai tembakau tetap relatif rendah dan sistem multi-tingkat yang ada saat ini terlalu rumit. Bahkan dengan tarif cukai yang baru, beban cukai tembakau masih di bawah tingkat maksimum 57 persen yang direkomendasikan oleh Undang-Undang tentang Cukai (UU Nomor 39 Tahun 2007), dan WHO merekomendasikan minimum 70 persen dari harga eceran[3] (Tabel B.7 kolom vi). Selain itu, peraturan terbaru tidak membahas penyederhanaan tingkatan di antara berbagai jenis hasil tembakau.[4] Dengan jumlah tingkatan dipertahankan sebanyak 10[5] tingkatan pada tahun 2020 dan struktur tarif yang telah berlaku sejak tahun 2018, sistem perpajakan tembakau Indonesia akan tetap memiliki elemen distorsi. Khususnya beberapa tingkatan tarif rentan terhadap risiko penghindaran pajak dan substitusi ke bawah[6] ke produk rokok dan tembakau dengan harga yang lebih rendah.[7]

Tarif yang lebih tinggi akan menghasilkan penerimaan tambahan bahkan dengan konsumsi yang lebih rendah. Meskipun tarif yang lebih tinggi ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi konsumsi tembakau, analisis menunjukkan bahwa pada tingkat yang ada saat ini ada ruang bagi Pemerintah untuk menghasilkan lebih banyak penerimaan dari cukai tembakau dan secara bersamaan mengurangi konsumsi.[8] Mengingat permintaan yang relatif tidak elastis untuk produk tembakau di berbagai jenis produk tembakau dan kelompok penghasilan, banyak perokok akan terus mengkonsumsi rokok bahkan dengan harga yang lebih tinggi.

Perkiraan menunjukkan bahwa kenaikan tarif sebesar 47 persen dikombinasikan dengan penyederhanaan tingkat menjadi 6 tingkat, akan menurunkan konsumsi sebesar 2 persen, dan meningkatkan penerimaan cukai sebesar 6,4 persen atau menjadi Rp 10,9 triliun (Sahadewo, dkk., 2018a). Selain itu, mengingat kecilnya jumlah produsen, cukai tembakau relatif mudah untuk dipungut dan dikelola dibandingkan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Tabel B.7: Rata-rata harga eceran minimum yang diatur, tarif cukai, dan beban cukai tembakau

Rata-rata (Rp/batang)	Rata-rata tidak tertimbang di seluruh tingkatan					
	2013 & 2014 (i)	2015 (ii)	2016 (iii)	2017 (iv)	2018 & 2019 (v)	2020 (vi)
Harga yang diatur	**508,8**	**574,5**	**759,5**	**816,5**	**887,8**	**1.233,0**
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	554,4	*625,0*	*797,9*	*891,7*	*945,4*	*1.441,3*
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	455,7	*513,9*	*713,5*	*741,3*	*801,3*	*920,6*
Tarif cukai	**230,8**	**250,9**	**283,6**	**292,9**	**363,0**	**447,5**
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	*297,1*	*316,7*	*362,5*	*400,8*	*449,2*	*568,3*
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	*153,3*	*172,0*	*189,0*	*185,0*	*233,8*	*266,3*
Beban cukai (persen)[f]	**45,4%**	**43,7%**	**37,3%**	**35,9%**	**40,9%**	**36,3%**
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	*53,6%*	*50,7%*	*45,4%*	*45,0%*	*47,5%*	*39,4%*
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	*33,7%*	*33,5%*	*26,5%*	*25,0%*	*29,2%*	*28,9%*

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Tembakau, perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: Beban cukai[f] dihitung sebagai rasio nominal tarif cukai rata-rata terhadap rata-rata nominal harga yang diatur.

Selain potensi menghasilkan penerimaan cukai yang lebih tinggi serta manfaat bagi kesehatan para perokok itu sendiri, tarif cukai tembakau yang lebih tinggi juga dapat bermanfaat bagi perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Prevalensi merokok menurut jenis kelamin di Indonesia sangat bervariasi. Sementara hanya 2 persen perempuan yang merokok, prevalensi di kalangan laki-laki mencapai 67 persen. Merokok di kalangan laki-laki menyebabkan perokok pasif di kalangan wanita, termasuk selama masa kehamilan, dan mengurangi anggaran rumah tangga yang tersedia untuk makanan bergizi. Studi menunjukkan, ayah yang merokok adalah predictor peningkatan kemungkinan terjadinya malnutrisi anak jangka pendek dan kronis. Dalam rumah tangga di mana sang ayah adalah perokok, tembakau menyumbang 22 persen dari pengeluaran rumah tangga per kapita per minggu, dengan lebih sedikit uang yang dibelanjakan untuk makanan dibandingkan dengan rumah tangga di mana sang ayah bukanlah perokok (Semba, dkk., 2007). Suatu terbaru (Dartanto, dkk., 2018) menegaskan bahwa konsumsi rokok adalah salah satu faktor yang mendorong tingginya angka *stunting* di Indonesia, di mana anak-anak yang hidup dengan ayah yang tidak merokok akan tumbuh 1,5 kg lebih berat dibandingkan dengan mereka yang hidup dengan orang tua yang perokok kronis. Selain itu, pengeluaran rumah tangga untuk pengobatan penyakit terkait tembakau kemungkinan akan lebih tinggi (Bank Dunia, 2016a). Dengan elastisitas harga yang lebih tinggi di antara masyarakat miskin, kenaikan cukai tembakau dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan distribusi pengeluaran dari rumah tangga-rumah tangga ini, sehingga meningkatkan kesejahteraan dalam jangka menengah.[9]

Dampak bersih dari cukai tembakau yang lebih tinggi terhadap pekerjaan adalah positif.[10] Menyelaraskan cukai tembakau dengan penyederhanaan tingkat akan menyebabkan hilangnya lapangan kerja, kebanyakan di industri rokok kretek. Namun demikian, pengeluaran untuk tembakau yang dialihkan ke komoditas lain dan sektor-sektor yang lebih produktif akan menyebabkan peningkatan keluaran ekonomi (Sahadewo, dkk. 2018c). Memungkinkan akses yang lebih baik terhadap modal melalui skema kredit yang lebih baik dan mendorong penelitian tanaman alternatif di kabupaten-kabupaten penghasil utama dapat membantu petani tembakau dan cengkeh bertransisi ke tanaman dan kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan. Pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak terhadap mata pencaharian para pekerja tembakau melalui bantuan langsung tunai atau perluasan akses ke jaring pengaman sosial, atau pemberian pekerjaan alternatif seperti program pelatihan ulang, hibah pendidikan, dll. Bank Dunia memperkirakan bahwa program kompensasi seperti itu hanya akan menyita sebagian kecil dari penerimaan yang akan dihasilkan dari perubahan pengenaan cukai tembakau.[11] Yang terakhir, Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan redistributif gender, termasuk pinjaman kredit mikro untuk membantu memberdayakan para pekerja rokok kretek perempuan yang kehilangan pekerjaan dari pabrik kretek dan langkah-langkah terkait kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di rumah tangga yang erat dengan tembakau.

[1] Pemerintah tidak mengubah tarif cukai dan harga eceran untuk hasil tembakau di PMK 156/2018 untuk penerapan di tahun 2019, oleh karena itu tarif dan harga yang ditetapkan dalam PMK No. 146/2017 berlaku selama dua tahun dari bulan Januari 2018 hingga Desember 2019.
[2] Keterjangkauan rokok didefinisikan sebagai bagian dari penghasilan yang dibutuhkan untuk membeli sebungkus rokok. Apabila tingkat pertumbuhan tahunan harga rata-rata nominal lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahunan PDB nominal per kapita, keterjangkauan rokok meningkat, yang menyiratkan bahwa rokok menjadi relatif lebih murah (Blecher dan Walbeek, 2008; Zheng, et al., 2018).
[3] WHO merekomendasikan pajak total untuk hasil tembakau – cukai khusus, pajak daerah, dan pajak pertambahan nilai – harus paling tidak 70 persen dari harga eceran, sedangkan perkiraan rata-rata tarif pajak total di Indonesia adalah 57,4 persen. Total tarif pajak rata-rata untuk hasil tembakau meliputi: cukai pada rokok,

pajak pertambahan nilai sebesar 9,1 persen – yang dipungut langsung dari produsen, dan 10 persen pajak rokok setempat yang dihitung sebagai 10 persen dari pajak cukai spesifik (Ahsan dkk., 2013).

[4] Sebaliknya, peraturan tahun 2017 termasuk peta jalan penyederhanaan yang ditangguhkan pada tahun 2018.

[5] Selain itu, PMK yang baru juga tidak menggambarkan volume produksi dalam batang di setiap tingkat produksi.

[6] Namun demikian, telah didokumentasikan bahwa konsumsi rokok pada tahun 2012 cenderung naik ke tingkat yang lebih tinggi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang menyiratkan bahwa rokok menjadi relatif lebih terjangkau (Zheng, dkk., 2018).

[7] Sistem multi-tingkat meningkatkan risiko penggelapan pajak karena insentif yang diberikan bagi perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui penerapan pita cukai tembakau yang lebih murah yang dirancang untuk hasil tembakau dengan kualitas yang lebih murah untuk hasil tembakau dengan kualitas lebih tinggi.

[8] Lihat Fuchs dan Carmen (2018) dan Zheng et al., (2018) untuk berbagai elastisitas permintaan rokok yang dibedakan berdasarkan produk dan kelompok penghasilan, serta struktur keterjangkauan.

[9] Fuchs dan Del Carmen (2018) memperkirakan elastisitas harga terkait dengan kenaikan pajak, terutama pada sigaret kretek tangan tangan dan konsumsi oleh individu yang lebih muda.

[10] Pekerjaan di sektor-sektor tembakau inti secara langsung bergantung pada produksi tembakau, seperti pertanian dan manufaktur. Analisis historis dari industri tembakau menunjukkan bahwa industri ini telah secara signifikan mengurangi lapangan kerja dari waktu ke waktu karena industri ini menjadi lebih padat modal dan pertanian menjadi lebih efisien, dan bahwa kehilangan pekerjaan terjadi bahkan tanpa adanya langkah-langkah pengendalian tembakau (NCI-WHO , 2017).

[11] Sahadewo, dkk., (2018a dan 2018b) memperkirakan bahwa kenaikan tarif cukai rata-rata 47 persen dan penyederhanaan tingkatan menjadi 6 tingkatan akan menghasilkan penerimaan tambahan sebesar Rp10,9-12,9 triliun.

Bibliografi

PART A:

Antara News. August 22, 2019. "Anggaran bansos naik sebesar Rp 3 triliun pada 2020." https://www.antaranews.com/berita/1024268/anggaran-bansos-naik-sebesar-rp3-triliun-pada-2020

Antara News. September 11, 2019. " India agrees to reduce export tariff on Indonesia palm oil." https://en.antaranews.com/news/132544/india-agrees-to-reduce-export-tariff-on-indonesian-palm-oil),

APBN KITA. November 2019. https://www.kemenkeu.go.id/media/13761/apbn-kita-november-2019.pdf

Baconguis, B. 2018. "Stemming the Plastic Flood. A Break Free from Plastic Movement Report." https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2018/04/Stemming-the-plastic-flood-report.pdf

Bank Indonesia. November 8, 2019. "Neraca Pembayaran Indonesia." https://www.bi.go.id/id/publikasi/neraca-pembayaran/Pages/npitw319.aspx

BIO Intelligence Service. 2011. *Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier bags*. Final Report prepared for European Commission-DG Environment. https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf

Bisnis. May 26, 2019. "TNP2K Evaluasi Uji Coba Penyaluran LPG Gas 3Kg." https://ekonomi.bisnis.com/read/20190526/44/927385/tnp2k-evaluasi-uji-coba-penyaluran-lpg-3kg

Bisnis. September 30, 2019. "Setoran Surplus BI dan Dividen BUMN Topang Kinerja PNBP." https://ekonomi.bisnis.com/read/20190930/10/1153659/setoran-surplus-bi-dan-dividen-bumn-topang-kinerja-pnbp

Bloomberg. October 28, 2019. "Indonesia Suspends Nickel Ore Exports With Immediate Effect." https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-28/indonesia-bans-nickel-ore-exports-with-immediate-effect

CNBC Indonesia. August 16, 2019. "Mengejar Penerimaan Perpajakan Rp 1.819,2 T di 2020, sanggup?" https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816172700-4-92623/mengejar-penerimaan-perpajakan-rp-18192-t-di-2020-sanggup

CNBC. August 23, 2019. "Global LNG-Asian prices steady as heat in Japan bolsters demand." https://www.cnbc.com/2019/08/23/reuters-america-global-lng-asian-prices-steady-as-heat-in-japan-bolsters-demand.html

CNN Indonesia. September 23, 2019. "Penderita ISPA akibat Karhutla tembus 919 ribu orang." https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190923160933-20-433052/penderita-ispa-akibat-karhutla-tembus-919-ribu-orang.

Convery, F., S. McDonnel, and S. Ferreira. 2007. "The Most Popular Tax in Europe? Lessons from the Irish Plastic Bags Levy." Environmental Resource Economics, 38: pp. 1–11. https://www.researchgate.net/publication/5146973_The_Most_Popular_Tax_in_Europe_Lessons_from_the_Irish_Plastic_Bags_Levy

de Freytas-Tamura, K. 2017. "Public Shaming and Even Prison for Plastic Bag Use in Rwanda." *New York Times*. October 28. https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/africa/rwanda-plastic-bags-banned.html.

Earth Policy Institute. 2014. "Plastic Bags." http://www.earth-policy.org/datacenter/xls/update123_all.xlsx

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 2014. Handbook for Disaster Assessment. http://caribbean.eclac. org/content/handbook-disaster-assessment.

Ellen MacArthur Foundation. 2016. *The New Plastics Economy—Rethinking the Future of Plastics*. Cowes, UK. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 2019. "GAPKI & JAPBUSI Berkomitmen Kuat Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit." https://gapki.id/news/14768/gapki-japbusi-berkomitmen-kuat-tingkatkan-kesejahteraan-petani-sawit

Homonoff, T. 2018. "Can Small Incentives Have Large Effects? The Impact of Taxes versus Bonuses on Disposable Bag Use." American Economic Journal: Economic Policy, 10(4): 177–210.

Jambeck, J. R., R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, and K. L. Law. 2015. "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean." Science 347 (6223): 768–71. https://www.iswa.org/fileadmin/user_upload/Calendar_2011 03 AMERICANA/Science-2015-Jambeck-768-71__2_.pdf

Kaza, S., L. C. Yao, P. Bhada-Tata, F. Van Woerden. 2018. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Urban Development. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

Kontan. December 10, 2018. "DAU 2019 bersifat final, berikut gambaran skemanya." ttps://nasional.kontan.co.id/news/dau-2019-bersifat-final-berikut-gambaran-skemanya

Kumparan. July 17, 2019. "Cukai Rokok Melesat di Semester I 2019, Capai Rp 63,8 Triliun. https://kumparan.com/kumparanbisnis/cukai-rokok-melesat-di-semester-i-2019-capai-rp-63-8-triliun-1rU4lvra2Cv

Making Oceans Plastic Free Initiative. 2017. "The Hidden Cost of Plastic Bag Use and Pollution in Indonesia." https://makingoceansplasticfree.com/hidden-cost-plastic-bag-use-pollution-indonesia/

Media Indonesia. October 3, 2019. "Porsi Swasta Lebih Besar di Proyek Infrastruktur." https://mediaindonesia.com/read/detail/263074-porsi-swasta-lebih-besar-di-proyek-infrastruktur

Merdeka. September 4, 2019. "Subsidi Dicabut, Tarif Listrik Pelanggan 900 VA Naik Mulai Januari 2020." https://www.merdeka.com/uang/subsidi-dicabut-tarif-listrik-pelanggan-900-va-naik-mulai-januari-2020.html

Mongabay. August 23, 2019. "Indonesia eyes palm oil export boost to China amid mounting U.S. trade war." https://news.mongabay.com/2019/08/indonesia-eyes-palm-oil-export-boost-to-china-amid-mounting-u-s-trade-war/

PPID.KLHK. July 3, 2018. Siaran Pers: "KLHK Gelorakan Pengurangan Sampah Kantong Plastik." http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1320

Quartz India. September 18, 2019. "Coal imports by Indian power plants are growing at the fastest rate in five years." https://qz.com/india/1710880/indian-coal-imports-rise-as-power-plants-face-cil-output-crunch/

Realita Rakyat (RR.com). November 5, 2019. "Industri Pengolahan Sumbang 19,62 Persen PDB." https://www.realitarakyat.com/2019/11/05/industri-pengolahan-sumbang-1962-persen-pdb/

Republika. November 19, 2019. "Januari 2020: Iuran BPJS Naik, Subsidi Listrik 900VA Dicabut." https://nasional.republika.co.id/berita/q17afd409/januari-2020-iuran-bpjs-naik-subsidi-listrik-900va-dicabut

Reuters. August 14, 2019. "China's July steel output eases on environmental curbs, shringking margins." https://www.reuters.com/article/us-china-economy-output-steel/chinas-july-steel-output-eases-on-environmental-curbs-shrinking-margins-idUSKCN1V4062

Reuters. August 19, 2019. "UPDATE 1-Top natural rubber producers ending export curbs-sources." https://www.reuters.com/article/asia-rubber/update-1-top-natural-rubber-producers-ending-export-curbs-sources-idUSL4N25F1MX

Reuters. August 24, 2019. "Indonesia's Pertamina considers exporting jet fuel due to high stock." https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL3N25M2Q9

Robert, Roberts, M., F. Gil Sander, S. Tiwari. 2019. "Drivers of Urban and Spatial Exclusion". In *Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban Potential.* Washington, DC: World Bank

Sahadewo, G. A., P. V. Marquez, R. Iglesias, E. C. Araujo, N. Nargis, P. Harimurti, J. Drope, Q. Li, J. Durazo, F. Witoelar, and B. Sikoki. 2018. "The Economics of Tobacco Taxation and Employment in Indonesia." *Global Tobacco Control Program* (June), Washington, DC: World Bank.

Setiawan, T., and S. Rizal. 2018. *Economic and Social Mobility in Indonesia.*

Shuker, Iain G.; Cadman, Cary Anne. 2018. Indonesia - *Marine debris hotspot rapid assessment : synthesis report (English).* Washington, D.C. : World Bank Group.

Swarna News. November 6, 2019. "Karhutla 'Bikin Sakit' Ekonomi Sosial." https://www.swarnanews.co.id/2019/11/06/karhutla-bikin-sakit-ekonomi-sumsel/

Taylor, R. L. and S. Villas-Boas. 2015. "Bans vs Fees: Disposable Carryout Bag Policies and Bag Usage." *Applied Economic Perspectives and Policy* 38(2): 351–372.

Tempo. March 20, 2019. "Intip Besaran Gaji PNS 2019 Setelah Dinaikkan Jokowi." https://bisnis.tempo.co/read/1187188/intip-besaran-gaji-pns-2019-setelah-dinaikkan-jokowi/full&view=ok

Mercury News. November 13, 2017. "Success! California's First in the Nation Plastic Bag Ban Works." https://www.mercurynews.com/2017/11/13/editorial-success-californias-first-in-the-nation -plastic-bag -ban-works/

The Jakarta Post. September 13, 2019. "Freeport's copper export quota triples to 700,000 tons." https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/13/freeports-copper-export-quota-triples-to-700000-tons.html

The Jakarta Post. November 22, 2019. "BKPM to take over business licenses." https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/22/bkpm-take-over-business-licenses.html

The Jakarta Post. December 2, 2019. "Reforms to boost economy taking shape." https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/02/reforms-to-boost-economy-taking-shape.html

Tirto. August 28, 2019. "Pendapatan Negara dari Cukai Rokok Sudah Rp77T Per Agustus 2019." https://tirto.id/pendapatan-negara-dari-cukai-rokok-sudah-rp77-t-per-agustus-2019-ehbv

UNEP. 2019. *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability*. United Nations Environment Programme. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?isAllowed=y&sequence=1

United States NOAA n.d. *What Are Microplastics.* United States NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Washington, DC. https://oceanservice.noaa.gov/facts/microplastics.html.

Villarreal, P. and B. Feigrnbaum. August 2012. "A Survey on the Economic Effects of Los Angeles County's Plastic Bag Ban." National Center For Policy Analysis. Policy Report No.340. http://www.ncpathinktank.org/pdfs/st340.pdf

World Bank. 2014. *Indonesia Economic Quarterly: Hard choices.* July. Jakarta.

____. 2015. *Indonesia Economic Quarterly: Reforming amid uncertainty.* December. Jakarta.

____. 2016. *The Cost of Fire 2015: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis.* Indonesia Sustainable Landscape Knowledge Note: 1. http://pubdocs.worldbank.org/en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf

____. 2017. *Indonesia Economic Quarterly: Upgraded.* June. Article 2,"What drives FDI in Indonesia?" December. Jakarta. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30841/131838.pdf?sequence=1&isAllowed=y

_____. 2018. *Indonesia Economic Quarterly:Strengthening competitiveness*. December. Jakarta

_____. 2019a. *Commodity Market Outlook*. Washington, DC: World Bank.

____. 2019b. *Indonesia Economic Quarterly: Oceans of Opportunity*. June. Jakarta. http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-reports

____. 2019c. *The Promise of Education in Indonesia*. Jakarta: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/968281574095251918/pdf/Overview.pdf

____. 2019d. *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class. Forthcoming*. Jakarta: World Bank.

World Resource Institute (WRI). August 14, 2018. "Indonesia's Deforestation Dropped 60 Percent in 2017, but There's More to Do." https://www.wri.org/blog/2018/08/indonesias-deforestation-dropped-60-percent-2017-theres-more-do

PART B:

Ahsan, A. Ir. N. Wiyono. 2007. "The impact analysis of higher cigarette prices to employment in Indonesia." Demographic Institute, Faculty of Economics. University of Indonesia.

Ahsan, A., Nur Hadi Wiyono, Ayke Soraya Kiting, Triasih Djutaharta, and Flora Aninditya. 2013. "Impact of Increasing Tobacco Tax on Government Revenue and Tobacco Consumption." SEADI Discussion Paper, Support for Economic Analysis Development in Indonesia Project. Washington, D.C.: United States Agency for International Development

Banerjee, V.A., R. Hanna, G.E. Kreindler., and B.A. Olken. 2017. "Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient: Evidence from Cash Transfer Programs." World Bank Research Observer, Vol. 32 (2): 155-184, August 2017. https://www.researchgate.net/publication/320709235_Debunking_the_Stereotype_of_the_Lazy_Welfare_Recipient_Evidence_from_Cash_Transfer_Programs.

Blecher, E. H., and C. P. van Walbeek. 2008. "An Analysis of Cigarette Affordability." International Union against Tuberculosis and Lung Disease. Paris.

BNPB. 2019. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. http://dibi.bnpb.go.id/

Bappenas. 2019. "Indonesia Vision 2045." Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppnkepala-bappenas-bambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/

Cahyadi, N., R. Hanna, B.A. Olken, R. Adi Prima, E. Setiawan and E. Syamsulhakim. 2018. "The Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia." NBER Working Paper No. 24670. http://www.nber.org/papers/w24670.pdf

Dartanto, Teguh, Faizal Rahmanto Moeis, Renny Nurhasana, Aryana Satrya, and Hasbullah Thabrany. 2018. "Parent smoking behavior and children's future development: Evidence from Indonesia Family Life Survey (IFLS)." 14th Annual Conference of the International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases (October), ISPTID, Izmir, Turkey.

Fuchs, A., and G. Del Carmen. 2018. "The Distributional Effects of Tobacco Taxation: The Evidence of White and Clove Cigarettes in Indonesia." June 23. Washington, D.C.: World Bank.

Harimurti, P., E. Pambudi, A. Pigazzini, and A. Tandon. 2013. "The nuts and bolts of Jamkesmas - Indonesia's government-financed health coverage program for the poor and near-poor." Universal Health Coverage (UNICO) studies series, no. 8. Washington, D.C.: World Bank.

National Cancer Institute in collaboration with World Health Organization (NCI-WHO). 2017. *The Economics of Tobacco and Tobacco Control*. NCI Tobacco Control Monograph Series. US Department of Health and Human Services.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Packard, T., U. Gentilini, M. Grosh, P. O'Keefe, R. Palacios, D. Robalino, and I. Santor. 2019. *Protecting All: Risk-sharing for a Diverse and Diversifying World of Work*. Human Development Perspectives. Washington D.C: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/997741568048792164/pdf/Protecting-All-Risk-Sharing-for-a-Diverse-and-Diversifying-World-of-Work.pdf

Rush, J. V. 2013. *The Impact of Natural Disaster on Poverty in Indonesia.* https://pdfs.semanticscholar.org/8888/ebd41d4d478caaebe5b762ede0e67eda9174.pdf

Sahadewo, G.A., P. V. Marquez, R. Iglesias, E.C. Araujo, N. Nargis, P. Harimurti, J. Drope, Qing Li, J. Durazo, F. Witoelar, and B. Sikoki. 2018a. "The Economics of Tobacco Taxation and Employment in Indonesia." Global Tobacco Control Program. June. Washington, D.C.: World Bank.

_____. 2018b. "The Economics of *Kretek* Rolling in Indonesia." Global Tobacco Control Program (June). Washington, D.C.: World Bank.

_____. 2018c. "The Economics of Clove Farming in Indonesia." Global Tobacco Control Program (June). Washington, D.C.: World Bank.

Semba, Richard D., Leah M. Kalm, Saskia de Pee, and Michelle O. Ricks. 2007. "Paternal smoking is associated with increased risk of child malnutrition among poor urban families in Indonesia." Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tandon, A., E.S. Pambudi, P. Harimurti, E. Masaki, A.W. Subandoro, P.Y. Chrysanti, V.S. Rajan, D. W. Dorkin, A. Chandra, C. Boudreaux, M. Chew Pei Lyn, and N. Suharno. 2016. "Indonesia - Health financing system assessment : spend more, right, and better." Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/453091479269158106/Indonesia-Health-financing-system-assessment-spend-more-right-and-better

Tohari, A., C. Parsons, A. Rammohan. 2019. "Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia's unified targeting system." *Journal of Development Economics*. Elsevier, Vol.C: 127-144.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

World Bank. 2016a. *Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Right and Better*. Washington, D.C. World Bank Group. Available at: *https://openknowledge.worldbank. org/handle/10986/25363*.

World Bank. 2016b. *Indonesia's Rising Divide*. Washington, D.C. : World Bank Group. http://pubdocs.worldbank.org/en/16261460705088179/Indonesias-Rising-Divide-English.pdf

_____. 2017. *Social Assistance Public Expenditure Review Update: Towards a comprehensive, integrated, and effective social assistance system in Indonesia*. Washington, D.C. : World Bank Group.

_____. 2018a. *The State of Social Safety Nets 2018*. Washington, D.C: World Bank.

_____. 2018b. *Indonesia Economic Quarterly: Towards inclusive growth*. March. Jakarta: World Bank.

_____. 2018c. "Economics of tobacco taxation and employment in Indonesia." Washington, D.C. : World Bank Group.

_____.2018d. "The Economics of *Kretek* Rolling in Indonesia." Global Tobacco Control Program. June. Washington, D.C.: World Bank.

_____. 2018f. "The Economics of Tobacco Farming in Indonesia." Global Tobacco Control Program. June. Washington, D.C.: World Bank.

_____. 2019a. "Build, Employ and Protect: Using Social Protection to Invest in People in a Changing World." Blog Post. https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/07/29/build-employ-and-protect-using-social-protection-to-invest-in-people-in-a-changing-world

_____. 2019b. *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. Washington, D.C: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf

_____. 2019c. *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class. Forthcoming.* Jakarta: World Bank.

_____. 2019d. *Public Expenditure Review – Overview. Forthcoming.* Jakarta: World Bank.

Zheng, Rong, Patricio V. Marquez, Abdillah Ahsan, Yang Wang, and Xiao Hu. 2018. "Cigarette Affordability in Indonesia: 2002–2017." Global Tobacco Control Program. May. Washington, DC.: World Bank.

LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Tabel 1: Realisasi anggaran belanja Pemerintah

(IDR trilun)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Aktual	Aktual	Aktual	Aktual	Aktual	Aktual	Aktual
A. Penerimaan dan hibah	**1,338**	**1,439**	**1,550**	**1,508**	**1,556**	**1,666**	**1,944**
1. Penerimaan pajak	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,344	1,519
2. Penerimaan non-pajak	352	355	399	256	262	311	409
B. Pengeluraran	**1,491**	**1,651**	**1,777**	**1,807**	**1,864**	**2,007**	**2,213**
1. Pemerintah pusat	1,011	1,137	1,204	1,183	1,154	1,265	1,455
2. Transfer ke pemerintah daerah	481	513	574	623	710	742	758
C. Neraca utama	**-53**	**-99**	**-93**	**-142**	**-126**	**-124**	**-11**
D. Surplus/defisit	-153	-212	-227	-298	-308	-341	-269
persen dari PDB	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5	-2.5	-1.8

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Neraca keseluruhan sebagai terhadap PDB menggunakan PDB yang telah direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(USD miliar)

	2016	2017	2018	2018				2019		
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Neraca Pembayaran	**12.1**	**11.6**	**-7.1**	**-3.9**	**-4.3**	**-4.4**	**5.4**	**2.4**	**-2.0**	**0.0**
Persen dari PDB	*1.3*	*1.1*	*-0.7*	*-1.5*	*-1.6*	*-1.7*	*2.1*	*0.9*	*-0.7*	*0.0*
Neraca berjalan	**-17.0**	**-16.2**	**-30.5**	**-5.0**	**-7.8**	**-8.5**	**-9.2**	**-6.7**	**-8.2**	**-7.7**
Persen dari PDB	*-1.8*	*-1.6*	*-2.9*	*-1.9*	*-3.0*	*-3.2*	*-3.6*	*-2.5*	*-2.9*	*-2.7*
Neraca perdagangan	8.2	11.4	-6.9	0.9	-1.4	-2.3	-4.2	-0.4	-1.4	-1.0
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-25.2	-27.6	-23.6	-5.9	-6.4	-6.2	-5.0	-6.3	-6.7	-6.6
Neraca modal & keuangan	**29.3**	**28.7**	**24.9**	**2.2**	**3.1**	**4.0**	**15.6**	**10.1**	**6.5**	**7.6**
Persen dari PDB	*3.1*	*2.8*	*2.4*	*0.9*	*1.2*	*1.5*	*6.1*	*3.8*	*2.3*	*2.7*
Investasi langsung	16.1	18.5	13.3	4.8	2.4	4.5	1.6	5.8	5.4	4.8
Investasi porfolio	19.0	21.1	9.3	-1.1	0.1	-0.1	10.5	5.2	4.6	4.8
Investasi lain	-5.8	-10.7	2.2	-1.5	0.6	-0.5	3.6	-1.1	-3.5	-2.1
Kesalahan & pembulatan	**-0.3**	**-1.0**	**-1.5**	**-1.1**	**0.4**	**0.1**	**-1.0**	**-0.9**	**-0.3**	**0.0**
Cadangan devisa*	**116.4**	**130.2**	**120.7**	**126.0**	**119.8**	**114.8**	**120.7**	**124.5**	**123.8**	**124.3**

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: * Cadangan pada akhir periode.

Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Neraca Nasional (% perubahan)[1]									
PDB riil	4.9	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2
Investasi riil	11.4	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5	6.2	6.7
Konsumsi riil	4.6	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3	4.6	5.1
Swasta	3.7	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0	5.0	5.1
Pemerintah	14.2	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	-0.1	2.1	4.8
Ekspor rill, barang dan jasa	30.6	14.8	1.6	4.2	1.1	-2.1	-1.7	8.9	6.5
Impor riil, barang dan jasa	26.6	15.0	8.0	1.9	2.1	-6.2	-2.4	8.1	12.0
Investasi (% PDB)	19.9	31.3	32.7	32.5	32.4	32.4	32.2	32.6	33.0
Nominal PDB (milyar dolar AS)	165	893	918	915	891	861	932	1,015	1,042
PDB per kapita (dolar AS)	857	3,688	3,741	3,668	3,532	3,370	3,602	3,877	3,932
Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)[2]									
Penerimaan dan hibah	13.9	15.5	15.5	15.1	14.7	13.1	12.5	12.3	13.1
Penerimaan pajak	7.8	11.2	11.4	11.3	10.9	10.8	10.4	9.9	10.2
Penerimaan bukan pajak	6.0	4.2	4.1	3.7	3.8	2.2	2.1	2.3	2.8
Pengeluaran	15.0	16.5	17.3	17.3	16.8	15.7	15.0	14.8	14.9
Konsumsi	2.7	3.8	3.9	4.1	4.0	4.5	4.6	4.4	4.7
Modal	1.7	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	1.4	1.5	1.2
Bunga pinjaman	3.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
Subsidi	4.2	3.8	4.0	3.7	3.7	1.6	1.4	1.2	1.5
Surplus/defisit	-1.1	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5	-2.5	-1.8
Utang Pemerintah	97.9	23.1	23.0	24.9	24.7	27.5	28.3	29.4	29.8
Utang luar negeri pemerintah	51.4	11.7	11.9	11.8	13.3	16.0	16.6	17.5	17.6
Total utang luar negeri (juga utang swasta)	87.1	25.2	27.5	29.1	32.9	36.1	34.3	36.8	39.4
Neraca Pembayaran (% PDB)[3]									
Neraca pembayaran keseluruhan	..	1.3	0.0	-0.8	1.7	-0.1	1.3	1.1	-0.7
Neraca transaksi berjalan	4.8	0.2	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-1.8	-1.6	-2.9
Ekspor, barang dan jasa	42.8	23.8	23.0	22.5	22.3	19.9	18.0	19.1	20.3
Impor, barang dan jasa	33.9	21.2	23.2	23.2	22.7	19.3	17.1	18.0	20.9
Transaksi berjalan	8.9	2.7	-0.2	-0.7	-0.3	0.6	0.9	1.1	-0.7
Neraca transaksi keuangan	..	1.5	2.7	2.4	5.0	2.0	3.1	2.8	2.4
Penanaman modal langsung, neto	-2.8	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	1.7	1.8	1.3
Cadangan devisa bruto (USD billion)	29.4	110	113	99	112	106	116	130	121
Moneter (% change)[3]									
Deflator PDB[1]	20.4	7.5	3.8	5.0	5.4	4.0	2.4	4.3	3.8
Suku bunga Bank Indonesia (%)	..	..	..	..	..	6.3	4.8	4.3	6.0
Kredit domestik	..	24.6	23.1	21.6	11.6	10.4	7.9	8.2	11.8
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata)	8,392	8,776	9,384	10,460	11,869	13,389	13,309	13,381	14,238
Harga-harga (% perubahan)[1]									
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.4	3.8	3.7	8.1	8.4	3.4	3.0	3.6	3.1
Indeks harga konsumen (rata-rata)	3.7	5.3	4.0	6.4	6.4	6.4	3.5	3.8	3.2
Harga minyak mentah Indonesia (US$ per barel)[4]	28	112	113	107	60	36	51	61	55

Sumber: [1] BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dengan tahun dasar 2010. [2] Kementerian Keuangan dan Perhitungan staf Bank Dunia, [3] BI, [4] CEIC

Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia (USD miliar)

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kependudukan[1]										
Penduduk (juta)	212	242	245	248	252	255	258	262	265	268
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	42	50	51	51	52	53	53	54	55	55
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	49	49	49	48	48
Angkatan Kerja[2]										
Angkatan kerja, total (juta)	98	117	117	120	120	122	122	125	128	131
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77	79	80
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48	49	51
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	45	38	36	35	35	34	33	32	30	29
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21	22	23
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47	48	48
Tingkat penangguran, total (% angkatan kerja)	8.1	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	6.2	5.6	5.5	5.4
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan[3]										
Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697	765	835
Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354	375	402
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	31	30	29	28	28	29	28	28	26
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19.1	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2	10.9	10.6	9.8
Di perkotaan	14.6	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3	7.8	7.7	7.0
Di perdesaan	22.4	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2	14.1	13.9	13.2
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	11.0	10.2	9.5	9.2	9.0	9.3	9.0	8.7	8.0
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	9.5	9.7	8.8	8.6	8.6	11.1	9.8	9.3	8.5
GINI indeks	0.30	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	47.3	46.2	45.7	45.5
Pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial (% PDB)[4]	..	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7
Kesehatan dan Gizi[1]										
Tenaga kesehatan (per 1,000 orang)	0.16	0.14	..	0.31	0.31	..	0.27	..	0.38	..
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	34	33	32	30	29	28	27	26	25
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup)	23	18	17	16	16	15	14	14	13	13
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	41	28	27	26	25	24	24	23	22	21
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	272	228	221	214	207	199	192	184	177	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun)	76	78	80	82	81	75	75	76	75	75
Total pengeluaran untuk kesehatan (% PDB)	2.0	3.5	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	..	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% PDB)	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4
Pendidikan[3]										
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	..	92	92	93	92	93	97	97	97	98
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	49	49	50	48	49	49	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	..	61	60	60	61	65	66	66	79	79
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	49	50	50	51	51	49	49
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	..	16	14	15	16	18	20	21	19	19
Female (% of total net enrollment)	..	53	50	54	54	55	56	55	53	53
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95	96	96
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)[5]	..	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.4	3.1	3.0
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)[5]	..	19.4	18.9	17.9	17.3	17.4	19.3	20.0	20.0	20.0
Air Bersih dan Kesehatan Lingkungan[1]										
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% total penduduk)	75	85	86	87	88	89	90	89	89	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	64	76	77	78	79	80	81	95	95	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	89	94	94	95	96	96	97	81	82	..
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% total penduduk)	44	60	62	64	65	66	68	71	73	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	28	47	49	51	53	55	57	79	80	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	66	74	74	75	76	77	77	62	65	..
Lainnya[1]										
Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik)	..	..	3.3	..	..	..	..	..	..	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%)[6]	8	18	18	19	19	17	17	17	20	20

Sumber: [1] World Development Indicators (WDI); [2] BPS (Sakernas); [3] BPS (Susenas) dan Perhitungan staf Bank Dunia; [4] Kementerian Keuangan, dan Perhitungan staf Bank Dunia, bantuan sosial pemerintah termasuk pengeluaran untuk Raskin, asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan untuk warga miskin, Program Padat Karya Tunai (PKT, 2018), dan Program Keluarga Harapan (PKH), Belanja Kemensos dan fungsi perlindungan sosial lainnya, serta angka realisasi; [5] Kementerian Keuangan; [6] Inter-Parliamentary Union

Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.